PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 823 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Dharmasraya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Dharmasraya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Dharmasraya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Dharmasraya menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.

KELIMA : Bupati Dharmasraya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Desember 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 823 - 2023
TANGGAL DESEMBER 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan :

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. Kepentingan umum;
C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati, meliputi:

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Perundang-Undangan.

   Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penetapan Perkada mengenai RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	Nomor 11 Tahun 2023	3 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat 1 satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/696/BKD-2023	5 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA	415.4/8/BUP/2023 jo 100.3.7/VII/7/BA/DPRD-2023	18 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS	415.4/9/BUP/2023 jo 100.3.7/VII/8/BA/DPRD-2023	18 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/879/BKD-2023	14 September 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda APBD	415.4/18/BUP/2023 100.3.7/XI/18/BA/DPRD-2023	24 November 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/1236/BKD-2023	29 November 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya dan DPRD pada tanggal 24 November 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 29 November 2023, ***sudah sesuai*** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2023, ***Sudah sesuai*** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD

Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 5 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Dharmasraya dengan DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada tanggal 5 Juli 2023, ***sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 14 September 2023, ***sudah sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya dengan Bupati Dharmasraya pada tanggal 24 November 2023, ***sudah sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Dharmasraya agar tetap konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD, penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar

hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah
   a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun prognosis target pendapatan harus memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp911.076.883.278 atau 99.19% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 pada sampai dengan 24 November 2023 sebesar Rp693.024.891.470,47 atau 73,58% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
   b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a s/d C.1.l Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
   c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
   d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
2. Kebijakan Belanja Daerah
   a. Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan **kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah** dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp829.320.612.705,35 atau 94,45% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi

belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sampai 24 November sebesar Rp698.041.096.508 atau 71,06% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023..

d. belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

1) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
   a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
   b) peningkatan pendapatan masyarakat.
   c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
2) penurunan stunting antara lain:
   a) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
   b) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.
   c) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

   dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
3) pengendalian inflasi antara lain:
   a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
   b) pengendalian laju alih fungsi lahan.
   c) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.
   d) penguatan tata kelola logistik daerah.
   e) pengawasan harga dan operasi pasar.
4) peningkatan investasi antara lain:
   a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem Online Single Submission (OSS).
   b) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia.
5) penguatan kualitas sumber daya manusia;
6) pembangunan infrastruktur; dan
7) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).

e. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak

absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

f. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

g. Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp964.168.007.612 mengalami penambahan sebesar Rp47.319.213.222 atau 5,16% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp916.848.794.390 .

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp105.162.132.160 .
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp850.258.147.517 .
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.747.727.935 .

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp964.168.007.612 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	
Pendapatan Asli Daerah	**105.162.132.160**
Pajak Daerah	24.651.781.411
Retribusi Daerah	2.857.790.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.832.210.107
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72.820.350.642
Pendapatan Transfer	**850.258.147.517**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	791.897.793.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.360.354.517
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**8.747.727.935**
Pendapatan Hibah	100.000.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.647.727.935
Jumlah Pendapatan	**964.168.007.612**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 105.162.132.160 .

   Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

   a. Pajak Daerah

      Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.651.781.411 .

      Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Persandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2023

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target APBD Tahun Anggaran 2024	Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target APBD TA. 2024	(%)	(%
	Target	Realisasi		Target	Realisasi Per Oktober 2023		(Rp)	(Rp)	10=9:5	11=
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**105.415.369.674,00**	**108.010.790.645,80**	**102,46**	**100.842.119.674,00**	**95.551.528.133,23**	**94,75**	**105.162.132.160,00**	**4.320.012.486,00**	**4,28**	**110**
Pajak Daerah	**22.776.715.953,00**	**21.634.156.143,46**	**94,98**	**22.776.715.953,00**	**19.175.371.357,00**	**84,19**	**24.651.781.411,00**	**1.875.065.458,00**	**8,23**	**128**
Pajak Hotel	180.000.000,00	193.432.436,00	107,46	180.000.000,00	221.188.500,00	122,88	250.000.000,00	70.000.000,00	38,89	113
Pajak Restoran	1.425.000.000,00	1.721.533.518,00	120,81	1.425.000.000,00	1.065.370.880,00	74,76	1.300.000.000,00	-125.000.000,00	(8,77)	122
Pajak Hiburan	3.000.000,00	4.129.250,00	137,64	6.500.000,00	1.575.000,00	24,23	7.000.000,00	500.000,00	7,69	444
Pajak Reklame	235.000.000,00	260.438.054,00	110,82	235.000.000,00	206.538.954,00	87,89	260.000.000,00	25.000.000,00	10,64	125
Pajak Penerangan Jalan	12.973.500.000,00	13.226.640.017,46	101,95	12.970.000.000,00	11.556.699.519,00	89,10	13.725.000.000,00	755.000.000,00	5,82	118
Pajak Parkir	6.000.000,00	6.427.883,00	107,13	6.000.000,00	5.919.300,00	98,66	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	202
Pajak Air Tanah	15.000.000,00	16.611.667,00	110,74	15.000.000,00	22.617.818,00	150,79	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	132
Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.100.000,00	101,00	10.000.000,00	4.750.000,00	47,50	10.000.000,00	0,00	0,00	210
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	425.000.000,00	371.121.511,00	87,32	425.000.000,00	358.355.177,00	84,32	500.000.000,00	75.000.000,00	17,65	139
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.504.215.953,00	2.475.105.302,00	54,95	4.504.215.953,00	2.691.666.576,00	59,76	4.557.781.411,00	53.565.458,00	1,19	169
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	3.348.616.505,00	111,62	3.000.000.000,00	3.040.689.633,00	101,36	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	33,33	131
Retribusi Daerah	**3.873.808.400,00**	**2.759.700.350,00**	**71,24**	**3.623.788.885,00**	**1.577.607.800,00**	**43,53**	**2.857.790.000,00**	**-765.998.885,00**	**(21,14)**	**181**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	275.000.000,00	252.522.850,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	110.000.000,00	156.483.000,00	142,26	200.000.000,00	132.268.400,00	66,13	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	226
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
Retribusi Pelayanan Pasar	8.000.000,00	8.020.000,00	100,25	0,00	720.000,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	1000 0
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	320.000.000,00	234.152.000,00	73,17	322.500.000,00	187.757.000,00	58,22	0,00	-322.500.000,00	-100,00	0,0
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	33.300.000,00	111,00	30.000.000,00	17.700.000,00	59,00	30.000.000,00	0,00	0,00	169
Retribusi Pelayanan Tera/Tera	50.000.000,00	45.940.000,00	91,88	50.000.000,00	36.270.500,00	72,54	0,00	-50.000.000,00	-100,00	0,0

Ulang										
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	336.625.000,00	67,33	500.000.000,00	87.725.000,00	17,55	0,00	-500.000.000,00	-100,00	0,
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.118.058.400,00	632.338.500,00	56,56	1.384.558.400,00	429.070.600,00	30,99	1.275.290.000,00	-109.268.400,00	-7,89	297
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	32.500.000,00	12.400.800,00	38,16	30.000.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	2.500.000,00	8,33	0,
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	3.500.000,00	3.520.000,00	100,57	3.500.000,00	3.320.000,00	94,86	3.500.000,00	0,00	0,00	105
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	825.000.000,00	421.510.500,00	51,09	825.000.000,00	319.740.800,00	38,76	790.000.000,00	-35.000.000,00	-4,24	247
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	601.750.000,00	622.887.700,00	103,51	278.230.485,00	363.035.500,00	0,00	300.000.000,00	21.769.515,00	7,82	82
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**4.324.065.836,00**	**4.324.065.836,00**	**100,00**	**4.324.065.836,00**	**4.832.210.107,00**	**111,75**	**4.832.210.107,00**	**508.144.271,00**	**11,75**	**100**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.324.065.836,00	4.324.065.836,00	100,00	4.324.065.836,00	4.832.210.107,00	111,75	4.832.210.107,00	508.144.271,00	11,75	100
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas PenyertaanModal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**74.440.779.485,00**	**79.292.868.316,34**	**106,52**	**70.117.549.000,00**	**69.966.338.869,23**	**99,78**	**72.820.350.642,00**	**2.702.801.642,00**	**3,85**	**104**
Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.270.730.485,00	1.130.369.548,00	88,95	1.592.500.000,00	20.280.000,00	1,27	300.000.000,00	-1.292.500.000,00	(81,16)	147
Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	(100,00)	0,
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	100.000.000,00	102.704.000,00	102,70	170.000.000,00	108.664.000,00	63,92		-170.000.000,00	(100,00)	0,
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000,00	1.289.885.522,00	117,26	1.100.000.000,00	497.114.655,00	45,19	500.000.000,00	-600.000.000,00	(54,55)	100
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	120.000.000,00	162.151.172,00	135,13	120.000.000,00	92.147.341,00	76,79	120.000.000,00	0,00	0,00	130
Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)- LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00	-	0,00	100.000.000,00	-	0,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,00	0,
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.800.000.000,00	3.047.851.066,94	108,85	2.800.000.000,00	1.357.085.601,30	48,47		-2.800.000.000,00	(100,00)	0,

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.740.000.000,00	3.181.107.944,40	182,82	1.740.000.000,00	576.050.412,00	33,11	1.500.000.000,00	-240.000.000,00	(13,79)	260
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	160.000.000,00	10.622.160,00	6,64	160.000.000,00	171.734.072,17	107,33	50.000.000,00	-110.000.000,00	(68,75)	29,
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	-	0,00	-	120.980,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	41,
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	0,00	-	1.165.283,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	85,
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	-	0,00	-	74.250,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	67,
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	-	0,00	-	166.499,38	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60,
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	-	0,00	-	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	0,00	-	83.054,50	0,00	100.000,00	100.000,00	0.00	120
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	-	0,00	-	23.168.536,88	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	43,
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	-	0,00	-	833.000,00	0,00		0,00	0,00	0,0
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	0,00	-		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00	-	0,00	50.000.000,00	-	0,00	0,00	-50.000.000,00	(100,00)	0,0
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.788.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	75.563.294,00	75,56	100.000.000,00	15.457.109,00	15,46	100.000.000,00	0,00	0,00	646,
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	220.000.000,00	309.331.877,00	140,61	220.000.000,00	544.111.481,00	247,32	200.000.000,00	-20.000.000,00	(9,09)	36,7
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Pendapatan BLUD	59.526.063.000,00	62.787.950.607,00	105,48	54.801.063.000,00	55.631.734.655,00	101,52	69.738.900.642,00	14.937.837.642,00	27,26	125,
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.153.986.000,00	7.195.331.125,00	100,58	7.153.986.000,00	6.465.558.980,00	90,38	0,00	-7.153.986.000,00	(100,00)	0,0

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

1) Pajak Restoran sebesar Rp1.300.000.000.
2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp13.725.000.000.
3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp4.557.781.411.
4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp4.000.000.000.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.857.790.000 .

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp404.000.000 dengan rincian antara lain :
   a) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp0.
   b) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp2.000.000.
   c) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp72.000.000.
   d) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp300.000.000.

Terhadap pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan yang semula diletakkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada objek pendapatan BLUD dari jasa layanan, agar dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum pada objek Pelayanan Kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan BLUD

2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.103.790.000 dengan rincian antara lain :
   a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.275.290.000.
   b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp2.500.000.
3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp350.000.000 dengan rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan butir C.2.a.1)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

(1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;

(2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan

(3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 harus mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

(1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

(2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

(3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

    (i). kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;

(ii). kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
(iii). untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
(iv). untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
(v). untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang.

sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 24 November 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp693.024.891.470,47 atau 73,58% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp941.855.386.005, yang diuraikan antara lain :

1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp20.805.605.052 atau 87,23% dari alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.850.981.411.

2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.703.396.987 atau 49,28% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.456.738.885.

Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu menghitung kembali target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potensi nyata yang dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Dharmasraya merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.832.210.107.

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, maka penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sampai dengan Tahun Anggaran 2023 serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.

2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.

4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.

5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai *(Performance Based),* atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.820.350.642 , harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp300.000.000.

2) Jasa Giro sebesar Rp620.000.000.

3) Pendapatan Bunga sebesar Rp0.

4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp300.000.000.

5) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp0.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya terkait pendapatan retribusi, pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan agar dipindahkan penganggarannya ke retribusi pelayanan kesehatan

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp850.258.147.517 atau 80,18% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp791.897.793.000 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

1) Dana Perimbangan sebesar Rp722.999.714.000 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30.023.665.000.

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp519.999.606.000.

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp36.038.894.000.

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp136.937.549.000.

2) Dana Desa sebesar Rp53.731.011.000.

3) Insentif Fiskal sebesar Rp15.167.068.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)		selisih
	APBD 2024	Surat Resmi Kemenkeu	
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN TRANSFER			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**791.897.793.000,00**	**791.897.793.000,00**	
Dana Perimbangan	**722.999.714.000,00**	**722.999.714.000,00**	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**30.023.665.000,00**	**30.023.665.000,00**	

Uraian	Jumlah (Rp)		selisih
	APBD 2024	Surat Resmi Kemenkeu	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.936.695.000,00	7.936.695.000,00	
DBH PPh Pasal 21	3.941.024.000,00	3.796.652.000,00	
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	144.372.000,00	
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	42.632.000,00	42.632.000,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	7.270.000,00	7.270.000,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	775.542.000,00	775.542.000,00	
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara_x005f Royalty	6.192.233.000,00	6.192.233.000,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	10.031.114.000,00	329.574.000,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	-	9.701.540.000,00	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	**519.999.606.000,00**	**519.999.606.000,00**	
DAU	422.691.705.000,00	422.691.705.000,00	
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	20.734.362.000,00	20.734.362.000,00	
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	33.343.800.000,00	33.343.800.000,00	
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	16.365.536.000,00	16.365.536.000,00	
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	26.864.203.000,00	26.864.203.000,00	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**36.038.894.000,00**	**36.038.894.000,00**	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	656.592.000,00	656.592.000,00	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.416.151.000,00	10.416.151.000,00	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.742.380.000,00	4.742.380.000,00	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	486.379.000,00	486.379.000,00	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	-	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	91.794.000,00	91.794.000,00	
Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-ugasan-Peningkatan Pencegahan dan gendalian Penyakit dan Sanitasi Total basis Masyarakat	-	-	
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	6.184.874.000,00	6.184.874.000,00	
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan Jalan	-	-	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	13.460.724.000,00	13.460.724.000,00	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**136.937.549.000,00**	**136.937.549.000,00**	
DAK Non Fisik-BOS Reguler	33.551.300.000,00	33.551.300.000,00	
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.237.500.000,00	1.237.500.000,00	

Uraian	Jumlah (Rp)		selisih
	APBD 2024	Surat Resmi Kemenkeu	
DAK Non Fisik-TPG PNSD	61.966.377.000,00	61.966.377.000,00	
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.119.500.000,00	2.119.500.000,00	
DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.100.669.000,00	3.100.669.000,00	
DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.281.600.000,00	4.281.600.000,00	
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	903.700.000,00	903.700.000,00	
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan	11.534.395.000,00	11.534.395.000,00	
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	372.331.000,00	372.331.000,00	
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	12.700.115.000,00	12.700.115.000,00	
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.069.970.000,00	4.069.970.000,00	
DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-	
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	580.092.000,00	580.092.000,00	
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	520.000.000,00	
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	-	-	
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal	**15.167.068.000,00**	**15.167.068.000,00**	
Dana Desa	**53.731.011.000,00**	**53.731.011.000,00**	

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 , sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp58.360.354.517 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.075.161.835.025 .

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan ***setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan*** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.075.161.835.025 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	**860.925.106.408**
Belanja Pegawai	534.592.198.823
Belanja Barang dan Jasa	288.577.223.705
Belanja Hibah	37.755.683.880
BELANJA MODAL	**97.354.785.417**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.811.132.407
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.928.956.233
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.511.278.952
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.987.417.825
Belanja Modal Aset Lainnya	116.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.000.000.000**
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
Belanja Transfer	**111.881.943.200**
Belanja Bagi Hasil	2.750.957.200
Belanja Bantuan Keuangan	109.130.986.000
Jumlah Belanja	**1.075.161.835.025**

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp14.273.917.733 atau 21,30% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp67.010.282.400. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp 8.759.954.440, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

   a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

   b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.

   c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar

   d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.

   e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

   f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi sebesar Rp4.531.762.993 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

   a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

   b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.

   c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.

   d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.

   e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

   f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sebesar Rp982.200.300 , **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.

c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.

d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp0 **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).

c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp20.229.500, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp293.311.500 , **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp17.136.500, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp107.075.300, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:

a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp28.127.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:

   a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

   b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

   c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

   d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).

7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp0 **atau belum dianggarkan**,**agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp0 **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :

   a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.

   b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.

   c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.

d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.

2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp1.935.087.690 atau 1,65% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp117.377.884.208 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp216.733.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

   a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.

   b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

   c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :

      (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)

      (2) Standar kualias yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp187.520.800, **agar ditingkatkan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk: :

a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp312.183.850 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.

c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :

(1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal

(2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi sebesar Rp245.416.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

(1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi

(2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp50.000.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

   a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

   b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.

   c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :

      (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera

      (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp78.001.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

   a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).

   b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

   c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :

      (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

      (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.

      (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.

7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp33.401.000 **agar ditingkatkan** alokasi

anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :

(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.

d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.

8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp228.197.140, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.

c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

(1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

(2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp135.125.000, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

(1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan

(2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp50.000.000, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.

b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:

(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.

(2) Edukasi.

(3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.

(4) Edukasi kepatuhan minum obat.

(5) Melakukan rujukan jika diperlukan.

11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp348.509.900 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

(1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

(2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.

(3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.

(4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp50.000.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.

c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi

(1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

(2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar Rp1.176.531.604 atau 1,43% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp82.496.903.725. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukkannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp682.806.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp493.725.004 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp58.307.750 atau 0,53% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp11.092.269.596 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **harus ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.

2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.

3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp53.117.250, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

   a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.

   b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.

   c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.

4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan, harus disediakan** alokasi anggaran yang memadai untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.

2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana sebesar Rp341.635.000 atau 25,51% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.339.070.300. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaknii :

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggaran yang memadai dan mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp185.827.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta peruntukkannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp155.808.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah sebesar Rp202.463.000 atau 4,13% dari total belanja Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp4.896.401.314. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp162.468.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebesar Rp39.995.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp30.000.000 atau 0,61% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp4.896.401.314. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :

a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **harus disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **harus disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan

Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untukKabupaten/kota yaitu:

1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp399.312.285 atau 7,63% dari total belanja SKPD Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp5.231.962.114. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp76.380.500, dialokasikan anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
    a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia

telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi social dan rujukan.

2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan, harus disediakan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.

b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.

2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.

3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.

4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta ***mengalihkan alokasi Belanja Hibah*** *pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024* ***dalam rangka pemenuhan SPM*** *tersebut.*

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah *Kabupaten Dharmasraya* tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah *Kabupaten Dharmasraya* tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah *Kabupaten Dharmasraya* telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

	Prioritas Nasional	**APBD 2024**	**Rasio Terhadap Belanja Daerah**
		(Rp)	**(%)**
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	792.205.292.898	73,68
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	0	0
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	130.852.403.165	12,17
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	72.144.884.296	6,71

	Prioritas Nasional	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	77.334.976.491	7,19
6	Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN6)	2.624.278.175	0,24
7	Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	0	0
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	**1.075.161.835.025**	**100**
	Total Belanja Daerah	**1.075.161.835.025**	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun 2024 ***sudah selaras*** dengan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga belum terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	523.127.202.041	48,66
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	3.344.398.700	0,31
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	7.462.450.050	0,69
4.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital	1.402.622.145	0,13
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	635.321.800	0,06
6.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	31.675.709.740	2,95
7.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	507.514.130.549	47,20
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.075.161.835.025	100
	Total Belanja Daerah	1.075.161.835.025	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ***sudah selaras*** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga belum terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera

Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mengupayakan secara terus menerus konsistensi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan prioritas provinsi Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

   Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2024 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1	Pemerataan pembangunan infrastruktur	76.303.997.991	7,10
2	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	10.230.625.000	0,95
3	Memajukan pendidikan yang berkarakter	75.677.601.350	7,04
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	54.139.938.088	5,04
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	845.202.717.192	78,61
6	Pembangunan yang berkelanjutan	2.344.933.175	0,22
7	Membangkitkan identitas daerah	1.921.173.413	0,18
8	Membangun berbasis nagari	9.340.848.816	0,87
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.075.161.835.025	100
	Total Belanja Daerah	1.075.161.835.025	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun 2024 ***sudah selaras*** dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mempertahankan dan konsisten dengan hasil penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

   Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

   a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp351.724.976.752 atau 32,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.075.161.835.025, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	APBD 2024	Selisih
1	**a. Urusan Bidang Pendidikan:**	**325.848.464.442**	**340.331.123.153**	**14.482.658.711**
	1) Belanja Operasi:	**303.131.314.930**	**316.022.880.638**	**12.891.565.708**
	a. belanja pegawai;	263.161.965.000	268.529.769.953	5.367.804.953
	b. belanja barang dan jasa;	35.124.949.930	38.318.310.685	3.193.360.755
	c. belanja hibah;	4.844.400.000	9.174.800.000	4.330.400.000
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	**22.717.149.512**	**24.308.242.515**	**1.591.093.003**
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	**7.849.250.439**	**8.107.260.594**	**258.010.155**
	1) Belanja Operasi:	7.849.250.439	8.107.260.594	258.010.155
	a. belanja pegawai;	-	37.700.000	37.700.000
	b. belanja barang dan jasa;	7.849.250.439	7.424.560.594	-424.689.845
	c. belanja hibah;		645.000.000	645.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	-	-	-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	**14.744.387.400**	**390.320.050**	**-14.354.067.350**
	1) Belanja Operasi:	**3.872.864.400**	**329.970.050**	**-3.542.894.350**
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	3.872.864.400	329.970.050	-3.542.894.350
	c. belanja hibah;	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	**10.871.523.000**	**60.350.000**	**-10.811.173.000**
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	**6.081.999.632**	**2.945.472.955**	-3.136.526.677
	1) Belanja Operasi:	6.081.999.632	2.945.472.955	-3.136.526.677
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	6.081.999.632	2.053.972.955	-4.028.026.677
	c. belanja hibah;	-	880.000.000	880.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	-	-	-
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	**0**	**0**	**0**
	1) Belanja Transfer:	0	0	0
	Belanja bantuan keuangan khusus	0	0	0

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	APBD 2024	Selisih
	2)Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial pada SKPD Sekretariat Daerah	0	0	- 0
2	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)**	**354.524.101.913**	**351.724.976.752**	**-2.749.925.161**
3	**Total Belanja Daerah**	**1.029.378.138.553**	**1.075.161.835.025**	**45.783.696.472**
4	**Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%**	**34,44**	**32,71**	

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir E.1a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kbupaten harmasraya harus konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

1) standar isi.
2) standar proses.
3) standar kompetensi lulusan.
4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
5) standar sarana dan prasarana.
6) standar pengelolaan.
7) standar pembiayaan.
8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp163.724.314.994 atau 22,57% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp725.381.121.876 .

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

1) dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.
3) prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:
    a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
    b) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting;*
    c) pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
    d) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
    e) penguatan jejaring layanan primer; dan
    f) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Penyediaan anggaran kesehatan *agar terus ditingkatkan* di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.*

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan ***prevalensi stunting*** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp316.551.300 atau 0,27% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp117.377.884.208 .

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan

dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp316.551.300 atau sekitar 0,03% dari total belanja dalam Rancangan APBD Tahun 2024. Untuk itu, Kabupaten Dharmasraya agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri.

Belanja daerah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:

(1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.

(2). kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.

(3). kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan serta melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.790.976.597 atau 26,24% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.075.161.835.025, dengan rincian pada Tabel 9 dan 10 sebagai berikut :

Tabel 9
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Komponen Perhitungan	Jumlah		
	APBD 2023	APBD 2024	Selisih
Total Belanja Daerah	1.029.378.138.553	1.075.161.835.025	45.783.696.472
Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
a belanja bagi hasil	2.632.820.000	2.750.957.200	118.137.200
b bantuan keuangan	108.349.574.000	109.130.986.000	781.412.000
c jumah (a+b)	110.982.394.000	111.881.943.200	899.549.200
Selisih (1-2)	918.395.744.553	963.279.891.825	44.884.147.272
Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	367.358.297.821	385.311.956.730	17.953.658.909

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.790.976.597, dengan rincian pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10
Format Perhitungan Belanja Infrasrtuktur Daerah

Komponen Perhitungan	Jumlah		
	APBD 2023	APBD 2024	Selisih
a Belanja Modal:	**151.236.483.671**	**97.354.785.417**	**-53.881.698.254**
1) tanah;	-	-	-
2) peralatan dan mesin;	38.340.791.768	21.811.132.407	-16.529.659.361
3) bangunan dan gedung;	45.417.466.354	26.928.956.233	-18.488.510.121
4) jalan, jaringan, dan irigasi;	61.569.056.460	45.511.278.952	-16.057.777.508
5) aset tetap lainnya;	5.208.742.689	2.987.417.825	-2.221.324.864
6) aset lainnya.	700.426.400	116.000.000	-584.426.400
b Belanja Pemeliharaan	**9.085.882.720**	**8.549.521.300**	**-536.361.420**
Jumlah 1 = (a + b)	**160.322.366.391**	**105.904.306.717**	**-54.418.059.674**
a Belanja Hibah;	13.802.790.880	37.755.683.880	23.952.893.000
b Belanja Bantuan Sosial;	-	-	-
c Belanja Bantuan Keuangan.	108.349.574.000	109.130.986.000	781.412.000
jumlah 2 = (a + b + c)	122.152.364.880	146.886.669.880	24.734.305.000
Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	282.474.731.271	252.790.976.597	-29.683.754.674

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***belum memenuhi*** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *harus mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen)* sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga *batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027* sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya (di luar gaji dan tunjangan) sebesar Rp3.472.104.200 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung penguatan pembinaan dan pengawasan pada InspektoratKabupaten Dharmasraya antara lain tercantum pada :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp917.161.000;
2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp572.183.000;

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yaitu sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir E.2.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus ***menambahkan jumah alokasi*** *anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024.*

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :
   a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
   b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja

perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d) Reviu Laporan Keuangan;

e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

f) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menjadi sebesar Rp1.871.255.000 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetesi ASN.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***sudah memenuhi*** alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus ***tetap konsisten*** dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Dharmasraya dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***tidak diperkenankan*** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

   a. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp900.000.000 atau 0,08% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

   Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

   Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai*** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang

ditegaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Dharmasraya sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Wali Kota/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing sebesar Rp469.609.000,00, atau 0,04% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud ***yang memadai*** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai.4)i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp34.995.500 atau 0,003% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai*** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.3.ai.3)d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp328.642.614.608 atau 88,56% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp371.111.125.934 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini *sudah memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk

menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *harus terus berkomitmen untuk mendukung dan* menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu agar Bupati Dharmasraya:

(a) melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

(1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah;
(2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
(3) memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

(b) meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh LKPP.

(c) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien dengan:

(1) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog elektronik lokal;
(2) mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;
(3) melaksanakan *E-purchasing* melalui katalog elektronik lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(4) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan *E-purchasing*.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp860.925.106.408, atau 80,07% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.075.161.835.025, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp534.592.198.823 atau 49,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp467.405.652.823 atau 43,47% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah *Kabupaten Dharmasraya* tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Belum memenuhi *ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah* ***maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD****. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir* C.3.a.1)f) *Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.*

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

   Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp349.780.713.149 atau 32,53% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.3.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :
   a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp21.241.462.000.
   b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi sebesar Rp641.460.000.
   c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp2.872.274.000.
   d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.500.000.
   e) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp750.000.
   f) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp1.000.000.
   g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp60.000.000.
   h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp3.000.000.
   i) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp4.000.000.

Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir C.3.a.1)h)(5) dan butir C.3.a.1)h)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

   a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.228.604.890.

      (1) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp11.708.541.016.

      (2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.494.800.000.

      (3) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp570.000.000.

      (4) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.217.000.000.

      (5) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.120.000.000.

   b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp120.000.000;

   Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

   Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, *sudah sesuai* dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas *50 milyar* sampai dengan *150 milyar* dialokasikan yaitu *paling rendah sebesar Rp400.000.000,00* dan *paling tinggi sebesar 0,40%*. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp59.973.411.307 atau 7,81% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp71.743.973.000.

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp0.

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp0.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp72.510.847.650.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir C.3.a.1)h)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp61.966.377.000.

8) Belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp2.119.500.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.vii)(iii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1.232.589.000 atau 4,99% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.651.781.411 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp922.779.000.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp309.810.000.

(3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp0.

b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp142.889.500 atau 5% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.857.790.000 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp100.022.650.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp42.866.850.

(3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0.

Alokasi insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan alokasi insentif pemungutan retribusi tidak memperhitungkan pendapatan retribusi jasa usaha yang berasal dari pendapatan BLUD.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir C.2.a.1)t) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

10) Belanja Honorarium sebesar Rp3.587.750.000 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :

a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp3.162.000.000.

b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp397.150.000.

c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebesar RP28.600.000.

11) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp713.750.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :

a) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp713.750.000,00.

b) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp0.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)h)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa menjadi sebesar Rp288.577.223.705 atau 26,84 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

1) Belanja Barang sebesar Rp69.228.449.609 yang antara lain diuraikan pada Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp68.436.372.909, antara lain diuraikan pada :
   a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp4.585.329.268.
   b) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp16.151.000.
   c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp467.935.000.
   d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp847.420.500.
   e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp2.522.239.400.
   f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp723.753.200.
   g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp3.510.000.
   h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp335.646.600.
   i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp202.500.000.
   j) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp4.958.705.000.

k) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp17.831.386.313.

l) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp20.391.460.913.

m) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp1.017.154.000.

n) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp319.284.000.

o) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp663.100.000.

p) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp0.

q) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp2.414.117.000.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir C.3.a.2)c)(1)(b), butir C.3.a.2)c)(1)(c) dan butir C.3.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Belanja Jasa sebesar Rp89.457.987.706 yang antara lain diuraikan :

a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp60.494.765.706 yang diuraikan antara lain :

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp1.181.450.000.

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.055.070.000.

(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp30.000.000.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya *dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai*

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp2.448.600.000.

(5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp4.157.656.000.

(6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp3.257.390.000.

(7) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebesar Rp2.306.330.000.

(8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp13.742.435.000.

(9) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp0.

(10) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp571.480.000.

(11) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp4.915.850.000.

(12) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp2.977.200.000.

Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah ***dilarang*** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukkannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***tidak diperkenankan*** *untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM*

dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13)Belanja Tagihan Air sebesar Rp46.471.000.

(14)Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp4.523.331.160.

(15)Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp1.231.475.846.

Penganggarannya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b) Belanja Lembur sebesar Rp755.203.000.

Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

c) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp12.538.870.200 yang diuraikan :

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp9.490.723.200.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.110.000.000.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp0.

(4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp1.120.110.000.

(5) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp303.237.000.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2)c)(2)(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

(1) Belanja Sewa Tanah sebesar Rp0.

(2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.770.110.000.

(3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.394.229.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.*

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

e) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp1.200.000.000.

f) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp700.000.000.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal

adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.360.012.800.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek- aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp8.549.521.300 yang diuraikan pada :

a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp0.

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.865.180.000.

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp507.339.800.

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.177.001.500.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir C.3.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp47.618.712.600 yang diuraikan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp47.618.712.600.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya ***dirasionalkan dan dikurangi*** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud,* sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir C.3.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah (diluar gaji dan tunjangan), untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar tidak menganggarkan perjalanan dinas luar negeri pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ***kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya****, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.*

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp947.100.000 yang diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp25.016.294.988.

2) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp8.574.800.000.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp33.591.094.988 ***lebih kecil*** dari alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.788.800.000, ***belum sesuai*** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp27.794.555.158.

2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp46.076.569.302.

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp3.898.910.200.

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp0.

Belanja BLUD sebesar Rp77.770.034.660 ***lebih besar*** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp69.738.900.642. ***Belum sesuai*** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah sebesar Rp37.755.683.880 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp23.065.883.880.

2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp6.115.000.000.

3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.330.000.000.

4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp0.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial ***dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan*** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Dharmasraya baru sebesar Rp19.593.786.666 atau 1,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024), maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar **Rp0, atau belum dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam lampiran III.a Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD TA 2024 terdapat belanja hibah untuk Partai Politik sebesar Rp798.390.880, dimana hibah ini dianggarkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik namun belum dirinci sesuai calon penerima (by name by address). Untuk itu diminta Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyesuaikan penempatan rekening hibah untuk Partai Politik tersebut dan mencatatkannya secara rinci by name by address.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD TA. 2024, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Dharmasraya sebesar Rp12.917.493.000 atau 61,51% dari total NPHD sebesar Rp21.000.000.000 dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp6.600.000.000 atau 60% dari total NPHD sebesar Rp11.000.000.000.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

sudah memenuhi *alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebesar sisa tot al kebutuhan pada APBD TA 2024 ini, sesuai NPHD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan KPU serta Bawaslu Kota Payakumbuh.*

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp97.354.785.417 atau 9,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, ***harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023***.

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir ***C.3.b.1), C.3.b.2)*** dan butir ***C.3.b.3)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru *(new initiative)* dan angka dasar *(baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Dharmasraya sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir ***C.3.b.7), C.3.b.8), C.3.b.9) dan C.3.b.10)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.811.132.407 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
   1) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp7.749.000.000.
   2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp81.400.000.
   3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.555.676.200.
   4) Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.927.326.000.
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.928.956.233.
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp45.511.278.952 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp40.738.088.952.
2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp4.440.310.000.
3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp82.880.000.

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.987.417.825.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, *dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya*, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan *sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah* berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir ***C.3.b.4)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp1.700.000.000.

b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp97.800.000.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000 atau 0,46% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah alokasinya perlu untuk ***dihitung kembali*** dan nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir ***C.3.c.*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

D. Kebijakan Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp121.993.827.413, sebagaimana Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		%	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target APBD Tahun Anggaran 2024	Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target APBD TA. 2024	% Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target APBD TA. 2024	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi APBD TA 2023 per Oktober 2023
	(Rp)			(Rp)						
	Target	Realisasi		Target	Realisasi Per Okt 2023		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=8:6
PEMBIAYAAN	**46.106.670.917,00**	**57.472.555.708,00**	**124,65**	**103.638.474.963,00**	**31.521.662.880,00**	**30,42**	**110.793.827.413,00**	**7.155.352.450,00**	**6,90**	**351,48**
Penerimaan Pembiayaan	**58.994.211.000,00**	**70.206.985.982,00**	**119,01**	**114.029.344.163,00**	**41.912.532.080,00**	**36,76**	**121.993.827.413,00**	**7.964.483.250,00**	**6,98**	**291,07**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	58.994.211.000,00	70.206.985.982,00	119,01	114.029.344.163,00	41.912.532.080,00	36,76	121.993.827.413,00	7.964.483.250,00	6,98	291,07
Pelampauan penerimaan PAD	105.415.369.674,00	108.010.790.645,80	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sisa Penggunaan BTT				4.154.380.709,00	3.924.380.709,00	94,46	5.000.000.000,00	(845.619.291,00)	(20,35)	127,41
Sisa Dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Penerimaan kembali Pemberian kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	**12.887.540.083,00**	**12.734.430.274,00**	**0,00**	**10.390.869.200,00**	**10.390.869.200,00**	**100,00**	**11.200.000.000,00**	**809.130.800,00**	**7,79**	**107,79**
Penyertaan modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	100,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00	0,00
Pemberiana Pinjaman -Dana Bergulir kepada masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran kegiatan lanjutan tahun sebelumnya	12.887.540.083,00	12.734.430.274,00	0,00	8.890.869.200,00	8.890.869.200,00	0,00	**200.000.000,00**	8.690.869.200,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri :

1. Penerimaan Pembiayaan

   Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp121.993.827.413. Penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp121.993.827.413.

   Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada penghitungan dengan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2)a)(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

   Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *wajib* menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir *C.4.a.2)a)(3)* Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

   Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir *C.4.a.2)a)(4)* Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

   Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *dapat* mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir *C.4.a.2)a)(3)*(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2. Pengeluaran Pembiayaan

   Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11.000.000.000 yang berasal dari :

   a. Penyertaan modal daerah sebesar Rp1.500.000.000.
   b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sesbesar Rp9.500.000.000.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannya dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Kesesuaian Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plafon Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPJMD	RKPD 2024	PPAS 2024	APBD 2024
1	Jumlah Program	136	236	222	226
2	Jumlah Kegiatan	-	528	432	442
3	Jumlah Sub Kegiatan	-	1.383	961	991
	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	**1.037.192.310.000**	**1.016.236.880.004**	**1.073.710.115.025**	**1.077.921.554.728**

Jumlah program sebanyak 226, jumlah kegiatan sebanyak 442 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 991 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD TA. 2024 belum sesuai dengan jumlah program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***hanya diperkenankan*** *melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.*

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 namun tidak terdapat dalam RKPD dan/atau KUA dan PPAS, antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:
   a. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
   b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
   c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana pada kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
3. Dinas Sosial antara lain :
   a. Pemberian Layanan Kedaruratan
   b. Penyediaan Permakanan
   c. Penyediaan Alat Bantu
   d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

4. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :
   a. Pembentukan Paskibraka
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 ***belum*** berpedoman pada RKPD serta KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD/RPD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 Rp1.037.192.310.000 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp 1.077.921.554.728 ; dan

2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 sejumlah 136 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 222 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.
3. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegitan/subkegiatan antara lain:
   a. rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
   b. pemeliharaan anak-anak terlantar;
   c. pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan;
   d. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
   e. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan/subkegiatan antara lain:
   a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;
   b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota.
3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:

a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota;

b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota; dan

c. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

4. memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan

5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sesuai kebutuhan di APBD TA. 2024. *Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka* ***nomor register untuk penetapan Perda APBD 2024 tidak akan diberikan.*** Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada APBD 2023. Dokumen resmi tersebut berupa salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 antara Bupati Dharmasraya dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.

D. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP. Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.

E. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

F. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut maka Bupati Dharmasraya agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan peringatan HUT Satpol PP Ke-74 dan Satlinmas Ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat. *Untuk itu diminta Bupati Dharmasraya menyiapkan dan memastikan ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.*

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 188/ 3 / KPTSP-DPRD/2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah disampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Untuk di evaluasi;

b. bahwa Gubernur Sumatera Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-823-2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaral;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-823-2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Hasil pembahasan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dalam rangka membahas Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyempurnakan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Keputusan Pimpinan DPRD ini ditetapkan untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah;

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal 21 Desember 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,

KETUA,

PARIYANTO

WAKIL KETUA,

ADI GUNAWAN

WAKIL KETUA

ADE SUDARMAN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

BERITA ACARA

NOMOR: 415.4 / 19 /BUP-2023

NOMOR: 100.3.7/XII/19 /BA/DPRD-2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga,** kami yang bertandatangan dibawah ini:

I	SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E	:	Bupati Dharmasraya, Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang beralamat di Pulau Punjung, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
II. 1.	PARIYANTO, S.H	:	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya
2.	Ir. H. ADI GUNAWAN, M.M	:	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya
3.	ADE SUDARMAN, S.Pd	:	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
			point 1, 2, dan 3 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Selajutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

MENYATAKAN BAHWA :

1. **Pihak Pertama (I) dan Pihak kedua (II)** telah melakukan rapat Badan Anggaran DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas hasil Evaluasi Gubernur terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. **Pihak Pertama (I)** dan **Pihak Kedua (II)** telah menyepakati Jawaban hasil Evaluasi Gubernur tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap tiga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Punjung, 21 Desember 2023

BUPATI DHARMASRAYA,
Selaku
PIHAK PERTAMA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,
Selaku
PIHAK KEDUA

PARIYANTO, S.H
KETUA

Ir. H. ADI GUNAWAN, M.M
WAKIL KETUA

ADE SUDARMAN, S.Pd
WAKIL KETUA

LAMPIRAN I : **BERITA ACARA**

NOMOR : 415.4/ 19 /BUP-2023
100.3.7/XII/ 19 / BA/DPRD-2023

TANGGAL : 21 DESEMBER 2023

TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI DHARMASRAYA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.1.075.361.835.025,00 dengan rincian sebagai berikut:

4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**105.162.132.160,00**
4.1.01	Pajak Daerah	24.651.781.411
4.1.02	Retribuis Daerah	72.675.708.125
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.832.210.107
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.002.432.517
4.2	**PENDAPATAN TRASNFER**	**850.258.147.517,00**
4.2.01	Pendapatan Trasnfer Pemerintah Pusat	791.897.793.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.360.354.517
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.747.727.935,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.647.727.935,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**964.168.007.612,00**
5	BELANJA DAERAH	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**857.837.115.898,00**
4.1.01	Belanja Pegawai	522.011.068.081
4.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.857.863.937
4.1.05	Belanja Hibah	37.968.183.880
5.2	**BELANJA MODAL**	**100.642.775.927,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.118.832.407
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.828.906.743
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	44.726.618.952
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.852.417.825
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	116.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**111.881.943.200,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.750.957.200
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	109.130.986.000
	JUMLAH BELANJA	**1.075.361.835.025,00**
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) -	**111.193.827.413,00**

6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**121.993.827.413,00**
6.1.01	*Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumny*	121.993.827.413,00
	Jumlah Penerimaam Pembiayaan	**121.993.827.413,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**11.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	***11.000.000.000,00***
	Pembiayaan Netto	**110.993.827.413,00**
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN**	**0,00**

BUPATI DHARMASRAYA
Selaku
PIHAK PERTAMA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
Selaku
PIHAK KEDUA

PARIYANTO, SH
KETUA

Ir. H. ADI GUNAWAN, MM
WAKIL KETUA

ADE SUDARMAN, S.Pd
WAKIL KETUA

LAMPIRAN II : BERITA ACARA
NOMOR : 415.4/ 19 /BUP-2023
NOMOR : 100.3.7/XII/ 19 /BA/DPRD-2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023

TENTANG : KESEPAKATAN JAWABAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 903- 823 -2023 TANGGAL 18 DESEMBER 2023.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
I.	**TUJUAN EVALUASI**			
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan : A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; B. Kepentingan umum; C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sudah mempedomani : a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Kepentingan Umum; c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum PAPBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	Kedepan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD tetap mempedomani Ketentuan peraturan perundang- undangan.
II.	**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**			
		Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya dan DPRD pada tanggal 24	*Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Dharmasraya agar tetap konsisten dalam*

<table>
<tr><th>No</th><th>Urut</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati, meliputi:
A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :
Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Penetapan/Persetujuan/Surat</th><th rowspan="2">Ket.</th></tr>
<tr><th>Nomor</th><th>Tanggal</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Penetapan Perkada mengenai RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023</td><td>Nomor 11 Tahun 2023</td><td>3 Juli 2023</td><td>Sesuai, (paling lambat 1 satu minggu setelal RKPD Provinsi di tetapkan)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD</td><td>900/696/BKD-2023</td><td>5 Juli 2023</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA</td><td>415.4/8/BUP/2023 jo 100.3.7/VII/7/BA/DPRD-2023</td><td>18 Juli 2023</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS</td><td>415.4/9/BUP/2023 jo 100.3.7/VII/8/BA/DPRD-2023</td><td>18 Juli 2023</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD</td><td>900/879/BKD-2023</td><td>14 September 2023</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda APBD</td><td>415.4/18/BUP/2023 100.3.7/XI/18/BA/DPRD-2023</td><td>24 November 2023</td><td>Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainy tahun anggaran berkenaan)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi Gubernur</td><td>900/1236/BKD-2023</td><td>29 November 2023</td><td>Sesuai, (disampaikan 3 (tig hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)</td></tr>
</table>
</td><td>November 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 29 November 2023, sudah sesuai dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut sudah disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 pada tanggal 3 Juli 2023, Sudah sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah</td><td>memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD, penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya dan DPRD pada tanggal 24 November 2023 dan telah disampaikan kepada</td><td></td><td></td></tr>
</table>

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Gubernur pada tanggal 29 November 2023, ***sudah sesuai*** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2023, ***Sudah sesuai*** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang	Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 5 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Dharmasraya dengan DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada tanggal 5 Juli 2023, ***sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 14 September 2023, ***sudah sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 5 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Dharmasraya dengan DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada tanggal 5 Juli 2023, ***sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 14 September 2023, ***sudah sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.	minggu. Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya dengan Bupati Dharmasraya pada tanggal 24 November 2023, ***sudah sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya dengan Bupati Dharmasraya pada tanggal 24 November 2023, ***sudah sesuai*** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. *Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Dharmasraya agar tetap konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD, penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.		
		B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait alokasi target pendapatan daerah sudah berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun prognosis target pendapatan sudah memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp911.076.883.278 atau 99.19% dari total pendapatan	Kedepan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD terkait alokasi target pendapatan daerah tetap berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan: 1. Kebijakan Pendapatan Daerah a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun prognosis target pendapatan harus memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp911.076.883.278 atau 99.19% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 pada sampai dengan 24 November 2023 sebesar Rp693.024.891.470,47 atau 73,58% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023.	daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 pada sampai dengan 24 November 2023 sebesar Rp693.024.891.470,47 atau 73,58% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023	setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
		b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua	Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a s/d C.1.l Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a s/d C.1.l Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
		c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.	Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
		1. Kebijakan Belanja Daerah a. Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan **kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah** dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp829.320.612.705,35 atau 94,45% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sampai 24 November sebesar Rp698.041.096.508 atau 71,06% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait alokasi belanja daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan **kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah** dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp829.320.612.705,35 atau 94,45% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sampai 24 November sebesar Rp698.041.096.508 atau 71,06% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten	Kedepan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD terkali Belanja Daerah yang disusun tetap berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023	undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
		b. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun program pembangunan daerah sudah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	
		c. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Belanja daerah sudah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	
		d. belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi: 1) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain: a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat. b) peningkatan pendapatan masyarakat. c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. 2) penurunan stunting antara lain: a) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita. b) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting. c) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan	Belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi 1) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain: a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat. b. peningkatan pendapatan masyarakat. c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. 2) penurunan stunting antara lain: a. kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita. b. kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting. c. kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		pemberdayaan kelembagaan; dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita. 3) pengendalian inflasi antara lain: a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis. b) pengendalian laju alih fungsi lahan. c) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran. d) penguatan tata kelola logistik daerah. e) pengawasan harga dan operasi pasar. 4) peningkatan investasi antara lain: a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem Online Single Submission (OSS). b) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia. 5) penguatan kualitas sumber daya manusia; 6) pembangunan infrastruktur; dan 7) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).	dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita. 3) pengendalian inflasi antara lain: a. peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis. b. pengendalian laju alih fungsi lahan. c. pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran. d. penguatan tata kelola logistik daerah. e. pengawasan harga dan operasi pasar. 4) peningkatan investasi antara lain: a. kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem Online Single Submission (OSS). b. mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia. 5) penguatan kualitas sumber daya manusia; 6) pembangunan infrastruktur; dan 7) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA	
		e. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sudah konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab	
		dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.	memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.	
		Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023		
		2. Kebijakan Pembiayaan Daerah a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menetapkan Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3)
		b. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		c. pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk	Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.	anggaran.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
III	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM**			
		A. Kebijakan Pendapatan Daerah Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp964.168.007.612 mengalami penambahan sebesar Rp47.319.213.222 atau 5,16% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp916.848.794.390 . Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp105.162.132.160. 2. Pendapatan Transfer sebesar Rp850.258.147.517. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.747.727.935 . Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam penganggaran target Pendapatan Daerah sudah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga sudah melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan guna untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp964.168.007.612 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam penganggaran target Pendapatan Daerah tetap memperkirakan pendapatan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<table>
<tr><th>No</th><th>Urut</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Anggaran 2024 sebesar Rp964.168.007.612 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2
Pendapatan Daerah
<table><tr><th>URAIAN</th><th>JUMLAH (Rp)</th></tr><tr><td>Pendapatan Asli Daerah</td><td>105.162.132.160</td></tr><tr><td>Pajak Daerah</td><td>24.651.781.411</td></tr><tr><td>Retribusi Daerah</td><td>2.857.790.000</td></tr><tr><td>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</td><td>4.832.210.107</td></tr><tr><td>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</td><td>72.820.350.642</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer</td><td>850.258.147.517</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</td><td>791.897.793.000</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Antar Daerah</td><td>58.360.354.517</td></tr><tr><td>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</td><td>8.747.727.935</td></tr><tr><td>Pendapatan Hibah</td><td>100.000.000</td></tr><tr><td>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</td><td>8.647.727.935</td></tr><tr><td>Jumlah Pendapatan</td><td>964.168.007.612</td></tr></table></td><td>Tabel 2
Pendapatan Daerah
<table><tr><th>URAIAN</th><th>JUMLAH (Rp)</th></tr><tr><td>PENDAPATAN DAERAH</td><td></td></tr><tr><td>Pendapatan Asli Daerah</td><td>105.162.132.160</td></tr><tr><td>Pajak Daerah</td><td>24.651.781.411</td></tr><tr><td>Retribusi Daerah</td><td>2.857.790.000</td></tr><tr><td>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</td><td>4.832.210.107</td></tr><tr><td>Lain-lain PAD yang Sah</td><td>72.820.350.642</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer</td><td>850.258.147.517</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</td><td>791.897.793.000</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Antar Daerah</td><td>58.360.354.517</td></tr><tr><td>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</td><td>8.747.727.935</td></tr><tr><td>Pendapatan Hibah</td><td>100.000.000</td></tr><tr><td>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</td><td>8.647.727.935</td></tr><tr><td>Jumlah Pendapatan</td><td>964.168.007.612</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 105.162.132.160 .
Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
a. Pajak Daerah
Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam</td><td>Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD sebesar Rp 105.162.132.160 yang terdiri dari :
a. Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah Rp24.651.781.411
b. Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp72.675.708.125</td><td>Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD sebesar Rp 105.162.132.160 yang terdiri dari:</td></tr>
</table>

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.651.781.411 .

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Persandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2023 dan 2024

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target APBD Tahun Anggaran 2024	Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target APBD TA 2024
	Target	Realisasi Per Oktober 2023		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2
PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.842.119.674	95.551.528.133	94,75	105.162.132.160	4.320.012.486
Pajak Daerah	22.776.715.953	19.175.371.357	84,19	24.651.781.411	1.875.065.458
Pajak Hotel	180.000.000	221.188.500	122,88	250.000.000	70.000.000
Pajak Restoran	1.425.000.000	1.065.370.880	74,76	1.300.000.000	- 125.000.000
Pajak Hiburan	6.500.000	1.575.000	24,23	7.000.000	500.000
Pajak Reklame	235.000.000	206.538.954	87,89	260.000.000	25.000.000
Pajak Penerangan Jalan	12.970.000.000	11.556.699.519	89,10	13.725.000.000	755.000.000
Pajak Parkir	6.000.000	5.919.300	98,66	12.000.000	6.000.000
Pajak Air Tanah	15.000.000	22.617.818	150,79	30.000.000	15.000.000
Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	4.750.000	47,50	10.000.000	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	425.000.000	358.355.177	84,32	500.000.000	75.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.504.215.953	2.691.666.576	59,76	4.557.781.411	53.565.458
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000	3.040.689.633	101,36	4.000.000.000	1.000.000.000
Retribusi Daerah	3.623.788.885	1.577.607.800	43,53	2.857.790.000	- 765.998.885
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000	132.268.400	66,13	300.000.000	100.000.000
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	0,00	2.000.000	2.000.000
Retribusi Pelayanan Pasar	-	720.000	0,00	72.000.000	72.000.000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	322.500.000	187.757.000	58,22	-	- 322.500.000
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000	17.700.000	59,00	30.000.000	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000	36.270.500	72,54	-	- 50.000.000
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	87.725.000	17,55	-	- 500.000.000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.384.558.400	429.070.600	30,99	1.275.290.000	- 109.268.400
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	30.000.000	-	0,00	32.500.000	2.500.000
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	3.500.000	3.320.000	94,86	3.500.000	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	0,00	2.500.000	2.500.000
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	825.000.000	319.740.800	38,76	790.000.000	- 35.000.000
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	278.230.485	363.035.500	0,00	300.000.000	21.769.515
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	0,00	50.000.000	50.000.000

c. Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp4.832.210.107

d. Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp3.002.432.517

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Persandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2023 dan 2024

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target APBD Tahun Anggaran 2024	Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target APBD TA. 2024
	Target	Realisasi Per Oktober 2023		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**100.842.119.674**	**95.551.528.133**	**94,75**	**105.162.132.160**	**4.320.012.486**
Pajak Daerah	**22.776.715.953**	**19.175.371.357**	**84,19**	**24.651.781.411**	**1.875.065.458**
Pajak Hotel	180.000.000	221.188.500	122,88	250.000.000	70.000.000
Pajak Restoran	1.425.000.000	1.065.370.880	74,76	1.300.000.000	- 125.000.000
Pajak Hiburan	6.500.000	1.575.000	24,23	7.000.000	500.000
Pajak Reklame	235.000.000	206.538.954	87,89	260.000.000	25.000.000
Pajak Penerangan Jalan	12.970.000.000	11.556.699.519	89,10	13.725.000.000	755.000.000
Pajak Parkir	6.000.000	5.919.300	98,66	12.000.000	6.000.000
Pajak Air Tanah	15.000.000	22.617.818	150,79	30.000.000	15.000.000
Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	4.750.000	47,50	10.000.000	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	425.000.000	358.355.177	84,32	500.000.000	75.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.504.215.953	2.691.666.576	59,76	4.557.781.411	53.565.458
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000	3.040.689.633	101,36	4.000.000.000	1.000.000.000
Retribusi Daerah	**3.623.788.885**	**1.577.607.800**	**43,53**	**72.675.708.125**	**69.051.919.240**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-		69.817.918.125	69.817.918.125
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000	132.268.400	66,13	300.000.000	100.000.000
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	0,00	2.000.000	2.000.000
Retribusi Pelayanan Pasar	-	720.000	0,00	72.000.000	72.000.000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	322.500.000	187.757.000	58,22	-	- 322.500.000
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000	17.700.000	59,00	30.000.000	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000	36.270.500	72,54	-	- 50.000.000
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	87.725.000	17,55	-	- 500.000.000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.384.558.400	429.070.600	30,99	1.275.290.000	- 109.268.400
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	30.000.000	-	0,00	32.500.000	2.500.000
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	3.500.000	3.320.000	94,86	3.500.000	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	0,00	2.500.000	2.500.000
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	825.000.000	319.740.800	38,76	790.000.000	- 35.000.000
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	278.230.485	363.035.500	0,00	300.000.000	21.769.515
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	0,00	50.000.000	50.000.000

a. Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah Rp24.651.781.411

b. Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp72.675.708.125

c. Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp4.832.210.107

d. Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp3.002.432.517

Khusus untuk Pengangaran target pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terkoreksi yaitu untuk pendapatan Retribusi Daerah terjadi kenaikan semula sebesar Rp.2.857.790.000 menjadi Rp72.675.708.125 atau naik sebesar

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) Target	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) Realisasi Per Oktober 2023	%	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target APBD TA. 2024 (Rp)
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**4.324.065.836**	**4.832.210.107**	**111,75**	**4.832.210.107**	**508.144.271**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.324.065.836	4.832.210.107	111,75	4.832.210.107	508.144.271
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**70.117.549.000**	**69.966.338.869**	**99,78**	**72.820.350.642**	**2.702.801.642**
Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.592.500.000	20.280.000	1,27	300.000.000	- 1.292.500.000
Hasil Sewa BMD	10.000.000	-	0,00	-	- 10.000.000
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	170.000.000	108.664.000	63,92	-	- 170.000.000
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000	497.114.655	45,19	500.000.000	- 600.000.000
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	120.000.000	92.147.341	76,79	120.000.000	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000	-	0,00	300.000.000	200.000.000
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.800.000.000	1.357.085.601	48,47	-	- 2.800.000.000
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.740.000.000	576.050.412	33,11	1.500.000.000	- 240.000.000
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	160.000.000	171.734.072	107,33	50.000.000	- 110.000.000
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	120.980	0,00	50.000	50.000
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	1.165.283	0,00	1.000.000	1.000.000
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	74.250	0,00	50.000	50.000
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	166.499	0,00	100.000	100.000
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	-	0,00	50.000	50.000
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	83.055	0,00	100.000	100.000
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	23.168.537	0,00	10.000.000	10.000.000
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	833.000	0,00	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-		0,00	100.000	100.000
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000	-	0,00	-	- 50.000.000
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	4.460.788.959	0,00	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000	15.457.109	15,46	100.000.000	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	220.000.000	544.111.481	247,32	200.000.000	- 20.000.000
Pendapatan BLUD	54.801.063.000	55.631.734.655	101,52	69.738.900.642	14.937.837.642
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.153.986.000	6.465.558.980	90,38	-	- 7.153.986.000

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) Target	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) Realisasi Per Oktober 2023	%	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target APBD TA. 2024 (Rp)
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**4.324.065.836**	**4.832.210.107**	**111,75**	**4.832.210.107**	**508.144.271**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.324.065.836	4.832.210.107	111,75	4.832.210.107	508.144.271
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**70.117.549.000**	**69.966.338.869**	**99,78**	**3.002.432.517**	**- 67.115.116.483**
Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.592.500.000	20.280.000	1,27	300.000.000	- 1.292.500.000
Hasil Sewa BMD	10.000.000	-	0,00	-	- 10.000.000
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	170.000.000	108.664.000	63,92	-	- 170.000.000
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000	497.114.655	45,19	500.000.000	- 600.000.000
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	120.000.000	92.147.341	76,79	120.000.000	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000	-	0,00	300.000.000	200.000.000
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.800.000.000	1.357.085.601	48,47	-	- 2.800.000.000
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.740.000.000	576.050.412	33,11	1.420.982.517	- 319.017.483
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	160.000.000	171.734.072	107,33	50.000.000	- 110.000.000
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	120.980	0,00	50.000	50.000
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	1.165.283	0,00	1.000.000	1.000.000
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	74.250	0,00	50.000	50.000
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	166.499	0,00	100.000	100.000
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	-	0,00	50.000	50.000
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	83.055	0,00	100.000	100.000
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	23.168.537	0,00	10.000.000	10.000.000
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	833.000	0,00	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-		0,00	100.000	100.000
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000	-	0,00	-	- 50.000.000
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	4.460.788.959	0,00	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000	15.457.109	15,46	100.000.000	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	220.000.000	544.111.481	247,32	200.000.000	- 20.000.000
Pendapatan BLUD	54.801.063.000	55.631.734.655	101,52	-	- 54.801.063.000
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.153.986.000	6.465.558.980	90,38	-	- 7.153.986.000

Rp69.817.918.125 dan untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berkurang semula sebesar Rp.72.820.350.642 menjadi Rp3.002.432.517 atau berkurang sebesar Rp69.817.918.125

Koreksi ini terdapat pada pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan yang semula diletakkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada objek pendapatan BLUD dari jasa layanan dan dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum pada objek Pelayanan Kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan BLUD

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain : 1) Pajak Restoran sebesar Rp1.300.000.000. 2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp13.725.000.000. 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp4.557.781.411. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp4.000.000.000. b. Retribusi Daerah Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.857.790.000 . Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain : 1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp404.000.000 dengan rincian antara lain : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp0. b) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp2.000.000. c) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp72.000.000. d) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp300.000.000.		
		Terhadap pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan yang semula diletakkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada objek pendapatan BLUD dari jasa layanan, agar dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum pada objek Pelayanan Kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan BLUD		
		1. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.103.790.000 dengan rincian antara lain :	Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Dharmasraya	Untuk Kabupaten Dharmasraya terkait

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.275.290.000. b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp2.500.000. 2. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp350.000.000 dengan rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan: (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan butir C.2.a.1)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah terkait pajak kendaraan	Tahun Anggaran 2024 sudah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan butir C.2.a.1)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Peraturan Daerah tentang PDRD yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kondisi sekarang sudah tahap evaluasi di Biro Hukum Ktr Gubernur dan insya Allah menjelang tahun 2024 Peraturan Daerah tentang PDRD sudah ditetapakn menjadi Peraturan Daerah dan penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk pemungutannya sudah dapat dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2024.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.		
		Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut: (1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017; (2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan (3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.	Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut: 1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017; 2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan 3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan	
		Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 harus mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selain itu,	Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 tetap mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan: (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;	Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan: 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;	
		(3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain: (i). kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi; (ii). kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak; (iii). untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; (iv). untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau (v). untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang. sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.	Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain: 1) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi; 2) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak; 3) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 4) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau 5) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang. sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Berdasarkan realisasi pendapatan per 24 November 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp693.024.891.470,47 atau 73,58% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp941.855.386.005, yang diuraikan antara lain : 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp20.805.605.052 atau 87,23% dari alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.850.981.411. 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.703.396.987 atau 49,28% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.456.738.885. *Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu menghitung kembali target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potensi nyata yang dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Dharmasraya merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.*	*Berdasarkan realisasi pendapatan per 24 November 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp693.024.891.470,47 atau 73,58%* dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp941.855.386.005, yang diuraikan antara lain: 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp20.805.605.052 atau 87,23% dari alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.850.981.411. 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.703.396.987 atau 49,28% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.456.738.885. *Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap perlu menghitung kembali target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potensi nyata yang dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Dharmasraya merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai*	
		b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.832.210.107. Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam sebesar Rp4.832.210.107 atas penerimaan deviden dari penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp28.952.000.000,00 yang terinci pada : 1) PT. Bank Nagari sebesar Rp27.352.000.000,00 2) PT. Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp1.500.000.000,00	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, maka penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sampai dengan Tahun Anggaran 2023 serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi : 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah. 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu. 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan. 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan. 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi	3) PT. BPR Pulau Punjung seebsar Rp100.000.000,- Penyertaan Modal Daerah ini didasari Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah dan juga sudah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.	menunjukkan kinerja yang memadai *(Performance Based)*, atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai *(Performance Based)*, atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.		perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
		c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.820.350.642 , harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terkoreksi yaitu berkurang semula sebesar Rp.72.820.350.642 menjadi Rp3.002.432.517. Koreksi ini terdapat pada pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan yang semula diletakkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada objek pendapatan BLUD dari jasa layanan dan dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum pada objek Pelayanan	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tetap mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		berikut : 8) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp300.000.000. 9) Jasa Giro sebesar Rp620.000.000. 10) Pendapatan Bunga sebesar Rp0. 11) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp300.000.000. 12) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp0. Sebagaimana disampaikan sebelumnya terkait pendapatan retribusi, pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan agar dipindahkan penganggarannya ke retribusi pelayanan kesehatan	Kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan BLUD	C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
		2. Pendapatan Transfer Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp850.258.147.517 atau 80,18% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada jenis pendapatan : a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp791.897.793.000 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut : 1) Dana Perimbangan sebesar Rp722.999.714.000 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan : a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30.023.665.000. b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp519.999.606.000. c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp850.258.147.517 sudah ***mempedomani*** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan dan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sbb: 1. Dana Perimbangan sebesar Rp722.999.714.000 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan : b. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30.023.665.000. c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp519.999.606.000. d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp36.038.894.000.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Tahun 2024 sudah ***mempedomani*** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b. Lampiran

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Fisik sebesar Rp36.038.894.000. d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp136.937.549.000. 2) Dana Desa sebesar Rp53.731.011.000. 3) Insentif Fiskal sebesar Rp15.167.068.000. Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024:	e. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp136.937.549.000. 2. Dana Desa sebesar Rp53.731.011.000. 3. Insentif Fiskal sebesar Rp15.167.068.000 Selanjutnya terhadap DAU yang ditentukan penggunaannya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah mempedomani PMK Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

TABEL 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih
	APBD 2024	Portal Resmi Kemenkeu/Simtrada (Perpres No. 76 Tahun 2023)	
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN TRANSFER			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**791.897.793.000,00**	**791.897.793.000,00**	-
Dana Perimbangan	**722.999.714.000,00**	722.999.714.000,00	-
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**30.023.685.000,00**	**30.023.685.000,00**	-
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.936.695.000,00	7.936.695.000,00	-
DBH PPh Pasal 21	3.941.024.000,00	3.796.652.000,00	**144.372.000,00**
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	144.372.000,00	- **144.372.000,00**
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	42.632.000,00	42.632.000,00	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	7.270.000,00	7.270.000,00	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	775.542.000,00	775.542.000,00	-
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara_x005f Royalty	6.192.233.000,00	6.192.233.000,00	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	10.031.114.000,00	329.574.000,00	**9.701.540.000,00**
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	-
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	-	9.701.540.000,00	- **9.701.540.000,00**
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	**519.999.806.000,00**	**519.999.806.000,00**	-
DAU	422.691.705.000,00	422.691.705.000,00	-
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	20.734.362.000,00	20.734.362.000,00	-
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	33.343.800.000,00	33.343.800.000,00	-
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	16.365.536.000,00	16.365.536.000,00	-
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	26.864.203.000,00	26.864.203.000,00	-

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih
		APBD 2024	Portal Resmi Kemenkeu/Simtrada (Perpres No. 76 Tahun 2023)	
4.2.01.01.03	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**36.038.894.000,00**	**36.038.894.000,00**	-
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	656.592.000,00	656.592.000,00	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.416.151.000,00	10.416.151.000,00	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.742.380.000,00	4.742.380.000,00	-
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	486.379.000,00	486.379.000,00	-
4.2.01.01.03.00017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	91.794.000,00	91.794.000,00	-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	6.184.874.000,00	6.184.874.000,00	-
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	13.460.724.000,00	13.460.724.000,00	-
4.2.01.01.04	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**136.937.548.000,00**	**136.937.548.000,00**	-
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	33.551.300.000,00	33.551.300.000,00	-
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.237.500.000,00	1.237.500.000,00	-
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	61.966.377.000,00	61.966.377.000,00	-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.119.500.000,00	2.119.500.000,00	-
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.100.689.000,00	3.100.689.000,00	-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.281.600.000,00	4.281.600.000,00	-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	903.700.000,00	903.700.000,00	-
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan	11.534.395.000,00	11.534.395.000,00	-
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	372.331.000,00	372.331.000,00	-
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	12.700.115.000,00	12.700.115.000,00	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.069.970.000,00	4.069.970.000,00	-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	580.092.000,00	580.092.000,00	-
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	520.000.000,00	-
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal**	**15.167.068.000,00**	**15.167.068.000,00**	-
4.2.01.05	**Dana Desa**	**53.731.011.000,00**	**53.731.011.000,00**	-

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 , sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.		
		b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp58.360.354.517 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp58.360.354.517 atas Keputusan Gubernur Nomor 903-105-2023 tgl.21 Februari 2023 tentang Perkiraaan Dana Bagis Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten /Kota se Sumatera Barat Tahun Aanggaran 2023 yang digunakan untuk penganggaran Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dengan rincian sbb : 1. PKB sebesar Rp12.889.646.486,- 2. BBNKB Rp6.358.112.387,- 3. PBBKB Rp23.423.730.083,- 4. PAP sebesar Rp170.031.570,- 5. Pajak Rokok sebesar Rp15.338.833.991,- Penanggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah tetap mempedomani sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
			Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp100.000.000,00 yang bersumber dari	Kedepan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri berupa Hibah dari Badan/ lembaga/ organisasi sebesar Rp100.000.000,- Penggaran ini sudah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan butir G.27 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 15 Tahun 2023,	penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan butir butir G.27 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 15 Tahun 2023,
		C. Kebijakan Belanja Daerah Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.075.161.835.025 . Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan ***setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan*** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tersedia alokasi belanja daerah sebesar Rp1.075.361.835.025,- terdapat koreksi masing-masing jumlah objek belanja daerah bila dibandingkan dengan Ranperda APBD Tahun 2024 yang diantar saat evaluasi Gubernur. Perubahan terjadi pada pada jumlah Belanja Pegawai pada saat evaluasi sebesar Rp534.592.198.823,- dan setelah evaluasi menjadi sebesar Rp522.011.068.081,- atau berkurang sebesar (Rp12.566.130.742),- yang digunakan untuk : 1. Tambahan belanja BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan gratis UHC 98,32% Tahun 2024 untuk masyarakat Dharmasraya sebesar Rp6.891.746.400,- 2. Mencukupi kekurangan alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat atau Mandatori Pengawasan untuk APIP untuk sebesar Rp2.770.000.000,- dan beberapa tamahan belanja kegiatan lainnya yang mendukung program dan kegiatan OPD. Perubahan beberapa objek belanja ini sudah disetujui dalam rapat pembahasan bersama antara Bupati dalam hal ini TAPD dengan Banggar DPRD yang ditandai	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penetapan alokasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan *dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan* sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

<table>
<tr><th>No</th><th>Urut</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.</td><td>sudah ditanda tanganinya Berita Acara Nomor 415.4/ /BUP-2023 jo Nomor 100.3.7/XII/ /BA/DPRD-2023 tentang Persetujuan Antara Bupati Dharmasraya dan DPRD Kabupaten Dharmasraya atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.075.161.835.025 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah
<table><tr><th>URAIAN</th><th>JUMLAH (Rp)</th></tr><tr><td>BELANJA DAERAH</td><td></td></tr><tr><td>Belanja Operasi</td><td>860.925.106.408</td></tr><tr><td>Belanja Pegawai</td><td>534.592.198.823</td></tr><tr><td>Belanja Barang dan Jasa</td><td>288.577.223.705</td></tr><tr><td>Belanja Subsidi</td><td>-</td></tr><tr><td>Belanja Bunga</td><td>-</td></tr><tr><td>Belanja Hibah</td><td>37.755.683.880</td></tr><tr><td>Belanja Bantuan Sosial</td><td>-</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>97.354.785.417</td></tr><tr><td>Belanja Modal Tanah</td><td>-</td></tr><tr><td>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</td><td>21.811.132.407</td></tr><tr><td>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</td><td>26.928.956.233</td></tr><tr><td>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</td><td>45.511.278.952</td></tr><tr><td>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</td><td>2.987.417.825</td></tr><tr><td>Belanja Modal Aset Lainnya</td><td>116.000.000</td></tr><tr><td>Belanja Tidak Terduga</td><td>5.000.000.000</td></tr><tr><td>Belanja Tidak Terduga</td><td>5.000.000.000</td></tr><tr><td>Belanja Transfer</td><td>111.881.943.200</td></tr><tr><td>Belanja Bagi Hasil</td><td>2.750.957.200</td></tr><tr><td>Belanja Bantuan Keuangan</td><td>109.130.986.000</td></tr><tr><td>Jumlah Belanja</td><td>1.075.161.835.025</td></tr></table></td><td>Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.075.161.835.025 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
BELANJA DAERAH
<table><tr><th>URAIAN</th><th>JUMLAH (Rp)</th></tr><tr><td>BELANJA DAERAH</td><td></td></tr><tr><td>BELANJA OPERASI</td><td>857.837.115.898</td></tr><tr><td>Belanja Pegawai</td><td>522.011.068.081</td></tr><tr><td>Belanja Barang dan Jasa</td><td>297.857.863.937</td></tr><tr><td>Belanja Hibah</td><td>37.968.183.880</td></tr><tr><td>BELANJA MODAL</td><td>100.642.775.927</td></tr><tr><td>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</td><td>21.118.832.407</td></tr><tr><td>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</td><td>31.828.906.743</td></tr><tr><td>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</td><td>44.726.618.952</td></tr><tr><td>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</td><td>2.852.417.825</td></tr><tr><td>Belanja Modal Aset Lainnya</td><td>116.000.000</td></tr><tr><td>BELANJA TIDAK TERDUGA</td><td>5.000.000.000</td></tr><tr><td>Belanja Tidak Terduga</td><td>5.000.000.000</td></tr><tr><td>BELANJA TRANSFER</td><td>111.881.943.200</td></tr><tr><td>Belanja Bagi Hasil</td><td>2.750.957.200</td></tr><tr><td>Belanja Bantuan Keuangan</td><td>109.130.986.000</td></tr><tr><td>Jumlah Belanja</td><td>1.075.361.835.025</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut : a. SPM Bidang Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp14.273.917.733 atau 21,30% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp67.010.282.400. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp 8.759.954.440, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian : a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar. c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar. e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar. f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar. 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi sebesar Rp4.531.762.993 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta	Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, penyediaan alokasi belanja untuk pemenuhan SPM bidang Pendidikan terkoreksi sehigga menjadi sebesar Rp14.294.522.483,- atau 21,33% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp67.010.282.400 yang sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diuraikam dalam kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar sudah **ditingkatkan** alokasi anggarannya sehingga anggaran menjadi sebesar Rp.8.764.274.440,0 yang diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian : a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar. c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar. e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar. 2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi sebesar Rp4.531.762.993 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian : a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen dalam Penyediaan alokasi belanja untuk pemenuhan SPM bidang Pendidikan Harus memprioritaskan dan meningkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari: 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian : a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama. c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama. d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama. e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama. f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.	kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama. c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama. d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama. e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama. f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
		2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sebesar Rp982.200.300 , **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian : a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD. c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD. d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.	3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sebesar Rp982.200.300 , **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian : a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD. c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD. d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp0 **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian : a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C). c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C). d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C). e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C). f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).	4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan telah disatukan penganggaran pada sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) guna untuk menjamin menjamin pemenuhan dan pencapaian : a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C). c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C). d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C). e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C). f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C)	
		Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni: 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Selain itu Pemerintah Kabupaten Dhamasraya juga memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk mencukupi pada Sub Kegiatan penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp20.229.500, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp293.311.500 , **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin: a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan. b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.	Minimal Pendidikan, yakni: 1. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp20.229.500 sudah mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp293.311.500 sudah mencukupi untuk menjamin: a. Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan. b. Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. c. Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. d. Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah	
		2) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp17.136.500, **agar ditingkatkan** alokasi		

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp107.075.300, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin: a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan. b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan. 4) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp28.127.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi	SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan 3. Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp17.136.500, sudah mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp107.069.300, sudah mencukupi untuk menjamin: a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan. b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan. 5. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp28.127.000, sudah mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		5) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin: a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan. b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat	4) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD telah disatukan penganggaran pada sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) guna untuk menjamin: a. Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan. b. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. c. Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1). 6) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp0 **atau belum dianggarkan,agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp0 **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin : a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan. b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan. c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan. d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan. Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:	tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. d. Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) 6. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan telah disatukan penganggaran pada sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD guna untuk untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan telah disatukan penganggaran pada sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD guna untuk untuk menjamin : a. Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan. b. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan. c. Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan. Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		4) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. 5) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. 6) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.	4) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan sebesar Rp178.249.000 sudah mencukupi untuk menjamin: a. Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan. b. Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. c. Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan. d. Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1). Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari: 5) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. 6) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. 7) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.	
		a. SPM Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp1.935.087.690 atau 1,65% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp117.377.884.208 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut : 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp216.733.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat. c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai : (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, penyediaan alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp1.935.087.690 atau 1,65% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp117.377.884.208 yang digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut : 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp216.733.000 digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat. c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan terus insten dalam peningkatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		periode kehamilan (K4) (2) Standar kualias yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).	yang sesuai : (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) (2) Standar kualias yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).	KesehatanSesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Guna untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:
		2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp187.520.800, **agar ditingkatkan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk: : a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat. c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp312.183.850 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat. c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi : (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal	2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp187.520.800 digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk: : a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat. c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp312.183.850 digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau	1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan. 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan. 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan. 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan. 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi sebesar Rp245.416.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi : (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).	bidan atau perawat. c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi : (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi sebesar Rp245.416.000 digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi : (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan	mendapatkan layanan kesehatan. 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan. 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan. 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan. 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
		5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp50.000.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia		

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		sekolah dan remaja di luar sekolah. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi : (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan. 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp78.001.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM). b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan. c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia	edukasi dan informasi (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp50.000.000 digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi: (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan	Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		produktif sesuai standar meliputi : (4) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. (5) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko. (6) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.	kesehatan. 6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp78.001.000 digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM). b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan. c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko. (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan	
		7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp33.401.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM). b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa	7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp33.401.000 digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		perilaku berisiko. d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan. 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp228.197.140, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat. c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: (4) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan. (5) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat (6) Melakukan rujukan jika diperlukan	a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM). b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko. d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.	
		9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp135.125.000, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan	8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp228.197.140, digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		masyarakat. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi : (4) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan (5) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi (6) Melakukan rujukan jika diperlukan. 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp50.000.000, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE. b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi: (6) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara. (7) Edukasi. (8) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. (9) Edukasi kepatuhan minum obat. (10) Melakukan rujukan jika diperlukan. 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	kesehatan masyarakat. c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan. (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat (3) Melakukan rujukan jika diperlukan 9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp135.125.000, digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi : (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi (3) Melakukan rujukan jika diperlukan. 10. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Terduga Tuberkulosis sebesar Rp348.509.900 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan. c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : (5) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda. (6) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis. (7) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. (8) Melakukan rujukan jika diperlukan. 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp50.000.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT)	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp50.000.000, digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE. b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi: (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara. (2) Edukasi. (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. (4) Edukasi kepatuhan minum obat. (5) Melakukan rujukan jika diperlukan. 11. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp348.509.900 digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering,	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi (4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan (5) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun (6) Melakukan rujukan jika diperlukan Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari: 13) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan. 14) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan. 15) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan. 16) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan. 17) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan. 18) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan. 19) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.	catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan. c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi: (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda. (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis. (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. (4) Melakukan rujukan jika diperlukan. 12. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp50.000.000, digunkaan untuk alokasii anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk : a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK. b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan,	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		20) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan. 21) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan 22) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 23) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 24) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.	ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan. c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun (3) Melakukan rujukan jika diperlukan .	
		b. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar Rp1.176.531.604 atau 1,43% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp82.496.903.725. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukkannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp682.806.600 **agar ditingkatkan** alokasi	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, penyediaan alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar Rp1.176.531.604 atau 1,43% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp82.496.903.725. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukkannya sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap berkomitmen Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum peruntukkannya sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp493.725.004 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air. Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari : 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp682.806.600 digunkaan untuk alokasii anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp493.725.004 digunkaan untuk alokasii anggaran dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.	Rakyat guna untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari : 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.
		c. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp58.307.750 atau 0,53% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp11.092.269.596 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **harus ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, penyediaan alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp58.307.750 atau 0,53% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp11.092.269.596 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman digunakaan untuk alokasii anggaran untuk mencukupi	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan inten dalam meningkatkan alokasi belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima diuraikan dalam kegiatan sebagaimana

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni : 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi. 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan. 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp53.117.250, **harus**	belanja SPM diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni : 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota telah disatukan penganggaran pada sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan pada Belanja Tidak Teduga guna untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi. 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota disatukan penganggaran pada sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan pada Belanja Tidak Teduga guna untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan. 2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar	diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat guna untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari : 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya : a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah. b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah. c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU. 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan, harus disediakan** alokasi anggaran yang memadai untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari : 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	Rp53.117.250, digunkaan untuk alokasii anggaran yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya : a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah. b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah. c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.4 4. Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota telah disatukan penganggaran pada sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan pada Belanja Tidak Teduga guna untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.		
		d. SPM Trantibumlinmas 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana sebesar Rp341.635.000 atau 25,51% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.339.070.300. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaknii : a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggaran yang memadai dan mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp185.827.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta peruntukkannya diprioritaskan untuk melakukan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana sebesar Rp341.635.000 atau 25,51% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.339.070.300. Alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaknii : a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota telah disatukan penganggaran pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan pada Belanja Tidak Teduga guna untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). a) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp185.827.000 digunkaan untuk alokasii anggaran untuk	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kedepannya akan lebih inten dalam Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas serta menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota guna untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp155.808.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah sebesar Rp202.463.000 atau 4,13% dari total belanja Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp4.896.401.314. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni : a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp162.468.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan	melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. b) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp155.808.000, digunkaan untuk alokasii anggaran untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah sebesar Rp202.463.000 atau 4,13% dari total belanja Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp4.896.401.314. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan serta alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni : a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp162.468.000, digunkaan untuk alokasii anggaran untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan	untukKabupaten/kota yaitu: 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada. 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi. b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebesar Rp39.995.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran. 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp30.000.000 atau 0,61% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp4.896.401.314. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni : a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **harus disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum,	pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi. b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebesar Rp39.995.000, digunkaan untuk alokasii anggaran untuk layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia telah disatukan penganggaran pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan pada Belanja Tidak Teduga guna untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp30.000.000 atau 0,61% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp4.896.401.314. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni : a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota telah disatukan penganggaran pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan pada Belanja Tidak Teduga guna untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan**, **harus disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS. Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untukKabupaten/kota yaitu: 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada. 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri	dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota telah disatukan penganggaran pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan pada Belanja Tidak Teduga guna untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.		
		e. SPM Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp399.312.285 atau 7,63% dari total belanja SKPD Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp5.231.962.114. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni : 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp76.380.500, dialokasikan anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa : a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp399.312.285 atau 7,63% dari total belanja SKPD Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp5.231.962.114. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni : 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp76.380.500, dialokasikan anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa : a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam pemenuhan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta peruntukkannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota guna untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari : 1. 100% warga negara

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi social dan rujukan.	mampu. b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi social dan rujukan.	penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti. 2. 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti. 3. 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti. 4. 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. 5. 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.
		2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp0, **atau belum dianggarkan, harus disediakan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar,	3) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota telah disatukan penganggaran pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa : a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial. b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan dukungan psikososial. Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari : 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti. 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti. 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti. 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar	Pengemis di Luar Panti Sosial dan pada Belanja Tidak Teduga guna untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa : a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial. b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan dukungan psikososial.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota. *Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun* 2019 *serta* ***mengalihkan alokasi Belanja Hibah*** *pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024* ***dalam rangka pemenuhan SPM*** *tersebut.*		
		2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah *Kabupaten Dharmasraya* tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah *Kabupaten Dharmasraya* tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah *Kabupaten Dharmasraya* telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :	Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 untuk 7 (tujuh) prioritas Nasional dengan total nilai sebesar RP1.075.161.835.025. . 1.	*Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional* sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga belum terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub

<table>
<tr><th>No</th><th>Urut</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
TABEL 5
Sinergitas dan Penyelarasan Program Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Prioritas Nasional</th><th>APBD 2024</th><th>Rasio Terhadap</th></tr>
<tr><th>(Rp)</th><th>(%)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</td><td>792.205.292.898</td><td>73,68</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)</td><td>0</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</td><td>130.852.403.165</td><td>12,17</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)</td><td>72.144.884.296</td><td>6,71</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</td><td>77.334.976.491</td><td>7,19</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</td><td>2.624.278.175</td><td>0,24</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)</td><td>0</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD</td><td>1.075.161.835.025</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Belanja Daerah</td><td>1.075.161.835.025</td><td></td></tr>
</table>
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun 2024 sudah selaras dengan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga belum terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
</td>
<td></td>
<td>kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024</td>
</tr>
</table>

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud.		
		Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu : b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. c. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. d. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM. e. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Dan f. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu : a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM. d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Dan e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai	

<table>
<tr><th>No</th><th>Urut</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>seluruh rakyat Indonesia</td><td>nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagai berikut

TABEL 6
Alokasi Anggaran Untuk Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Prioritas Provinsi</th><th>APBD 2024</th><th>Rasio Terhadap Belanja Daerah</th></tr>
<tr><th>(Rp)</th><th>(%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing</td><td>523.127.202.041</td><td>48,66</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah</td><td>3.344.398.700</td><td>0,31</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</td><td>7.462.450.050</td><td>0,69</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital</td><td>1.402.622.145</td><td>0,13</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan</td><td>635.321.800</td><td>0,06</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</td><td>31.675.709.740</td><td>2,95</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas</td><td>507.514.130.549</td><td>47,20</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD</td><td>1.075.161.835.025</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Belanja Daerah</td><td>1.075.161.835.025</td><td></td></tr>
</table></td><td>Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga belum terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 total nilai sebesar RP1.075.161.835.025</td><td>Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap mengupayakan secara terus menerus konsistensi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan prioritas provinsi Tahun 2024</td></tr>
</table>

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ***sudah selaras*** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga belum terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. *Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mengupayakan secara terus menerus konsistensi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan prioritas provinsi Tahun 2024.*		
		3. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2024 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun 2024 *sudah selaras* dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas daerah Tahun 2024 total nilai sebesar RP1.075.161.835.025 :	*Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap mempertahankan dan konsisten dengan hasil penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024.*

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Tabel 7 **Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024**		

No.	Prioritas Daerah	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1	Pemerataan pembangunan infrastruktur	76.303.997.991	7,10
2	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	10.230.625.000	0,95
3	Memajukan pendidikan yang berkarakter	75.677.601.350	7,04
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	54.139.938.088	5,04
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	845.202.717.192	78,61
6	Pembangunan yang berkelanjutan	2.344.933.175	0,22
7	Membangkitkan identitas daerah	1.921.173.413	0,18
8	Membangun berbasis nagari	9.340.848.816	0,87
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.075.161.835.025	100,00
	Total Belanja Daerah	1.075.161.835.025	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun 2024 ***sudah selaras*** dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mempertahankan dan konsisten dengan hasil penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		4. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut : a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp351.724.976.752 atau 32,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.075.161.835.025, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan Anggaran Untuk fungsi pendidikan sebesar Rp351.724.976.752 atau 32,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.075.161.835.025 dan *Sudah memenuhi* alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir E.1a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 dengan rincian sbb: 1) Urusan bidang Pendidikan sebesar Rp340.331.123.153 2) Urusan Bidang Kebudayaan sebesar Rp8.107.260.594 3) Urusan Perpustakaan sebesar Rp390.320.050 4) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp2.945.472.955	Pemerintah Kbupaten harmasraya tetap konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitunhan	Jumlah		
		APBD 2023	APBD 2024	Selsisih
1	**a. Urusan Bidang Pendidikan:**	**325.848.464.442**	**340.331.123.153**	14.482.658.711
	1) Belanja Operasi:	**303.131.314.930**	**316.022.880.638**	**12.891.565.708**
	a. belanja pegawai;	263.161.965.000	268.529.769.953	5.367.804.953
	b. belanja barang dan jasa;	35.124.949.930	38.318.310.685	3.193.360.755
	c. belanja hibah;	4.844.400.000	9.174.800.000	4.330.400.000
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	**22.717.149.512**	**24.308.242.515**	**1.591.093.003**
	Belanja Modal Tanah	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.758.614.048	6.305.387.187	546.773.139
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.118.330.975	15.015.437.503	2.897.106.528
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.840.204.489	2.987.417.825	- 1.852.786.664
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	**7.849.250.439**	**8.107.260.594**	258.010.155
	1) Belanja Operasi:	7.849.250.439	8.107.260.594	258.010.155
	a. belanja pegawai;	-	37.700.000	37.700.000
	b. belanja barang dan jasa;	7.849.250.439	7.424.560.594	- 424.689.845
	c. belanja hibah;		645.000.000	645.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	-	-	-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	**14.744.387.400**	**390.320.050**	- 14.354.067.350
	1) Belanja Operasi:	**3.872.864.400**	**329.970.050**	**- 3.542.894.350**
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	3.872.864.400	329.970.050	- 3.542.894.350
	c. belanja hibah;	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	**10.871.523.000**	**60.350.000**	**- 10.811.173.000**
	Belanja Modal Tanah			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	871.523.000	60.350.000	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga	**6.081.999.632**	**2.945.472.955**	- 3.136.526.677
	1) Belanja Operasi:	6.081.999.632	2.945.472.955	- 3.136.526.677
	a. belanja pegawai;	-	11.500.000	11.500.000
	b. belanja barang dan jasa;	6.081.999.632	2.053.972.955	- 4.028.026.677
	c. belanja hibah;	-	880.000.000	880.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	-	-	-
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	-	-	-
	1) Belanja Transfer:	-	-	-
	Belanja bantuan keuangan...	-	-	-
	2) Sub Kegiatan .... pada SKPD	-	-	-
2	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d)**	**354.524.101.913**	**351.774.176.752**	**- 2.749.925.161**
3	**Total Belanja Daerah**	**1.029.378.138.553**	**1.075.161.835.025**	**45.783.696.472**
4	**Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%**	**34,44**	**32,72**	

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		b. Alokasi Anggaran Kesehatan Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp163.724.314.994 atau 22,57% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp725.381.121.876 . Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain: 1) dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. 3) prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain: a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit; b) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting;*	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan Anggaran Untuk Alokasi Anggaran Kesehatan sebesar Rp163.724.314.994 atau 22,57% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp725.381.121.876 . Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain: 1) dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. 3) prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain: a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit; b) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting;* c) pencegahan dan pengendalian penyakit menular; d) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; e) penguatan jejaring layanan primer; dan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap *konsisten* penyediaan anggaran kesehatan *dan* isesuai dengan program prioritas bidang kesehatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		c) pencegahan dan pengendalian penyakit menular; d) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; e) penguatan jejaring layanan primer; dan f) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan. Penyediaan anggaran kesehatan *agar terus ditingkatkan* di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*	f) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.	
		c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan ***prevalensi stunting*** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp316.551.300 atau 0,27% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp117.377.884.208. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp316.551.300 atau sekitar 0,03% dari total belanja dalam Rancangan APBD Tahun 2024 sebesar Rp RP1.075.161.835.025. Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan ***prevalensi stunting*** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp316.551.300 atau 0,27% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp117.377.884.208. Belanja daerah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain: 1) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap *konsisten dalam* mengalokasikan anggaran untuk penurunan ***prevalensi stunting*** *(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita.*

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan. Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp316.551.300 atau sekitar 0,03% dari total belanja dalam Rancangan APBD Tahun 2024. Untuk itu, Kabupaten Dharmasraya agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri. Belanja daerah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain: 1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita. 2). kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting. kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan; dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan serta melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian,	tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita. *2)* kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.		
		d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.790.976.597 atau 26,24% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.075.161.835.025, dengan rincian pada Tabel 9 dan 10 sebagai berikut :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan alokasi sebesar Rp252.790.976.597 atau 26,24% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.075.161.835.025 dalam arti Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan, ini disebabkan karena : 1. Besarnya penganggaran untuk belanja pegawai tahun 2024 yaitu sebesar Rp522.026.068.081,- atau 54,14% dari jumlah pendapatan sebesar Rp964.168.007.612,- 2. Besarnya pengangaran untuk belanja Hibah tahun 2024 yaitu sebesar Rp37.968.183.880,- atau 4,42% dari jumlah pendapatan sebesar Rp964.168.007.612,- dan belanja lainnya yang tidak menjadi belanja Infrastruktur Publik.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *tetap mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen)* sebagaimana diamanatkan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Tabel 9 **Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik** **NO** / **Komponen Perhitunhan** / **Jumlah**: **APBD 2023** / **APBD 2024** / **Selisih** 1 — Total Belanja Daerah — 1.029.378.138.553 — 1.075.161.835.025 — 45.783.696.472 2 — Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: a belanja bagi hasil — 2.632.820.000 — 2.750.957.200 — 118.137.200 b bantuan keuangan — 108.349.574.000 — 109.130.986.000 — 781.412.000 c jumah (a+b) — 110.982.394.000 — 111.881.943.200 — 899.549.200 3 — Selisih (1-2) — 918.395.744.553 — 963.279.891.825 — 44.884.147.272 4 — Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih) — 367.358.297.821 — 385.311.956.730 — 17.953.658.909 Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.790.976.597, dengan rincian pada Tabel 10 sebagai berikut :.	dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya penyediaan alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.790.976.597 atau 26,24% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.075.161.835.025, dengan rincian pada Tabel 9 dan 10 sebagai berikut : Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.790.976.597, dengan rincian pada Tabel 10 sebagai berikut :	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut

Tabel 10

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO	Komponen Perhitunhan	Jumlah		
		APBD 2023	APBD 2024	Selisih
1.	a Belanja Modal:	**151.236.483.671**	**97.354.785.417**	**- 53.881.698.254**
	1) tanah;	-	-	-
	2) peralatan dan mesin;	38.340.791.768	21.811.132.407	- 16.529.659.361
	3) bangunan dan gedung;	45.417.466.354	26.928.956.233	- 18.488.510.121
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	61.569.056.460	45.511.278.952	- 16.057.777.508
	5) aset tetap lainnya;	5.208.742.689	2.987.417.825	- 2.221.324.864
	6) aset lainnya.	700.426.400	116.000.000	- 584.426.400
	b Belanja Pemeliharaan	**9.085.882.720**	**8.549.521.300**	**- 536.361.420**
	Jumlah 1 = (a + b)	**160.322.366.391**	**105.904.306.717**	**- 54.418.059.674**
2.	a Belanja Hibah;	13.802.790.880	37.755.683.880	23.952.893.000
	b Belanja Bantuan Sosial;	-	-	-
	c Belanja Bantuan Keuangan.	108.349.574.000	109.130.986.000	781.412.000
	jumlah 2 = (a + b + c)	122.152.364.880	146.886.669.880	24.734.305.000
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	282.474.731.271	252.790.976.597	- 29.683.754.674

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***belum memenuhi*** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *harus mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen)* sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga *batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurangkurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027* sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.		
		e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya (di luar gaji dan tunjangan) sebesar Rp3.472.104.200 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung penguatan pembinaan dan pengawasan pada InspektoratKabupaten Dharmasraya antara lain tercantum pada : 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp917.161.000; 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp572.183.000; ***Belum memenuhi*** alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yaitu sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir E.2.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah. *Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus* ***menambahkan jumah alokasi*** *anggaran untuk*	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat sudah dikoreksi dan dilakukan penambahan anggaran sehingga jumkah belanja Inspektorat menjadi Rp.11.081.887.200,00 dikurangi belanja gaji Inspektorat Rp.3.008.020.000,- sehingga jumlah belanja Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat menjadi sebesar Rp.8.073.867.200,0 atau 0,75% dari total belanja daerah Rp.1.075.161.835.025,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini **sudah memenuhi** alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yaitu sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah untuk total jumlah belanja daerah diatas satu triliun rupiah sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir E.2.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah	*Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya tetap terus konsisten mengalokasikan anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024* sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi : 1) Kegiatan pengawasan, yaitu : a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja; b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD; c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Reviu Laporan Keuangan; e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; f) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali	Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi : 1) Kegiatan pengawasan, yaitu : a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja; b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD; c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Reviu Laporan Keuangan; e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; f) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.	memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP. 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop,	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain. Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	alat pengukur beton dan lain-lain.	
		f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menjadi sebesar Rp1.871.255.000 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetesi ASN. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***sudah memenuhi*** alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus ***tetap konsisten*** dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk : 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menjadi sebesar Rp1.871.255.000 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetesi ASN. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***sudah memenuhi*** alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap *mempertahankan dan konsisten* dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD yaitu paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Dharmasraya dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***tidak diperkenankan*** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.		
		5. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut : a. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp900.000.000 atau 0,08% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan alokasi anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp900.000.000 atau 0,08% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.075.361.835.025,- pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *tetap konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai* terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai*** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
		b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Dharmasraya sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Wali Kota/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing sebesar Rp469.609.000,00, atau 0,04% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah. ***Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran*** dimaksud ***yang memadai*** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai.4)i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 terkait penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Dharmasraya sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Wali Kota/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing sebesar Rp469.609.000,00, atau 0,04% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.	*Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap konsisten menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk* kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai.4)i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp34.995.500 atau 0,003% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ***harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai*** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.3.ai.3)d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp34.995.500 atau 0,003% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.	Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *tetap konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai* guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
				pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.3.ai.3)d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
		d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp328.642.614.608 atau 88,56% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp371.111.125.934 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini *sudah memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil,	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp328.642.614.608 atau 88,56% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp371.111.125.934 Hal ini *sudah memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan,	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap terus berkomitmen untuk mendukung dan* menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. *Untuk itu, Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *harus terus berkomitmen untuk mendukung dan* menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu agar Bupati Dharmasraya: (a) melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah; (2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan (3) memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). (b) meningkatkan j umlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh LKPP.	dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Untuk itu Bupati Dharmasraya agar : (a) melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalamnegeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah; (2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan (3) memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). (b) meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh LKPP. (c) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien dengan: (1) membentuk, mengelola dan/atau	di lingkungan Pemerintah Daerah

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		(c) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien dengan: (1) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog elektronik lokal; (2) mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal; (3) melaksanakan *E-purchasing* melalui katalog elektronik lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (4) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan *E-purchasing.*	mengembangkan katalog elektronik lokal; (2) mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal; (3) melaksanakan *E-purchasing* melalui katalog elektronik lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (4) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan *E-purchasing.*	
		6. Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp860.925.106.408, atau 80,07% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.075.161.835.025, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada jenis belanja :	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan Belanja Operasi terkoreksi setelah evaluasi gubernur sehingga menjadi sebesar Rp.857.837.115.898 atau 79,77% dari total Belanja Daerah sebesar Rp1.075.361.835.025,- yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	
		a. Belanja Pegawai Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp534.592.198.823 atau 49,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. *Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang*	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan jumlah alokasi Belanja Pegawai terkoreksi setelah evaluasi sehingga menjadi Rp522.011.068.081 atau 48,54% dari total belanja daerah sebesar Rp1.075.361.835.025.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp467.405.652.823 atau 43,47% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah *Kabupaten Dharmasraya* tentang APBD Tahun Anggaran 2024. ***Belum memenuhi*** *ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah* ***maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD****. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir* C.3.a.1)f) *Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.* Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada :	*Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp*454.839.522.081 *atau 42,30% dari* total Belanja Daerah sebesar Rp1.075.161.835.025. ***Belum memenuhi*** *ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah* ***maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD****. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir* C.3.a.1)f) *Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.*	
		1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp349.780.713.149 atau 32,53% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.3.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan terkoreksi setelah evaluasi gubernur sehingga menjadi sebesar Rp336.949.322.407 atau 31,33% dari total Belanja Daerah sebesar Rp1.075.161.835.025.	Penyediaan anggarkan Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
				gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.3.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
		2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada : a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp21.241.462.000. b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi sebesar Rp641.460.000. c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp2.872.274.000. d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.500.000. e) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp750.000. f) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp1.000.000. g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp60.000.000. h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp3.000.000.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, antara lain tercantum pada : a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp21.241.462.000. b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi sebesar Rp641.460.000. c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp2.872.274.000. d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.500.000. e) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp750.000. f) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp1.000.000.	Penyediaan Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		i) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp4.000.000. Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir C.3.a.1)h)(5) dan butir C.3.a.1)h)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp60.000.000. h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp3.000.000. i) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp4.000.000.	Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir C.3.a.1)h)(5) dan butir C.3.a.1)h)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
		3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada : a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.228.604.890. (1) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp11.708.541.016. (2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.494.800.000.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada 1. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.228.604.890. (1) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar	Penyediaan Penganggaran belanja Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		(3) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp570.000.000. (4) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.217.000.000. (5) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.120.000.000. b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp120.000.000; Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.	Rp11.708.541.016. (2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.494.800.000. (3) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp570.000.000. (4) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.217.000.000. (5) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.120.000.000. 2. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp120.000.000 telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud	APBD Tahun Anggaran 2024 sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, *sudah sesuai* dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas *50 milyar* sampai dengan *150 milyar* dialokasikan yaitu *paling rendah sebesar Rp400.000.000,00* dan *paling tinggi sebesar 0,40%*. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menyediakan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000 *sudah sesuai* dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas *50 milyar* sampai dengan *150 milyar* dialokasikan yaitu *paling rendah sebesar Rp400.000.000,00* dan *paling tinggi sebesar 0,40%*. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.	Penyediaan Penganggaran belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, *sudah sesuai* dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas *50 milyar* sampai dengan *150 milyar* dialokasikan yaitu *paling rendah sebesar Rp400.000.000,00* dan *paling tinggi sebesar 0,40%*. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
				realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud
		5) Tambahan Penghasilan ASN Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp59.973.411.307 atau 7,81% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja : a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp71.743.973.000. b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp0. c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp0. 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp72.510.847.650. Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir C.3.a.1)h)(7) Lampiran	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp71.743.973.000 atau 6,67% dari total Belanja Daerah Rp1.075.361.835.025,- yang diuraian dalam objek belanja : (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp71.743.973.000. (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp0. (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp0. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp72.510.847.650 atau 6,76% dari total Belanja Daerah Rp1.075.361.835.025,- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah sudah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sudah memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir C.3.a.1)h)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Penyediaan Penganggaran belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.		
		7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp61.966.377.000. 8) Belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp2.119.500.000. Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.vii)(iii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, penyediaan terhadap: 1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp61.966.377.000. 2) Belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp2.119.500.000. untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.vii)(iii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
		9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain : a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1.232.589.000 atau 4,99% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.651.781.411 diuraikan sebagai berikut : (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp922.779.000. (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp309.810.000. (3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp0.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, penyediaan terhadap c) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1.232.589.000 atau 4,99% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.651.781.411 diuraikan sebagai berikut : 1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp922.779.000. 2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp142.889.500 atau 5% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.857.790.000 diuraikan sebagai berikut : (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp100.022.650. (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp42.866.850. (3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0. *Alokasi insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan alokasi insentif pemungutan retribusi tidak memperhitungkan pendapatan retribusi jasa usaha yang berasal dari pendapatan BLUD. Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir C.2.a.1)t) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Rp309.810.000. 3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp0. d) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp142.889.500 atau 5% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.857.790.000 diuraikan sebagai berikut : 1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp100.022.650. 2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp42.866.850. 3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0. *Alokasi insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan alokasi insentif pemungutan retribusi tidak memperhitungkan pendapatan retribusi jasa usaha yang berasal dari pendapatan BLUD. Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir C.2.a.1)t) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	
		10) Belanja Honorarium sebesar Rp3.587.750.000 diuraikan ke dalam sub rincian obyek : a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp3.162.000.000. b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp397.150.000. c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebesar RP28.600.000. 11) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp713.750.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian obyek : a) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp713.750.000,00. b) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp0. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. *Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN*	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, penyediaan terhadap 1. Belanja Honorarium sebesar Rp3.587.750.000 diuraikan ke dalam sub rincian obyek : a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp3.162.000.000. b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp397.150.000. c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebesar RP28.600.000. 2. Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp713.750.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian obyek : a) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp713.750.000,00. b) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp0. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)h)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. *Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir* C.3.a.1)h)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	
		b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa menjadi sebesar Rp288.577.223.705 atau 26,84 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja : 1) Belanja Barang sebesar Rp69.228.449.609 yang antara lain diuraikan pada Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp68.436.372.909, antara lain diuraikan pada : a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp4.585.329.268.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa terkoreksi sehingga menjadi sebesar Rp297.842.863.937 atau 27,70 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.075.361.835.025 yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja : 1) Belanja Barang sebesar Rp69.228.449.609 yang antara lain diuraikan pada Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp68.436.372.909, antara lain diuraikan pada : a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja dan Jasa yang penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		b) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp16.151.000. c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp467.935.000. d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp847.420.500. e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp2.522.239.400. f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp723.753.200. g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp3.510.000. h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp335.646.600. i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp202.500.000. j) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp4.958.705.000. k) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp17.831.386.313. l) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp20.391.460.913. m) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp1.017.154.000. n) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp319.284.000. o) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp663.100.000. p) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp0. q) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp2.414.117.000. Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun	sebesar Rp4.585.329.268. b) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp16.151.000. c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp467.935.000. d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp847.420.500. e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp2.522.239.400. f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp723.753.200. g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp3.510.000. h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp335.646.600. i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp202.500.000. j) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp4.958.705.000. k) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp17.831.386.313. l) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp20.391.460.913. m) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp1.017.154.000. n) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp319.284.000. o) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp663.100.000. p) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp0.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir C.3.a.2)c)(1)(b), butir C.3.a.2)c)(1)(c) dan butir C.3.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	q) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp2.414.117.000. Penganggarannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir C.3.a.2)c)(1)(b), butir C.3.a.2)c)(1)(c) dan butir C.3.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	
		2) Belanja Jasa sebesar Rp89.457.987.706 yang antara lain diuraikan : a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp60.494.765.706 yang diuraikan antara lain : (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Pembawa Acara, dan Panitia sebesar	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap penyediaan belanja sudah disesuaikan dan mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya *dilakukan pengurangan jumlah alokasi*	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Rp1.181.450.000. (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.055.070.000. (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp30.000.000. Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya *dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,* serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	*anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,* serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
		(4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp2.448.600.000. (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp4.157.656.000. (6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp3.257.390.000. (7) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebesar Rp2.306.330.000. (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp13.742.435.000. (9) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp0.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp2.448.600.000. 2) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp4.157.656.000. 3) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		(10) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp571.480.000. (11) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp4.915.850.000. (12) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp2.977.200.000. *Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya* dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah ***dilarang*** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Apabila peruntukkannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya* ***tidak diperkenankan*** *untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*	Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp3.257.390.000. 4) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebesar Rp2.306.330.000. 5) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp13.742.435.000. 6) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp0. 7) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp571.480.000. 8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp4.915.850.000. 9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp2.977.200.000 *Sudah dibatasi dan dikurangi alokasinya* dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah ***dilarang*** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.	
		(13) Belanja Tagihan Air sebesar Rp46.471.000. (14) Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp4.523.331.160.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		(15) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp1.231.475.846. Penganggarannya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja: 1) Belanja Tagihan Air sebesar Rp46.471.000. 2) Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp4.523.331.160. 3) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp1.231.475.846. Penganggarannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	
		b) Belanja Lembur sebesar Rp755.203.000. Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan Belanja Lembur sebesar Rp755.203.000 Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	
		c) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp12.538.870.200 yang diuraikan : (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp9.490.723.200. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka mewujudkan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam penyediaan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp9.490.723.200,00 dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.6.891.746.400,00 untuk 37.293 jiwa untuk 6 bulan yaitu Januari s/d	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Juni 2024 sehingga penyediaan belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 menjadi Rp.16.382.469.600,00 dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) untuk guna terselenggaranya jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Kabupaten Dharmasraya di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.110.000.000. (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp0. (4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp1.120.110.000. (5) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp303.237.000. Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2)c)(2)(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam penyediaan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada obyek belanja: 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.110.000.000. 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp0. 3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp1.120.110.000. 4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp303.237.000 Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2)c)(2)(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			Negeri Nomor 15 Tahun 2023	
		d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada : (1) Belanja Sewa Tanah sebesar Rp0. (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.770.110.000. (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.394.229.000. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.* Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada : 1) Belanja Sewa Tanah sebesar Rp0. 2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.770.110.000. 3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.394.229.000. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.*	
		e) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp1.200.000.000.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		f) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp700.000.000. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada : 1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp1.200.000.000. 2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp700.000.000. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
		g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.360.012.800. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.360.012.800. Dapat dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		dengan mempertimbangkan aspek- aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah		
		3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp8.549.521.300 yang diuraikan pada : a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp0. b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.865.180.000. c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp507.339.800. d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.177.001.500. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir C.3.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp8.549.521.300 yang diuraikan pada: 1) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp0. 2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.865.180.000. 3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp507.339.800. 4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.177.001.500. Dapat dianggarkan sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp47.618.712.600 yang diuraikan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp47.618.712.600. Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya ***dirasionalkan dan dikurangi*** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud,* sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir C.3.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah (diluar gaji dan tunjangan), untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menyediakan Belanja Perjalanan Dinas terkoreksi setelah evaluasi gubernur sehingga menjadi sebesar Rp47.892.525.600 yang diuraikan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp47.892.525.600,- Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas sudah memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud,* sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir C.3.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah (diluar gaji dan tunjangan), untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Belanja Perjalanan Dinas dengan mempedomani butir C.3.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Pemilu dan Pemilukada serentak. *Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar tidak menganggarkan perjalanan dinas luar negeri pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024* ***kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya****, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.*	dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.	
		5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp947.100.000 yang diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menyediakan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp947.100.000 yang diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang pelaksanaanya dengan mempedomani Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
		c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada : 1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp25.016.294.988. 2) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp8.574.800.000. Alokasi Belanja BOS sebesar Rp33.591.094.988 ***lebih kecil*** dari alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.788.800.000, ***belum sesuai*** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menyediakan Belanja BOS sebesar Rp.39.974.100.000,- yang diuraikan pada: 1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp25.016.294.988. 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp3.730.587.187,- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp2.652.417.825 4) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp8.574.800.000. Alokasi Belanja BOS sebesar Rp39.974.100.000 sama besarnya dari alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.974.100.000 yang diurakan pada : 1) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler sebesar Rp33.551.300.000.- 2) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp1.237.500.000,- 3) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler sebesar Rp4.221.600.000,- 4) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp.60.000.000,-	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			5) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp768.700.000 6) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebesar Rp135.000.000,- ***sesuai*** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	
		d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada : 1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp27.794.555.158. 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp46.076.569.302. 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp3.898.910.200. 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp0. Belanja BLUD sebesar Rp77.770.034.660 ***lebih besar*** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp69.738.900.642. ***Belum sesuai*** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menyediakan Belanja BLUD sebesar Rp78.465.646.060,- yang diuraikan pada: 1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp27.900.555.158.- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp42.859.680.702.- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp3.059.410.200,- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp4.390.000.000,- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp250.000.000 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp6.000.000,- Alokasi Belanja BLUD sebesar Rp78.465.646.060 sama besarnya dari alokasi target Pendapata Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Kapitasi pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp78.465.646.060 yang diurakan pada : 1) Belanja Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp69.817.918.125,-	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp8.647.727.935.- Belanja BLUD Rp78.465.646.060 sama *besar* dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp78.465.646.060. ***Sudah sesuai*** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	
		e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah sebesar Rp37.755.683.880 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada : 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp23.065.883.880. 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp6.115.000.000. 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.330.000.000. 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp0. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah sebesar Rp37.755.683.880 yang diuraikan antara lain pada : 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp23.065.883.880. 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp6.115.000.000. 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.330.000.000. 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp0.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.	
		Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial ***dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan*** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15	Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial ***dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan*** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Tahun 2023. ***Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Dharmasraya baru sebesar Rp19.593.786.666 atau 1,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024), maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.***	Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
		Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. ***Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.***	Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah sudah dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar **Rp0, atau belum dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam lampiran III.a Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD TA 2024 terdapat belanja hibah untuk Partai Politik sebesar Rp798.390.880, dimana hibah ini dianggarkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik namun belum dirinci sesuai calon penerima (by name by address). Untuk itu diminta Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyesuaikan penempatan rekening hibah untuk Partai Politik tersebut dan mencatatkannya secara rinci by name by address.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan anggaran Hibah Kepada Partai Politik dianggarakan pada sub kegiatan 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah belanja 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.798.390.880,- sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
		Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh	Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		kebutuhan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD TA. 2024, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Dharmasraya sebesar Rp12.917.493.000 atau 61,51% dari total NPHD sebesar Rp21.000.000.000 dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp6.600.000.000 atau 60% dari total NPHD sebesar Rp11.000.000.000. *Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya* ***sudah memenuhi*** *alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebesar sisa tot al kebutuhan pada APBD TA 2024 ini, sesuai NPHD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan KPU serta Bawaslu Kota Payakumbuh.*	Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD TA. 2024, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Dharmasraya sebesar Rp12.917.493.000 atau 61,51% dari total NPHD sebesar Rp21.000.000.000 dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp6.600.000.000 atau 60% dari total NPHD sebesar Rp11.000.000.000. *Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya* ***sudah memenuhi*** *alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebesar sisa tot al kebutuhan pada APBD TA 2024 ini, sesuai NPHD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan KPU serta Bawaslu Kota Payakumbuh*	
		7. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp97.354.785.417 atau 9,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, ***harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023***. Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan anggaran Belanja Modal terkoreksi setelah evaluasi sehingga menjadi sebesar Rp100.642.775.927 atau 9,36% dari total belanja daerah Rp1.075.361.835.025,- sudah *diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.* Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir ***C.3.b.1), C.3.b.2)*** dan butir ***C.3.b.3)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru *(new initiative)* dan angka dasar *(baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Dharmasraya sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir ***C.3.b.7), C.3.b.8), C.3.b.9) dan C.3.b.10)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir *C.3.b.1), C.3.b.2)* dan butir *C.3.b.3)* Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru *(new initiative)* dan angka dasar *(baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Dharmasraya sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir *C.3.b.7), C.3.b.8), C.3.b.9) dan C.3.b.10)* Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
		Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada : a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada : 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.811.132.407 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain : a) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Rp21.811.132.407 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain : 1) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp7.749.000.000. 2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp81.400.000. 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.555.676.200. 4) Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.927.326.000. b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.928.956.233. c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp45.511.278.952 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek : 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp40.738.088.952. 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp4.440.310.000. 3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp82.880.000. d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.987.417.825. Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, *dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya*, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran belanja modal dilakukan *sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah* berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya,	Rp7.749.000.000. b) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp81.400.000. c) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.555.676.200. d) Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.927.326.000. 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.928.956.233 3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp45.511.278.952 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek : a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp40.738.088.952. b) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp4.440.310.000. c) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp82.880.000. 4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.987.417.825. Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, *dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya*, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran belanja modal dilakukan *sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah* berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. *Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.* Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir ***C.3.b.4)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. *Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.* Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir ***C.3.b.4)*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
		Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp1.700.000.000. b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp97.800.000. dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan anggaran yang tercantum pada: a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp1.700.000.000. b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp97.800.000. dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Modal dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir *D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.*

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.	memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyaraka	
		8. Belanja Tidak Terduga Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000 atau 0,46% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah alokasinya perlu untuk ***dihitung kembali*** dan nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir ***C.3.c.*** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 terkait Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000 atau 0,46% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah alokasinya perlu untuk dihitung kembali dan nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	*Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya *tetap berkomitmen* terhadap Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir *C.3.c.* Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
		D. Kebijakan Pembiayaan Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp121.993.827.413, sebagaimana Tabel 11 sebagai berikut:	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Tabel 11 Pembiayaan Daerah **Uraian** / **APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)** Target: **103.638.474.963**; Realisasi Per Oktober 2023: **31.521.662.880**; **%**: **30,42**; **Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)**: **110.793.827.413**; **Selisih Targ APBD TA. 20 dan Target Al TA. 2024 (Rp)**: **7.155.352** 1 / 5 / 6 / 7=6:5 / 8 / 9=8-5 **PEMBIAYAAN** — 103.638.474.963 — 31.521.662.880 — 30,42 — 110.793.827.413 — 7.155.352 **Penerimaan Pembiayaan** — 114.029.344.163 — 41.912.532.080 — 36,76 — 121.993.827.413 — 7.964.483 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya — 114.029.344.163 — 41.912.532.080 — 36,76 — 121.993.827.413 — 7.964.483 Pelampauan penerimaan PAD — 0 — 0 — 0,00 — 0 — **Penghematan Belanja** — **0** — **0** — **0,00** — **0** — Sisa Penggunaan BTT — 4.154.380.709 — 3.924.380.709 — 94,46 — 5.000.000.000 — (845.619. **Sisa Dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran** — **0** — **0** — **0,00** — **0** — **Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah** — **0** — **0** — **0,00** — **0** — Penerimaan kembali Pemberian kepada BUMD — 0 — 0 — 0,00 — 0 — Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat — 0 — 0 — 0,00 — 0 — **Pengeluaran Pembiayaan** — **10.390.869.200** — **10.390.869.200** — **100,00** — **11.200.000.000** — **809.130** Penyertaan modal pada BUMD — 1.500.000.000 — 1.500.000.000 — 100,00 — 1.500.000.000 — Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka — 0 — 0 — 0,00 — 9.500.000.000 — 9.500.000 Pemberiana Pinjaman -Dana Bergulir kepada masyarakat — 0 — 0 — 0,00 — 0 — Pembayaran kegiatan lanjutan tahun sebelumnya — 8.890.869.200 — 8.890.869.200 — 0,00 — **200.000.000** — 8.690.869 Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: 1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang	Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp121.993.827.413,	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri :		
		1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp121.993.827.413. Penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp121.993.827.413. ***Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada penghitungan dengan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2)a)(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.*** Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *wajib* menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir *C.4.a.2)a)(3)* Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir *C.4.a.2)a)(4)* Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *dapat*	Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan penerimaan pembiayaan sebesar Rp121.993.827.413. Penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp121.993.827.413 Penganggaran SiLPA tersebut sudah didasarkan pada penghitungan dengan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2)a)(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir C.4.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir C.4.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah	

<table>
<tr><th>No</th><th>Urut</th><th>Hasil Evaluasi</th><th>Tanggapan Hasil Evaluaasi</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir C.4.a.2)a)(3)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023</td><td>sebagaimana maksud butir C.4.a.2)a)(3)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2. Pengeluaran Pembiayaan
Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11.000.000.000 yang berasal dari :
a. Penyertaan modal daerah sebesar Rp1.500.000.000.
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sesbesar Rp9.500.000.000</td><td>Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan penerimaan dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11.000.000.000 yang berasal dari :
a. Penyertaan modal daerah sebesar Rp1.500.000.000.
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sesbesar Rp9.500.000.000</td><td></td></tr>
<tr><td>IV</td><td colspan="4">KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>A. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD
Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannya dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut:
Tabel 12
Kesesuaian Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plafon Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS
<table>
<tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>RPJMD</th><th>RKPD 2024</th><th>PPAS 2024</th><th>APBD 2024</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Jumlah Program</td><td>136</td><td>236</td><td>222</td><td>226</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Jumlah Kegiatan</td><td>-</td><td>528</td><td>432</td><td>442</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jumlah Sub Kegiatan</td><td>-</td><td>1.383</td><td>961</td><td>991</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</td><td>1.037.192.310.000</td><td>1.016.236.880.004</td><td>1.073.710.115.025</td><td>1.077.921.584.728</td></tr>
</table>
Jumlah program sebanyak 226, jumlah kegiatan sebanyak 442 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 991 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya</td><td>Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD.
Jumlah program sebanyak 226, jumlah kegiatan sebanyak 442 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 991 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD TA. 2024 belum sesuai dengan jumlah program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Ada beberapa sub kegiatan pada RAPBD dan tidak ada pada PPAS akibat perubahan Juknis DAK dan DAU Peruntukan, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab</td><td>Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kedepannya akan lebih inten dalam pembahasan RKPD sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan RKPD, PPAS dan RAPBD.</td></tr>
</table>

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		tentang APBD TA. 2024 belum sesuai dengan jumlah program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. *Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya* ***hanya diperkenankan*** *melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.*	III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.	
		B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 namun tidak terdapat dalam RKPD dan/atau KUA dan PPAS, antara lain: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain: a. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana pada kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 3. Dinas Sosial antara lain : a. Pemberian Layanan Kedaruratan b. Penyediaan Permakanan c. Penyediaan Alat Bantu	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 masih terdapat sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun tidak terdapat dalam RKPD dan/atau KUA dan PPAS, antara lain: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain: a. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana pada kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 3. Dinas Sosial antara lain : a. Pemberian Layanan Kedaruratan b. Penyediaan Permakanan c. Penyediaan Alat Bantu	Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya tetap mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain : a. Pembentukan Paskibraka b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 ***belum*** berpedoman pada RKPD serta KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain : a. Pembentukan Paskibraka b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Ketidaksesuaian sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dalam RKPD dan/atau KUA dan PPAS ini disebabkan adanya perubahan Juknis DAK. Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
V	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD/RPD**			
		Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut: 1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 Rp1.037.192.310.000 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp 1.077.921.554.728 ; dan 2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 sejumlah 136 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 222 program. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memperhatikan: 1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut: 1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 Rp1.037.192.310.000 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp 1.077.921.554.728 ; dan 2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 sejumlah 136 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 222 program.	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan 2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. 3. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024-2026.	Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan tetap memperhatikan: 1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan 2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. 3. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024-2026.	
VI	**LAIN-LAIN**			
		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut : A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini sudah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		B. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegitan/subkegiatan antara lain: a. rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; b. pemeliharaan anak-anak terlantar; c. pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan; d. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; e. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota. 2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan/subkegiatan antara lain: a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota; b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota. 3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/subkegiatan antara lain: a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota; b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 4. memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 sudah berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegitan/subkegiatan antara lain: a. rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; b. pemeliharaan anak-anak terlantar; c. pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan; d. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; e. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota. 2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan/subkegiatan antara lain: a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota; b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota. 3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.	a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota; b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 4. memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan 5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.	
		C. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sesuai kebutuhan di APBD TA. 2024. *Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka* ***nomor register untuk penetapan Perda APBD 2024 tidak akan diberikan.*** Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada APBD 2023. Dokumen resmi tersebut berupa salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 antara Bupati Dharmasraya dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sesuai kebutuhan di APBD TA. 2024.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		D. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP. Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP. Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.	
		E. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 penyediaan anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana	

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
		Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.	kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.	
		F. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan.	
		G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut maka Bupati Dharmasraya agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan peringatan HUT Satpol PP Ke-74 dan Satlinmas Ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat. *Untuk itu diminta Bupati Dharmasraya menyiapkan dan memastikan ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.*	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Dharmasraya telah menyiapkan *ketersediaan anggaran sesuai dengan kondisi keuangan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 guna untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud* terkait tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 20p23, hal Tuan Rumah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut maka Bupati Dharmasraya agar mendorong keterlibatan Satuan	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen menyiapkan *ketersediaan anggaran sesuai dengan kondisi keuangan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024* untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Ke-62 Satuan Perlindungan

No	Urut	Hasil Evaluasi	Tanggapan Hasil Evaluaasi	Tindak Lanjut
			Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan peringatan HUT Satpol PP Ke-74 dan Satlinmas Ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat.	

BUPATI DHARMASRAYA
Selaku
PIHAK PERTAMA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

H. PARLAUNGAN
KETUA

ADI GUNAWAN
WAKIL KETUA

ADE SUDARMAN
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN		HAL
1	Batang Tubuh Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023		1-14
2	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	1-2
3	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;	1-7
4	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	1-272
5	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan, Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;	1-304
6	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;	1-3
7	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;	1-5
8	Lampiran VII	Singkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;	1-7
9	Lampiran VIII	Singkroisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;	1-110
10	Lampiran IX	Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;	1-21
11	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;	1-1
12	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;	1-1
13	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;	1-1
14	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap dan Aset Lain-lain ;	1-15
15	Lamoitan XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Selesai dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan	1-4
16	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan	1-1
17	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah; dan	1-1

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nommor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah kabupaten.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja daerah dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp 964.168.007.612,00 (sembilan ratus enam puluh empat milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp105.162.132.160,00 (seratus lima milyar seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak Daerah;
   b. retribusi Daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.651.781.411,00 (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.675.708.125,00 (tujuh puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.832.210.107,00 (Empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh rupiah).
(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.002.432.517,00 (tiga milyar dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp Rp850.258.147.517,00 (delapan ratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
    a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
    b. Pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp791.897.793.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp58.360.354.517,00 (lima puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.747.727.935,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    a. Pendapatan Hibah;
    b. Dana darurat; dan
    c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.647.727.935,00 (Delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.075.361.835.025,00 (satu triliun tujuh puluh lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp857.837.115.898,00 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja bunga;
   d. Belanja subsidi;
   e. Belanja hibah; dan
   f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp522.011.068.081,00 (lima ratus dua puluh dua miliar sebelas juta enam puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp297.857.863.937,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.968.183.880,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp100.642.775.927,0000 (seratus milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja modal tanah;
   b. Belanja modal peralatan dan mesin;
   c. Belanja modal gedung dan bangunan ;
   d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
   e. Belanja modal aset tetap lainnya;
   f. Belanja modal aset lainnya;
   g. Belanja modal aset tak berwujud.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.118.832.407,00 (Dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh rupiah).
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.828.906.743,00 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.726.618.952,00 (empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 2.852.417.825,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp116.000.000,00 (Seratus enam belas miliar rupiah).

(8) Belanja modal aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 111.881.943.200,00 (Seratus sebelas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja bagi hasil; dan
   b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.957.200,00 (Dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.130.986.000,00 (Seratus Sembilan miliar seratus tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp111.193.827.413,00 (seratus sebelas miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp Rp121.993.827.413,00 (Seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas;
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjamam Daerah; dan
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.993.827.413,00 (Seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjamam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 huruf b direncanakan sebesar Rp10.800.000.000,00 (Sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah). yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(3) Penyertaan Modal daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus ribu rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.300.000.000,00 (Sembilan miliar tiga ratus juta rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
(6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja (defisit) sebesar Rp111.193.827.413,00 (seratus sebelas milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp111.193.827.413,00 (seratus sebelas milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
(2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakaat yang anggarannya belum tersedian dalam tahun anggaran berjalan;
    b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
    c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya seta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, ini terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g. Lampiran VII Singkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
h. Lampiran VIII Singkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
i. Lampiran IX Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaannya APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR : 12
NO REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT : (12/119/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disertai penjelasan dan dokumen dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari rancangan kerja pemerintah daerah tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Proritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 18 Juli tahun 2023

Bahwa mekanisme penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Adapun pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diawali dengan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, kemudian dilanjutkan ke tahapan penyusunan rancangan APBD (KUA/PPAS), dan tahapan terakhir dilakukan melalui penetapan APBD Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 115

LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**105.162.132.160,00**
4.1.01	Pajak Daerah	24.651.781.411,00
4.1.02	Retribusi Daerah	72.675.708.125,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.832.210.107,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.002.432.517,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**850.258.147.517,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	791.897.793.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.360.354.517,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.747.727.935,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.647.727.935,00
	Jumlah Pendapatan	**964.168.007.612,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**857.837.115.898,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	522.011.068.081,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.857.863.937,00
5.1.05	Belanja Hibah	37.968.183.880,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**100.642.775.927,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.118.832.407,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.828.906.743,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.726.618.952,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.852.417.825,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	116.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**111.881.943.200,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.750.957.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	109.130.986.000,00
	Jumlah Belanja	**1.075.361.835.025,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-111.193.827.413,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**121.993.827.413,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	121.993.827.413,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.800.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.300.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10.800.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**111.193.827.413,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

Bupati

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran II : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	71.787.018.125,00	596.538.913.785,00	93.503.649.828,00	0,00	0,00	690.042.563.613,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	50.000.000,00	303.541.621.696,00	24.175.492.275,00	0,00	0,00	327.717.113.971,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	50.000.000,00	303.541.621.696,00	24.175.492.275,00	0,00	0,00	327.717.113.971,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	69.892.018.125,00	229.695.201.032,00	24.002.053.836,00	0,00	0,00	253.697.254.868,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	111.626.436.772,00	12.636.643.636,00	0,00	0,00	124.263.080.408,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	6.600.000.000,00	6.702.237.800,00	4.257.762.200,00	0,00	0,00	10.960.000.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Sungai Rumbai	337.000.000,00	2.020.702.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	2.065.702.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Koto Besar	98.000.000,00	1.570.314.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1.590.314.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Sungai Limau	169.286.246,00	1.381.710.246,00	26.000.000,00	0,00	0,00	1.407.710.246,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Koto Baru	621.905.037,00	2.838.241.057,00	59.000.000,00	0,00	0,00	2.897.241.057,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tiumang	100.000.000,00	1.380.496.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1.400.496.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Padang Laweh	165.526.700,00	1.091.394.400,00	14.000.000,00	0,00	0,00	1.105.394.400,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Sitiung I	480.728.608,00	2.164.689.537,00	100.000.000,00	0,00	0,00	2.264.689.537,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Timpeh	216.383.000,00	1.466.213.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1.486.213.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Gunung Medan	125.000.000,00	1.396.253.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.402.253.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sitiung II	138.452.600,00	1.439.549.650,00	77.700.000,00	0,00	0,00	1.517.249.650,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Beringin Sakti	110.000.000,00	985.691.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	991.691.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Silago	258.033.934,00	1.640.831.934,00	31.000.000,00	0,00	0,00	1.671.831.934,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Sungai Dareh	167.232.000,00	2.554.589.436,00	147.000.000,00	0,00	0,00	2.701.589.436,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Sialang	55.370.000,00	1.258.678.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1.278.678.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten	0,00	54.430.200,00	0,00	0,00	0,00	54.430.200,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	Laboratorium Kesehatan Daerah	175.000.000,00	427.392.000,00	0,00	0,00	0,00	427.392.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	60.024.100.000,00	87.695.351.000,00	6.515.948.000,00	0,00	0,00	94.211.299.000,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.630.000.000,00	34.899.378.073,00	45.290.803.717,00	0,00	0,00	80.190.181.790,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.630.000.000,00	34.899.378.073,00	45.290.803.717,00	0,00	0,00	80.190.181.790,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,00	11.213.799.056,00	3.400.000,00	0,00	0,00	11.217.199.056,00
1	04	1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	215.000.000,00	11.213.799.056,00	3.400.000,00	0,00	0,00	11.217.199.056,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	11.988.851.814,00	0,00	0,00	0,00	11.988.851.814,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	9.316.930.814,00	0,00	0,00	0,00	9.316.930.814,00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.671.921.000,00	0,00	0,00	0,00	2.671.921.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	5.200.062.114,00	31.900.000,00	0,00	0,00	5.231.962.114,00
1	06	1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	5.200.062.114,00	31.900.000,00	0,00	0,00	5.231.962.114,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	632.000.000,00	73.730.839.836,00	1.165.707.459,00	0,00	0,00	74.896.547.295,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	1.249.005.650,00	0,00	0,00	0,00	1.249.005.650,00
2	07	3.32.2.07.0.00.01.0000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	1.249.005.650,00	0,00	0,00	0,00	1.249.005.650,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	1.086.978.250,00	0,00	0,00	0,00	1.086.978.250,00
2	08	1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.086.978.250,00	0,00	0,00	0,00	1.086.978.250,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	70.000.000,00	4.471.558.300,00	53.200.000,00	0,00	0,00	4.524.758.300,00
2	09	2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Perikanan	70.000.000,00	4.471.558.300,00	53.200.000,00	0,00	0,00	4.524.758.300,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000,00	6.306.855.215,00	353.008.060,00	0,00	0,00	6.659.863.275,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000,00	6.306.855.215,00	353.008.060,00	0,00	0,00	6.659.863.275,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.796.574.650,00	239.080.344,00	0,00	0,00	5.035.654.994,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	4.796.574.650,00	239.080.344,00	0,00	0,00	5.035.654.994,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	5.448.658.000,00	0,00	0,00	0,00	5.448.658.000,00
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	5.448.658.000,00	0,00	0,00	0,00	5.448.658.000,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	4.119.970.000,00	0,00	0,00	0,00	4.119.970.000,00
2	14	1.06.2.08.2.14.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	4.119.970.000,00	0,00	0,00	0,00	4.119.970.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	32.000.000,00	11.836.905.300,00	34.390.720,00	0,00	0,00	11.871.296.020,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	32.000.000,00	11.836.905.300,00	34.390.720,00	0,00	0,00	11.871.296.020,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	145.000.000,00	5.877.127.600,00	7.500.000,00	0,00	0,00	5.884.627.600,00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	145.000.000,00	5.877.127.600,00	7.500.000,00	0,00	0,00	5.884.627.600,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	80.000.000,00	4.426.054.450,00	121.682.295,00	0,00	0,00	4.547.736.745,00
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	80.000.000,00	4.426.054.450,00	121.682.295,00	0,00	0,00	4.547.736.745,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	4.269.586.650,00	296.496.040,00	0,00	0,00	4.566.082.690,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	4.269.586.650,00	296.496.040,00	0,00	0,00	4.566.082.690,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	1.921.173.413,00	0,00	0,00	0,00	1.921.173.413,00
2	19	2.22.3.26.2.19.01.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	1.921.173.413,00	0,00	0,00	0,00	1.921.173.413,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	69.870.600,00	0,00	0,00	0,00	69.870.600,00
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	69.870.600,00	0,00	0,00	0,00	69.870.600,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	30.124.000,00	0,00	0,00	0,00	30.124.000,00
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	30.124.000,00	0,00	0,00	0,00	30.124.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.000.000,00	13.571.764.008,00	0,00	0,00	0,00	13.571.764.008,00
2	22	2.22.3.26.2.19.01.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.000.000,00	13.571.764.008,00	0,00	0,00	0,00	13.571.764.008,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	3.898.661.750,00	60.350.000,00	0,00	0,00	3.959.011.750,00
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.898.661.750,00	60.350.000,00	0,00	0,00	3.959.011.750,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	179.972.000,00	0,00	0,00	0,00	179.972.000,00
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	179.972.000,00	0,00	0,00	0,00	179.972.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	167.480.000,00	28.688.741.100,00	88.450.000,00	0,00	0,00	28.777.191.100,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	818.953.250,00	11.400.000,00	0,00	0,00	830.353.250,00
3	25	2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	818.953.250,00	11.400.000,00	0,00	0,00	830.353.250,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	399.965.000,00	0,00	0,00	0,00	399.965.000,00
3	26	2.22.3.26.2.19.01.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	399.965.000,00	0,00	0,00	0,00	399.965.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	103.500.000,00	22.072.854.800,00	0,00	0,00	0,00	22.072.854.800,00
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	103.500.000,00	22.072.854.800,00	0,00	0,00	0,00	22.072.854.800,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	206.961.900,00	0,00	0,00	0,00	206.961.900,00
3	30	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	206.961.900,00	0,00	0,00	0,00	206.961.900,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	190.247.550,00	0,00	0,00	0,00	190.247.550,00
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	190.247.550,00	0,00	0,00	0,00	190.247.550,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	63.980.000,00	4.999.758.600,00	77.050.000,00	0,00	0,00	5.076.808.600,00
3	32	3.32.2.07.0.00.01.0000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	63.980.000,00	4.999.758.600,00	77.050.000,00	0,00	0,00	5.076.808.600,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	75.000.000,00	77.859.064.151,00	3.435.308.440,00	0,00	0,00	81.294.372.591,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	75.000.000,00	35.031.664.364,00	3.262.708.440,00	0,00	0,00	38.294.372.804,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	35.031.664.364,00	3.262.708.440,00	0,00	0,00	38.294.372.804,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	42.827.399.787,00	172.600.000,00	0,00	0,00	42.999.999.787,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	42.827.399.787,00	172.600.000,00	0,00	0,00	42.999.999.787,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	891.492.299.487,00	25.361.821.696,00	63.125.000,00	5.000.000.000,00	111.881.943.200,00	142.306.889.896,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	4.787.686.350,00	49.125.000,00	0,00	0,00	4.836.811.350,00
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	0,00	4.787.686.350,00	49.125.000,00	0,00	0,00	4.836.811.350,00
5	02		KEUANGAN	891.492.299.487,00	13.919.192.250,00	0,00	5.000.000.000,00	111.881.943.200,00	130.801.135.450,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan Daerah	891.492.299.487,00	13.919.192.250,00	0,00	5.000.000.000,00	111.881.943.200,00	130.801.135.450,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	5.738.052.096,00	14.000.000,00	0,00	0,00	5.752.052.096,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	5.738.052.096,00	14.000.000,00	0,00	0,00	5.752.052.096,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	591.891.000,00	0,00	0,00	0,00	591.891.000,00
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	591.891.000,00	0,00	0,00	0,00	591.891.000,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	0,00	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	9.028.522.200,00	2.046.365.000,00	0,00	0,00	11.074.887.200,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	9.028.522.200,00	2.046.365.000,00	0,00	0,00	11.074.887.200,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Kabupaten	0,00	9.028.522.200,00	2.046.365.000,00	0,00	0,00	11.074.887.200,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	14.210.000,00	20.574.571.400,00	288.670.200,00	0,00	0,00	20.863.241.600,00
7	01		KECAMATAN	14.210.000,00	20.574.571.400,00	288.670.200,00	0,00	0,00	20.863.241.600,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000,00	2.675.909.950,00	34.100.000,00	0,00	0,00	2.710.009.950,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sitiung	1.460.000,00	1.987.617.800,00	15.300.000,00	0,00	0,00	2.002.917.800,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Koto Baru	1.500.000,00	2.352.831.700,00	0,00	0,00	0,00	2.352.831.700,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Sungai Rumbai	3.250.000,00	1.880.013.200,00	15.400.000,00	0,00	0,00	1.895.413.200,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Sembilan Koto	1.500.000,00	1.534.715.800,00	112.270.200,00	0,00	0,00	1.646.986.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Timpeh	1.500.000,00	1.802.023.550,00	0,00	0,00	0,00	1.802.023.550,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Koto Salak	0,00	1.639.064.200,00	27.600.000,00	0,00	0,00	1.666.664.200,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	1.338.242.000,00	0,00	0,00	0,00	1.338.242.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Koto Besar	2.000.000,00	2.152.259.600,00	4.500.000,00	0,00	0,00	2.156.759.600,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Padang Laweh	0,00	1.538.900.800,00	45.800.000,00	0,00	0,00	1.584.700.800,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tiumang	0,00	1.672.992.800,00	33.700.000,00	0,00	0,00	1.706.692.800,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	26.054.641.730,00	51.500.000,00	0,00	0,00	26.106.141.730,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	26.054.641.730,00	51.500.000,00	0,00	0,00	26.106.141.730,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	26.054.641.730,00	51.500.000,00	0,00	0,00	26.106.141.730,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Sitiung IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**964.168.007.612,00**	**857.837.115.898,00**	**100.642.775.927,00**	**5.000.000.000,00**	**111.881.943.200,00**	**1.075.361.835.025,00**

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

Bupati

SUTAN RISKA

LAMPIRAN III

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran III : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
4	PENDAPATAN DAERAH	964.168.007.612,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105.162.132.160,00	
4.1.01	Pajak Daerah	24.651.781.411,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	72.675.708.125,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.832.210.107,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.002.432.517,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	850.258.147.517,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	791.897.793.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.360.354.517,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.747.727.935,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.647.727.935,00	

BELANJA DAERAH	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Indikator Hasil	: Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik persentase sekolah terakreditasi A dan B (PAUD, SD, SMP dan SKB negeri dan swasta) Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Indikator Keluaran	: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Penambahan Ruang Kelas Baru Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Pengadaan Mebeluer Sekolah Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Pembangunan Perpustakaan Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	552.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	712.925.097,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.081.048.550,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	*null*	*0,00*	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	393.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.422.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.451.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.925.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.229.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.311.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.765.331.187,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.518.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.589.503.488,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.921.965.325,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.467.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.789.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.092.556.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.364.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.440.523.690,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Penambahan Ruang Kelas Baru Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	720.237.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.680.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	503.981.680,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.726.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.103.956.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	207.184.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	552.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.648.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.982.693,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.136.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.069.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.466.763.801,00	
5.1.05	Belanja Hibah	655.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.141.083.699,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	730.452.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.500.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	486.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.875.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.127.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.249.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.972.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.400.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.637.200.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.267.400,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.508.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.789.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.959.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	763.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Indikator Hasil	: Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar		
Kegiatan	: 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		
Indikator Keluaran	: Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.050,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kepala Sekolah Memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran Persentase Tenaga Penunjang Lainnya (TU dan Penjaga) mampu dalam membantu proses belajar mengajar secara efektif dan efesien Persentase Guru mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas Persentase guru dan tenaga kependidikan professional Persentase Guru mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah Persentase Kepala sekolah Memiliki gaya kepemimpinan yang demokratif, lugas dan terbuka		
Kegiatan	: 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.586.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	255.870.762.211,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.451.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.974.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.414.145.600,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah RS terakreditasi Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah puskesmas terakteditasi		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: TOI BTO NDR AVLOS GDR BOR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.246.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	538.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.983.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.730.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.991.971.738,00	

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	839.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.080.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit		

Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.560.003.660,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.338.600,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Persentase penanganan kasus KLB Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >= 15 tah Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita yang di MTBS/MTBM Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur >= Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah nagari sadar gizi Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase balita di timbang di posyandu Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4		

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.733.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.520.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.183.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.416.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.001.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.401.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.197.140,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.509.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.585.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.391.746.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.852.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.051.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.148.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.132.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Persentase RS dan Puskesmas yang menggunakan sistem informasi kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.025.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.969.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Persentase fasilitas layanan kesehatan dengan standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi Persentase fasyankes dengan standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi		
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar Persentase perencanaan kebutuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar Persentase monitoring dan evaluasi kebutuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.702.850,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan Persentase tenaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti diklat fungsional		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.056.909.700,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Indikator Hasil	: Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes Persentase sarana yang tersertifikasi		
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Indikator Keluaran	: Persentase pembinaan dan pengawasan toko obat, apotek dan UMOT Persentase puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat (PIO) Sosialisasi Agent of Change (AoC) pada apoteker		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.730.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah sampel PKRT yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa Jumlah sarana PKRT yang tersertifikasi Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi PKRT sesuai standar kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Cakupan sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada PIRT		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.601.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah depot air minum (DAM) yang memiliki izin Jumlah TFU dan TPM yang laik hygiene sanitasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		
Indikator Keluaran	: Persentase pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisional dan sentra makanan jajanan		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		

Indikator Hasil	: Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase peningkatan PHBS		
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah KK yang berprilaku hidup bersih dan sehat		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.520.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah nagari siaga aktif Jumlah nagari yang melaksanakan germas aktif Jumlah posyandu strata mandiri Pembentukan dan pembinaan posyandu remaja		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	77.093.637.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.327.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.488.000,00	

Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.504.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.465.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.080.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.751.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.995.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.900,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.998.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.980.822,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.676.474.400,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.827.598,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Peningkatan pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.160.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	895.325.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.106.912.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	597.762.200,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sungai Rumbai		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.702.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	616.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Koto Besar		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.314.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	272.835.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.165.000,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Sungai Limau		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	958.824.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	145.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.386.246,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Koto Baru		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.110.765.000,00	

Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	727.306.685,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.169.372,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tiumang		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.496.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	229.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		

Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Padang Laweh		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.474.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	138.100.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.820.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Sitiung I		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Visite Rate		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.025.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Visite rate		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	520.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	659.664.537,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Timpeh		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: visite rate		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.970.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: VISITE RATE		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	325.041.516,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.201.484,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Gunung Medan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.253.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	337.176.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.824.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Sitiung II		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	725.745.200,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	302.962.425,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.842.025,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.700.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Beringin Sakti		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671.691.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	175.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Silago		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.798.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	458.642.140,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.391.794,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Sungai Dareh		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.053.042.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	823.576.392,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.971.044,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sialang		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.308.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	282.360.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.010.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0016 Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.430.200,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0017 Laboratorium Kesehatan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.392.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	87.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	34.211.299.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	21.564.030.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.920.022.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.965.948.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.300.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	250.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang		
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik		
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Panjang Sungai Yang dinormalisasi/restorasi		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.460.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		
Indikator Keluaran	: Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	719.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.221.750.000,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum		
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.528.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.088.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.272.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.918.000,00	
Program	: 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		
Indikator Keluaran	: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.113.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0028 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.842.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.470.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.601.654,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Indikator Hasil	: Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor		
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG		
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0014 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	91.310.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.353.990.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.436.522.765,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.207.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.769.000,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap		
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Panjang Jalan Mantap Jumlah Panjang jembatan Mantap		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	137.420.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.184.250.469,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.103.078.952,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.080.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.685.411.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.050.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.001.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000.000,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.583.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.103.000,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya dokumen pelaporan		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.928.556.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.970.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.318.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.032.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.285.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.490.755.600,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Indikator Hasil	: Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah		
Kegiatan	: 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.971.000,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.264.500,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.117.250,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah serah terima rumah kepada korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	884.500,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
Indikator Keluaran	: jumlah rumah khusus yang difasilitasi pengelolaan kelembagaannya termasuk pemeliharaan Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun jumlah rumah susun yang difasilitasi pengelolaan kelembagaanya termasuk pemeliharaannya		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.459.550,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: Cakupan permukiman layak huni Cakupan permukiman layak huni		
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: penyusunan perbup terkait pemakaman Jumlah dokumen hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.655.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.651.500,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan /pemugaran		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
Indikator Hasil	: Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah		
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: meningkatnya permukiman yang layak huni berkurangnya luas kawasan kumuh		
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.525.750,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Indikator Hasil	: Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU		
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Rumah Khusus yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Rumah Susun yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	102.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.255.233.206,00	
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Gaji		
Kegiatan	: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.295.204.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.050.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah belanja pemenuhan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.996.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.998.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.987.800,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		

[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.996.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.565.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.233.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.155.000,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.993.100,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.468.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.132.500,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.636.000,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.995.000,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.390.534.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.993.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.009.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.498.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.950,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.034.064,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.020.846.800,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.821.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.006.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.008.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.404.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.327.838.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.012.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.019.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.030.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.051.600,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: persentase kesejahteraan sosial		
Kegiatan	: 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		
Indikator Keluaran	: persentase KAT yang terlatih		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: persentase PSKS yang terlatih		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.984.150,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.929,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti		
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.105.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.746.885,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.888.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.380.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.039.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.156.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.513.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.745.050,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.130.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.607.500,00	
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase perlindungan dan jaminan sosial		
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.999.670,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.411.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.998.980,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan		
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.935.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.804.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.153.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.337.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.317.500,00	
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran		
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: terlaksananya keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.291.328.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.034.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.569.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.910.500,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.900.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.993.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.735.800,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.525.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
Unit Organisasi	: 3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
Program	: 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke Perencanaan Tenaga Kerja		
Kegiatan	: 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.120.950,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja		
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.466.000,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan		

Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di Sisnaker		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.841.000,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak		
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.960.000,00	
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perselisihan yang Dicegah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.843.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.034.000,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah		
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada layanan pemberdayaan perempuan		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah organisasi perempuan yang dibina		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.525.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.994.550,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		

Indikator Hasil	: Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani		
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terbentuknya UPTD PPA untuk layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.910.300,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.692.700,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Indikator Hasil	: Terwujudnya Kabupaten Layak Anak		
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.766.000,00	
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: terwujudnya kabupaten layak anak		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus		
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.400.000,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.689.700,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase lembaga layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan		
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Akses Pangan Masyarakat		
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
Indikator Keluaran	: Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis		
Indikator Keluaran	: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.041.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan		
Indikator Keluaran	: Informasi Harga dan Pasokan Pangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.079.850,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		
Indikator Keluaran	: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.002.750,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.005.000,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan		
Kegiatan	: 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Masyarakat Rawan Pangan yang tertangani		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.999.300,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pangan Aman yang beredar dimasyarakat		
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan keamanan pangan segar		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.987.800,00	
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan	: 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya administrasi Keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.072.833.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan kebutuhan administrasi umum		

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.067.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.061.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.200.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penunjang urusan		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.500.550,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.771.800,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.768.750,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Program	: 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
Indikator Hasil	: Jumlah rekomendasi tanah restan yang terbit		
Kegiatan	: 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah yang telah terbit		
Sub Kegiatan	: 2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Program	: 2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		
Indikator Hasil	: Jumlah bidang tanah pemda yang telah bersertifikat		
Kegiatan	: 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah		
Indikator Keluaran	: jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang bersertifikat		
Sub Kegiatan	: 2.10.09.2.01.0002 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup		
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup		
Kegiatan	: 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.015.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Meningkatnya luas tutupan lahan Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).		
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKA) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKU) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.103.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.897.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.497.015,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penghentian pencemaran		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.593.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
Indikator Hasil	: Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Dharmasraya		
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	942.917.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		

Indikator Hasil	: Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3		
Kegiatan	: 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3		
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.005.000,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Indikator Hasil	: Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH		
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup		
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.371.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.384.000,00	
Program	: 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		
Indikator Hasil	: Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
Kegiatan	: 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA		
Sub Kegiatan	: 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.001.000,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup		
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terlaksanan		
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.159.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.060,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.608.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.202.300,00	
Program	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Cakupan penghargaan lingkungan		
Kegiatan	: 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi		
Sub Kegiatan	: 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.022.000,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase pengaduan yang tertangani		
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tertanganinya Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten		
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.225.000,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya		
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengurangan sampah Terlaksananya penanganan sampah		
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah		
Indikator Keluaran	: Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.494.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		
Indikator Keluaran	: jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya		
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Lingkungan Hidup		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.751.906.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.010.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.003.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.001.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.323.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.860.700,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya sarana BMD pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.500.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya prasarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.477.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.353.663.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Kendaraan Dinas di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.064.000,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Persentase kepemilikan KTP-el		
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.521.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.091.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan		
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan		
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.521.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.201.000,00	
Program	: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.390.278.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.832.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.318.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.530.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.948.100,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.724.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.980.344,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa		
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari		
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.789.000,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari		
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.002.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		

Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.181.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat		
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.321.763.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.272.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.738.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.064.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.998.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.080.400,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Organisasi	: 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: persentase data kependudukan		
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
Indikator Keluaran	: terbitnya jukla/juknis kegiatan		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0008 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
Indikator Keluaran	: persentase kemampuan petugas penyuluh KB dalam menjalankan program Bangga Kencana		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Indikator Keluaran	: Persentase pemahaman organisasi kemasyarakatan terhadap program Bangga Kencana		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.500.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.500.000,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang		
Kegiatan	: 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.986.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.390.720,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.945.200,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.987.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0009 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan ANDALALIN Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Audit Inpeksi Keselamatan LLAJ		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.001.150,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.947.603.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.759.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.503.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.291.350,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah unit mebel yang disediakan Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang disediakan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.206.001.350,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.762.850.200,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.187.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat		
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID) Kontrak Media Kelompok informasi masyarakat Perda/Perbup tentang SPBE Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.678.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.967.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Hubungan Media		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.029.513.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.968.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.995.800,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		

Indikator Hasil	: Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kawasan yang terkoneksi dengan mobile broadband (kawasan digital, WIFI publik) monitoring Evaluasi Menara untuk SKRD Integrasi Rumah Data Sosialisasi Aplikasi baru Jumlah Informasi yang dihasilkan GCIO dalam 1 tahun		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo		
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.814.183.330,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain ATK Kantor Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.545.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.180.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.117.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2 Roda 2 Gedung Command Center th 1 Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Kendaraan Roda 4 (1 unit)		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.887.520,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.249.600,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.264.750,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
Indikator Hasil	: Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik		
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.994.700,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian		
Kegiatan	: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Indikator Hasil	: Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas		

Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.205.250,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.996.700,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.959.244.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.022.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.002.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.805.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.046.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.310.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.657.350,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.975.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.707.295,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.999.550,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.651.200,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase pertumbuhan Investasi		
Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya regulasi yang dapat mendorong daya saing penanaman modal		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		

Indikator Hasil	: Promosi dan kerjasama investasi		
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran		
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.056.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya		
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.018.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.650,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.013.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.052.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.027.000,00	
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.308.339.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.455.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.115.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.999.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.696.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.950.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.725.000,00	

5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	110.000.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.415.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.015.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.771.040,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi	: 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi		
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan Tingkat Kabupaten		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.328.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	180.000.000,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi		
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten yang Terpelihara		

Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	867.593.063,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Keikutsertaan dalam Event Daerah dan Multi Event		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.277.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: Terlaksnanya Pengembangan dan Pembinaan Inorga		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.134.350,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi		
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pramuka yang Aktif		
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.441.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		

Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Indikator Hasil	: Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral		
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pendukung Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah survey dan rekomendasi BPS Jumlah nagari Statistik jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral		
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.896.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.974.100,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Indikator Hasil	: Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN Jumlah Asesment website oleh BSSN		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.124.000,00	
Kegiatan	: 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah		
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Gadang yang dibangun dan Rehab		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	48.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.464.820.330,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.422.500.000,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Lembaga Adat yang Aktif		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.321.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	40.000.000,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		

Indikator Hasil	: Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan		
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Kesenian Daerah yang dilestarikan Jumlah Festival Daerah yang dilaksanakan Jumlah Group Kesenian Darah yang dibina		
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.006.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.708.627.678,00	
5.1.05	Belanja Hibah	155.000.000,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.973.000,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pembayaran gaji, Tunjangan dan Honorarium Tahun 2024		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.140.204.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.503.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.900,00	

Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.013.350,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.407.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.128.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpiliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Perpustakaan yang Dibina		
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang dibina		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.884.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.995.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
Indikator Hasil	: Persentase naskah kuno yang dilestarikan Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya		
Kegiatan	: 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.894.115.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.805.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.764.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.057.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.758.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.480.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.091.200,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.980.000,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu		
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Ketersediaan Arsip Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja dan Alat Bukti yang Sah		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.277.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.726.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.029.000,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya layanan informasi arsip Dinamis dan statis secara nasional		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.940.000,00	
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,		
Kegiatan	: 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Organisasi	: 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan		
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penumbuhan Kelembagaan Nelayan Kecil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase Usaha Perikanan yang berkembang		
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokdakan yang di dampingi		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan pembudidayaan ikan		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.800.300,00	
5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.603.450,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.400.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan		
Kegiatan	: 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kawasan konservasi perairan umum yang aktif		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.002.500,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang berdaya saing		
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dan Konsumsi		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.547.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata		
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga pada Daya Tarik Pariwisata yang Bina		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.376.000,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Terlaksananya Pemasaran Pariwisata		
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemasaran Pariwisata		
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.981.000,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Indikator Hasil	: Jumlah Peserta Pelatihan Songket		

Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
Indikator Keluaran	: Peserta Pelatihan Songket		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.608.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Sarana Pertanian		
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.525.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.168.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.520.450,00	
5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan angka kelahiran ternak di UPT Perbibitan dan HPT		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.004.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: Peningkatan populasi ternak		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.499.203.250,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Prasarana pertanian		
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.997.290.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		
Indikator Keluaran	: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.068.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produksi Daging		
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.297.050,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan layanan kesehatan hewan		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian		

Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah area asuransi usaha tani yang mendapat subsidi		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian		
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.900.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.071.600,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium ASN		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.155.860.000,00	

Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.024.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.696.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.232.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.592.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.451.400,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.228.650,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.529.190.600,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.520.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi		
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.719.900,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu		
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.174.500,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		

Indikator Hasil	: Alat UTTP yang Beratanda tera sah		
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.969.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.698.000,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan omzet IKM		
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.747.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.212.550,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar		
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.288.000,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
Organisasi	: 3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
Unit Organisasi	: 3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
Program	: 3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 3.32.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Kegiatan	: 3.32.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Honorarium, Gaji, dan Tunjangan ASN yang dibayarkan		
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.239.337.000,00	
Kegiatan	: 3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.031.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.412.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.048.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.901.000,00	
Kegiatan	: 3.32.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum yang Terlaksana Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.995.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.553.200,00	
Kegiatan	: 3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan		
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Nilai LPPD Nilai LPPD Terfasilitasinya Kegiatan PATEN, Kompetensi Camat Berprestasi, HUT KAB/HUT RI, Rakor Pemerintah Tk. Kab/Prov, TOPONIMI, Batas Daerah dan Batas Nagari, Penamaan Rupabumi, LKPj, LPPD, EPPD, SPM dan Koord. Proses Pengusulan, Pengankatan dan Pemberhantian KDH/WKDH, Pengusulan izin dan cuti KDH/WKDH		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.272.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.123.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.495.200,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan, Safari Ramadhan, Haji,PHBI,MTQ Tk Kab/Prov, Operasional Masjid Agung, Hibanh Uang dan Rakor		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.020.931.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.325.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
Indikator Keluaran	: Indek kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi hukum, penyelesaian permasalahan hukum dan penyuluhan hukum		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.424.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.406.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.406.500,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Kerja Sama Jumlah MoU yang di tanda tangani		

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.689.900,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.575.250,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.663.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.505.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.829.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	109.350.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.273.250,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.941.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.265.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.425.400,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.353.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.912.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.515.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.019.856.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.938.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Telaksananya pengadaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	355.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.899.708.440,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.445.018.664,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.502.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.264.892.600,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.455.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	180.892.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.489.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		
Indikator Keluaran	: Nilai SAKIP Jumlah Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (LAKIP,PK,Rencana Aksi,Cascading, Pohon Kinerja,RTL SAKIP Jumlah OPD yang terlibat dalam pencapaian Reformasi Birokrasi General Jumlah OPD yang mendapat pembinaan Penerapan SAKIP		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.250,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.999.150,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terhadap Pelayanan Keprotokolan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.169.145.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.600.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.948.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.948.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.464.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.464.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.464.500,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.367.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.097.928.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	959.760.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.007.145.850,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.330.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.766.055.066,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.941.750,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.521.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.593.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.709.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.106.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.664.840,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.319.554.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	838.113.565,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.828.541.016,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

BELANJA DAERAH	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Indikator Hasil	: Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD Persntase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah

Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indikator Keluaran	: Penyusunan RKPD sesuai tatacara dan tahapan yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.322.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.884.850,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan yang berkualitas		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.708.200,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaaan rencana pembangunan daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.823.000,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

Indikator Hasil	: Persentase pencapaian hasil Renja PD Persentase pencapaian hasil Renstra PD		
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.195.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.804.500,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Indikator Keluaran	: Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.997.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.181.250,00	
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah		
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pembayaran keuangan PD peembayaran gaji dan tunjangan asn		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.940.332.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.037.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.618.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.334.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.542.850,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.125.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.684.800,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: peningkatan kualitas pengelolaan daerah		
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: penyusunan anggaran tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.965.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.245.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	961.608.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.684.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase penyerapan anggaran		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.525.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.813.350,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) LKPD tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.671.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.394.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.813.950,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.117.750,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0003 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000.000,00	
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.750.957.200,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	109.130.986.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.928.500,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik		
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.299.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.024.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.406.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.059.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: persentase peningkatan PAD Persentase Pertumbuhan PAD		
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase realisasi PAD Persentase Pertumbuhan PAD		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.877.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.217.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.661.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.214.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah nilai AKIP BKD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.083.895.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Nilai AKIP BKD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.023.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.910.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.994.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.949.600,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Kepegawaian Daerah		
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.973.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.505.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.994.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.007.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.748.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	959.772.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.423.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.474.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.000,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.993.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.856.146.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.994.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.498.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.998.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.840.496,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.658.400,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.221.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah		
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Indeks Inovasi Daerah		
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.325.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.203.100,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.471.900,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten		

Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.985.850,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.645.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.237.100,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.511.300,00	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.080.750,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.188.000,00	
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.775.300,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.385.700,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.169.000,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.761.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.832.783.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.460.600,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.777.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.882.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.484.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.168.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.225.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.173.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	940.440.000,00	

BELANJA DAERAH	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pulau Punjung
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pulau Punjung
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.015.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.100.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.321.797.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.828.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.636.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.320.950,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.422.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sitiung		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sitiung		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.337.500,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.7.04 null		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.7.04.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.830.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.674.683.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.368.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.914.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.781.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.014.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.300.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.989.200,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Koto Baru		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Koto Baru		

Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.344.900,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari		

Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jenis pembinaan yang dilakukan		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.745.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pembayaran gaji dan tunjangan asn		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.827.018.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.411.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.998.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.854.800,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sungai Rumbai		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sungai Rumbai		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP		

Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan		

Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jenis pembinaan yang dilakukan		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.035.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pembayaran gaji dan tunjangan asn		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.596.282.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.365.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.716.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.387.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.126.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun		

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.927.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis BMD yang di Pemeliharaan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sembilan Koto		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sembilan Koto		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.214.419.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.022.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.506.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.572.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.763.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.643.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.046.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.363.800,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.970.200,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Timpeh		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Timpeh		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.579.950,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.540.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.478.227.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.032.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.643.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Koto Salak		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Koto Salak		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: pembayaran gaji dan tunjangan asn dan pembayaran tambahan penghasilan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.350.733.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.229.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.746.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.594.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.438.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: umlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.002.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.025.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis BMD yang dilakukan Pemeliharaan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.058.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	

Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	978.348.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.134.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.698.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.341.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.132.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.948.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.620.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: undefined		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.422.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.275.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jenis pembinaan yang dilakukan		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.720.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: pembayaran gaji dan tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.850.362.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pengadaan Pakaian Paskibra HUTKEMRI dan Diklat Pegawai		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.848.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.687.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.294.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.515.900,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.358.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.323.800,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Padang Laweh		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Padang Laweh		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jenis pembinaan yang dilakukan Jenis pembinaan yang dilakukan		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.269.456.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.906.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.198.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.271.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.004.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.196.700,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.595.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.247.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jenis BMD yang di Pemeliharaan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tiumang		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tiumang		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.310.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.690.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	*null*	*0,00*	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.313.259.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.214.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.377.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.963.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.885.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.984.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.499.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.600.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		

Indikator Hasil	: Jumlah Konflik Sosial		
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Konflik Sosial yang ditangani		
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.136.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.997.600,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Partai Politik		
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Indikator Keluaran	: jumlah partai politik yang dibina		
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.294.600,00	
5.1.05	Belanja Hibah	23.090.883.880,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.911.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan LSM		
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Konflik Sosial yangditangani		
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.991.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.004.500,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Indikator Hasil	: Jumlah Penyakit Masyarakat		
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: *Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Jumlah Forum Kewaspadaan Dini masyarakat*		
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.609.000,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.014.330.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.004.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.522.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.629.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.200.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.450,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.720.200,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: tersedia pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	

PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.993.827.413,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	121.993.827.413,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.800.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.300.000.000,00	

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

Bupati

SUTAN RISKA

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Pendidikan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik persentase sekolah terakreditasi A dan B (PAUD, SD, SMP dan SKB negeri dan swasta) Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen 65 persen 65 persen 65 persen							
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Penambahan Ruang Kelas Baru Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Pengadaan Mebeluer Sekolah Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Pembangunan Perpustakaan Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen							
1	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	0,00	552.250.000,00	0,00	0,00	552.250.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
2	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	712.925.097,00	2.781.048.550,00	0,00	0,00	3.493.973.647,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0,00	183.100.000,00	0,00	0,00	183.100.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
4	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
5	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	0,00	393.600.000,00	0,00	0,00	393.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah									
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	10 Paket	421.400.000,00	1.422.600.000,00	0,00	0,00	1.844.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
7	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
8	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4762 Peserta Didik	2.451.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.451.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
10	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	34.925.000,00	0,00	0,00	0,00	34.925.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
11	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1000 Orang	20.229.500,00	0,00	0,00	0,00	20.229.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
12	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2000 Orang	293.311.500,00	0,00	0,00	0,00	293.311.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
13	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	155 Satuan Pendidikan	20.283.431.187,00	4.511.468.813,00	0,00	0,00	24.794.900.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
14	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang	0,00	1.467.200.000,00	0,00	0,00	1.467.200.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
15	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	147 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
16	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	264.789.500,00	2.092.556.250,00	0,00	0,00	2.357.345.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
17	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
18	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	147 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
19	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	201.364.000,00	3.440.523.690,00	0,00	0,00	3.641.887.690,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengadaan Perlengkapan Sekolah	70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen 70 persen							
20	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
21	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium									
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	11 Ruang	0,00	720.237.000,00	0,00	0,00	720.237.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
22	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	547.680.000,00	603.981.680,00	0,00	0,00	1.151.661.680,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
23	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang	246.726.000,00	2.103.956.000,00	0,00	0,00	2.350.682.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
24	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	0,00	207.184.000,00	0,00	0,00	207.184.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
25	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium									
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
26	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
27	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah									
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12 Paket	284.600.000,00	552.200.000,00	0,00	0,00	836.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
28	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	22 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
29	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2952 Peserta Didik	1.648.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.648.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
30	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	0,00	127.982.693,00	0,00	0,00	127.982.693,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
31	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	115.770.000,00	0,00	0,00	0,00	115.770.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
32	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600 Orang	17.136.500,00	0,00	0,00	0,00	17.136.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
33	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2000 Orang	107.069.300,00	0,00	0,00	0,00	107.069.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
34	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan	8.122.363.801,00	1.871.536.199,00	0,00	0,00	9.993.900.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	33 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
36	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	33 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
37	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	0,00	260.800.000,00	0,00	0,00	260.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
38	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-							
39	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	13 Unit	756.500.000,00	486.000.000,00	0,00	0,00	1.242.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
40	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD									
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
42	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD									
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
43	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD									
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
44	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD									
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1150 Peserta Didik	494.875.000,00	0,00	0,00	0,00	494.875.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
45	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	7140 Peserta Didik	20.999.800,00	0,00	0,00	0,00	20.999.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
46	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1000 Orang	28.127.000,00	0,00	0,00	0,00	28.127.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	178.249.000,00	0,00	0,00	0,00	178.249.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
48	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	99.972.650,00	0,00	0,00	0,00	99.972.650,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
49	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	4.281.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.281.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
50	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah									
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
51	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	0,00	197.267.400,00	0,00	0,00	197.267.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	70 persen 70 persen 70 persen 70 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
53	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
54	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	177 Orang	25.508.000,00	0,00	0,00	0,00	25.508.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
55	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	177 Orang	110.789.800,00	0,00	0,00	0,00	110.789.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
56	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	908.859.500,00	0,00	0,00	0,00	908.859.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
57	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
59	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8654 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
60	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
61	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar	65 persen 65 persen 65 persen 65 persen							
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	70 persen							
62	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	160 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
64	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	70 persen							
65	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	100.000.050,00	0,00	0,00	0,00	100.000.050,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Kepala Sekolah Memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran Persentase Tenaga Penunjang Lainnya (TU dan Penjaga) mampu dalam membantu proses belajar mengajar secara efektif dan efesien Persentase Guru mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas Persentase guru dan tenaga kependidikan professional Persentase Guru mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah Persentase Kepala sekolah Memiliki gaya kepemimpinan yang demokratif, lugas dan terbuka	65 persen 65 persen 65 persen 97 persen 65 persen 65 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70 persen							
66	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	19.586.500,00	0,00	0,00	0,00	19.586.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
67	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
68	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1739 Orang/bulan	255.870.762.211,00	0,00	0,00	0,00	255.870.762.211,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
69	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
71	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
72	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
73	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
74	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
75	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.451.200,00	0,00	0,00	0,00	40.451.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
76	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	99.974.000,00	0,00	0,00	0,00	99.974.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
77	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
78	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
79	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
80	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
81	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
83	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.414.145.600,00	0,00	0,00	0,00	4.414.145.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
84	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
85	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
86	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
87	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Dinas Kesehatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah RS terakreditasi Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah puskesmas terakteditasi	1 unit 26693 orang 1 unit 12 jenis 7 unit							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	TOI BTO NDR AVLOS GDR BOR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar	3.00 persen 45.00 persen 14.50 persen 5.50 persen 35.00 persen 63.4 persen 100 persen 75 persen							
88	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
89	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan									
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	22.246.000,00	538.320.000,00	0,00	0,00	560.566.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
90	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas									
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	312.983.900,00	11.560.971.738,00	0,00	0,00	11.873.955.638,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
91	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
93	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
94	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
95	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
96	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi									
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	60 Unit	219.080.900,00	0,00	0,00	0,00	219.080.900,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
97	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
98	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	[object Object]
99	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	6.560.003.660,00	0,00	0,00	0,00	6.560.003.660,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
100	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga									
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	50 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
101	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	114.338.600,00	0,00	0,00	0,00	114.338.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Persentase penanganan kasus KLB Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (gol 15 tahun) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita yang di MTBS/MTBM Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan	36 nagari 100 persen 30 kelompok 100 persen 100 persen 100 persen 46 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 14 persen 100 persen 56 persen 100 persen 100 persen 6 daerah 40 nagari 0.5 indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			umur "e 15 tahun) Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah nagari sadar gizi Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase balita di timbang di posyandu Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	50 persen 100 persen 100 persen 80 persen 100 persen 6 persen 100 persen 100 persen 9 kelompok 100 persen							
102	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6331 Orang	216.733.000,00	0,00	0,00	0,00	216.733.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
103	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6043 Orang	187.520.800,00	0,00	0,00	0,00	187.520.800,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
104	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5617 Orang	312.183.850,00	0,00	0,00	0,00	312.183.850,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
105	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28073 Orang	245.416.000,00	0,00	0,00	0,00	245.416.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
106	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42928 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
107	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	188663 Orang	78.001.000,00	0,00	0,00	0,00	78.001.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
108	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22421 Orang	33.401.000,00	0,00	0,00	0,00	33.401.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
109	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2533 Orang	228.197.140,00	0,00	0,00	0,00	228.197.140,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
110	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	135.125.000,00	0,00	0,00	0,00	135.125.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
111	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	606 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
112	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3914 Orang	348.509.900,00	0,00	0,00	0,00	348.509.900,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
113	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5219 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
114	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
115	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
116	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
117	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	141.000.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	562.585.000,00	0,00	0,00	0,00	562.585.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
119	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
120	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
121	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	97.010.000,00	0,00	0,00	0,00	97.010.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
122	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	566 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
123	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	59.400.000,00	0,00	0,00	0,00	59.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
124	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	175.240.000,00	0,00	0,00	0,00	175.240.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	16.391.746.400,00	0,00	0,00	0,00	16.391.746.400,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
126	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	18 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
127	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
128	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
129	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	15 Dokumen	641.852.200,00	17.425.000,00	0,00	0,00	659.277.200,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
130	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	161.051.700,00	205.148.300,00	0,00	0,00	366.200.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
131	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	101.270.000,00	0,00	0,00	0,00	101.270.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	27.060.000,00	0,00	0,00	0,00	27.060.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
133	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	110.132.000,00	0,00	0,00	0,00	110.132.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase RS dan Puskesmas yang menggunakan sistem informasi kesehatan	100 persen							
134	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	131.025.000,00	0,00	0,00	0,00	131.025.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi	100 persen 100 persen							
135	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	18 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
136	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	17 Unit	248.969.850,00	0,00	0,00	0,00	248.969.850,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
137	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Persentase fasilitas layanan kesehatan dengan standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi Persentase fasyankes dengan standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen							
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	100 persen							
138	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
139	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar Persentase perencanaan kebutuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar Persentase monitoring dan evaluasi kebutuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar	90 persen 100 persen 100 persen							
140	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	449.702.850,00	0,00	0,00	0,00	449.702.850,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan Persentase tenaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti diklat fungsional	45 persen 40 persen 15 persen							
141	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	1.056.909.700,00	0,00	0,00	0,00	1.056.909.700,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes Persentase sarana yang tersertifikasi	15 unit 100 persen 100 persen							
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pembinaan dan pengawasan toko obat, apotek dan UMOT Persentase puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat (PIO) Sosialisasi Agent of Change (AoC) pada apoteker	100 persen 100 persen 30 persen							
142	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Dokumen	63.730.000,00	0,00	0,00	0,00	63.730.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sampel PKRT yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa Jumlah sarana PKRT yang tersertifikasi Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi PKRT sesuai standar kesehatan	1 sampel 100 persen 15 puskesmas							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada PIRT	160 PIRT							
144	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80 Dokumen	308.601.000,00	0,00	0,00	0,00	308.601.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah depot air minum (DAM) yang memiliki izin Jumlah TFU dan TPM yang laik hygiene sanitasi	60 angka 40 angka							
145	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisional dan sentra makanan jajanan	100 persen							
146	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa	60 sampel							
147	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	116 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase peningkatan PHBS	40 persen 100 persen 40 persen							
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	100 persen 100 persen							
148	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang berprilaku hidup bersih dan sehat	20542 KK							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	110.520.000,00	0,00	0,00	0,00	110.520.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nagari siaga aktif Jumlah nagari yang melaksanakan germas aktif Jumlah posyandu strata mandiri Pembentukan dan pembinaan posyandu remaja	35 nagari 60 persen 35 posyandu 28 posyandu							
150	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen							
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen							
151	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
152	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
153	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
155	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen							
156	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1095 Orang/bulan	77.093.637.000,00	0,00	0,00	0,00	77.093.637.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
157	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
158	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	14.327.500,00	0,00	0,00	0,00	14.327.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
159	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	23.488.000,00	0,00	0,00	0,00	23.488.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
161	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.504.200,00	0,00	0,00	0,00	13.504.200,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
162	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	26.465.000,00	0,00	0,00	0,00	26.465.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen							
163	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disipiin Pegawai									
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
164	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
165	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
166	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
167	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	100 persen							
168	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
169	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.080.000,00	13.751.000,00	0,00	0,00	55.831.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
170	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.995.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	11.195.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
171	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
172	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.999.900,00	0,00	0,00	0,00	19.999.900,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
173	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	99.998.500,00	0,00	0,00	0,00	99.998.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
174	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
175	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen							
176	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
177	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.980.822,00	0,00	0,00	0,00	74.980.822,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
178	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
179	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.676.474.400,00	0,00	0,00	0,00	3.676.474.400,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen							
180	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16.700.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
181	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
182	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
183	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	9.827.598,00	0,00	0,00	9.827.598,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
184	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan pelayanan BLUD	100 persen							
185	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	18 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
186	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	700.000.000,00	3.660.000.000,00	0,00	0,00	4.360.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelaya nan Kesehatan Rujukan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
187	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6.002.237.800,00	597.762.200,00	0,00	0,00	6.600.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Sungai Rumbai									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
188	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.048.702.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048.702.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
189	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	972.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	1.017.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Koto Besar									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
190	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	771.314.000,00	0,00	0,00	0,00	771.314.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
191	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	799.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	819.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Sungai Limau									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
192	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	958.824.000,00	0,00	0,00	0,00	958.824.000,00	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
193	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	422.886.246,00	26.000.000,00	0,00	0,00	448.886.246,00	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Koto Baru									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
194	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.110.765.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.765.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
195	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.727.476.057,00	59.000.000,00	0,00	0,00	1.786.476.057,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Tiumang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
196	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	904.496.000,00	0,00	0,00	0,00	904.496.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
197	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	476.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	496.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Padang Laweh									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
198	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	700.474.000,00	0,00	0,00	0,00	700.474.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
199	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	390.920.400,00	14.000.000,00	0,00	0,00	404.920.400,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Sitiung I									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Visite Rate	4,6 PER JUMLAH PENDUDUK							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
200	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	985.025.000,00	0,00	0,00	0,00	985.025.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Visite rate	4,6 per jumlah penduduk							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
201	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.179.664.537,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1.279.664.537,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Timpeh									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	visite rate	4,6 per satuan penduduk							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
202	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	908.970.000,00	0,00	0,00	0,00	908.970.000,00	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	VISITE RATE	4,6 per jumlah penduduk							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
203	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	557.243.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	577.243.000,00	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Gunung Medan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
204	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	722.253.000,00	0,00	0,00	0,00	722.253.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
205	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	674.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	680.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Sitiung II									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
206	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	725.745.200,00	0,00	0,00	0,00	725.745.200,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	713.804.450,00	77.700.000,00	0,00	0,00	791.504.450,00	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Beringin Sakti									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
208	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	671.691.000,00	0,00	0,00	0,00	671.691.000,00	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
209	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	314.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Silago									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
210	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	825.798.000,00	0,00	0,00	0,00	825.798.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
211	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	815.033.934,00	31.000.000,00	0,00	0,00	846.033.934,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Sungai Dareh									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
212	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.053.042.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.042.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
213	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.501.547.436,00	147.000.000,00	0,00	0,00	1.648.547.436,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Sialang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
214	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	703.308.000,00	0,00	0,00	0,00	703.308.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
215	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	555.370.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	575.370.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	54.430.200,00	0,00	0,00	0,00	54.430.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Laboratorium Kesehatan Daerah									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
217	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	252.392.000,00	0,00	0,00	0,00	252.392.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
218	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 unit 2 unit 20 unit 2 unit							
219	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan									
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
220	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
221	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
222	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit									
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
223	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	389 Orang/bulan	34.211.299.000,00	0,00	0,00	0,00	34.211.299.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
224	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	53.484.052.000,00	6.515.948.000,00	0,00	0,00	60.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	71,30 persen							
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Sungai Yang dinormalisasi/restorasi	20 KM							
225	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai									
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
226	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai									
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	29.72 KM	0,00	1.460.130.000,00	0,00	0,00	1.460.130.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Insentif Fiskal

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing									
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
228	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
229	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	53.32 KM	0,00	719.300.000,00	0,00	0,00	719.300.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
230	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	133.2 KM	0,00	1.221.750.000,00	0,00	0,00	1.221.750.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	64 persen 70 persen							
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan	1868							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50 Orang	22.528.000,00	0,00	0,00	0,00	22.528.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
232	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
233	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2 Liter/Detik	186.088.600,00	74.272.000,00	0,00	0,00	260.360.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
234	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR	399.918.000,00	0,00	0,00	0,00	399.918.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-							
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
235	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	100 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
236	1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	50 Orang	44.113.500,00	0,00	0,00	0,00	44.113.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
237	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	751 jumlah 91 persen							
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	751							
238	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan									
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	400 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
239	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja									
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	80 Rumah Tangga	159.842.600,00	0,00	0,00	0,00	159.842.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
240	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	15 Penyelenggara	37.470.750,00	0,00	0,00	0,00	37.470.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
241	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	12 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
242	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	79.601.654,00	0,00	0,00	0,00	79.601.654,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
243	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat									
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	200 Rumah Tangga	216.810.000,00	0,00	0,00	0,00	216.810.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
244	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor	75 persen 62,16 persen							
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG	40 Gedung 1 Dokumen 25 Gedung Negara 60 Dokumen							
245	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	25 Bangunan Gedung Negara	123.840.000,00	0,00	0,00	0,00	123.840.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
246	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	40 Bangunan Gedung	8.445.300.400,00	1.436.522.765,00	0,00	0,00	9.881.823.165,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
247	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
248	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	150.207.000,00	0,00	0,00	0,00	150.207.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
249	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota									
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	40 Bantuan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
250	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
252	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	60 Dokumen	513.769.000,00	0,00	0,00	0,00	513.769.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-							
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
253	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	50 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
254	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	72 53 persen							
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan Mantap Jumlah Panjang jembatan Mantap	50 13							
255	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan									
			Panjang Jalan yang Dibangun	7 KM	7.321.670.469,00	38.103.078.952,00	0,00	0,00	45.424.749.421,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan -Jalan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
256	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar									
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
257	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	1.700.491.200,00	2.050.480.000,00	0,00	0,00	3.750.971.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
258	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	21 Jembatan	1.250.001.500,00	0,00	0,00	0,00	1.250.001.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
259	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	3 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
260	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	450 KM	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-							
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-							
261	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	200 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
262	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-							
263	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	10 Badan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-							
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-							
264	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.583.800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.585.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
265	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
266	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
267	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	360.103.000,00	0,00	0,00	0,00	360.103.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	1 Tahun							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan	12 Dokumen							
268	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
269	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25.910.000,00	0,00	0,00	0,00	25.910.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
270	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tahun							
271	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	5.928.556.000,00	0,00	0,00	0,00	5.928.556.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
272	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
273	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
275	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
276	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun							
277	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.995.800,00	0,00	0,00	0,00	4.995.800,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
278	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.970.000,00	179.100.000,00	0,00	0,00	220.070.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
279	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	15.318.000,00	0,00	0,00	0,00	15.318.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
280	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
281	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.950.000,00	0,00	0,00	0,00	25.950.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
282	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
283	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	259.032.000,00	0,00	0,00	0,00	259.032.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	undefined undefined							
284	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
285	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	0,00	44.170.000,00	0,00	0,00	44.170.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
286	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan							
287	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
288	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	640.285.000,00	0,00	0,00	0,00	640.285.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
289	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
290	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.490.755.600,00	0,00	0,00	0,00	2.490.755.600,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	42 Unit							
291	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	336.150.000,00	0,00	0,00	0,00	336.150.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
292	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
293	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	31 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
294	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
295	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen							
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen							
296	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.971.000,00	0,00	0,00	0,00	2.971.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	10 orang							
297	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana									
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 Orang	1.264.500,00	0,00	0,00	0,00	1.264.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen							
298	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana									
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	53.117.250,00	0,00	0,00	0,00	53.117.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah serah terima rumah kepada korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota	1 unit							
299	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	884.500,00	0,00	0,00	0,00	884.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	jumlah rumah khusus yang difasilitasi pengelolaan kelembagaannya termasuk pemeliharaan Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun jumlah rumah susun yang difasilitasi pengelolaan kelembagaanya termasuk pemeliharaannya	1 rumah khusus 1 laporan 2 rumah susun							
300	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	137.459.550,00	0,00	0,00	0,00	137.459.550,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni Cakupan permukiman layak huni	91,45 persen 91,45 persen							
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	penyusunan perbup terkait pemakaman Jumlah dokumen hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	1 dokumen 1 dokumen							
301	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	15.655.500,00	0,00	0,00	0,00	15.655.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
302	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh									
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
303	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	68.651.500,00	0,00	0,00	0,00	68.651.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan /pemugaran	6 ha							
304	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh									
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	6 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	100 persen							
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya permukiman yang layak huni berkurangnya luas kawasan kumuh	3 ha 3 ha							
305	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	40 Unit Rumah	517.525.750,00	0,00	0,00	0,00	517.525.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,57 persen							
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Rumah Khusus yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Rumah Susun yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi 2 Lokasi							
306	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	55 Lokasi	7.357.433.206,00	0,00	0,00	0,00	7.357.433.206,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Gaji	12 bulan							
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang							
307	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.341.254.000,00	0,00	0,00	0,00	2.341.254.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang							
308	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah belanja pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan							
309	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
310	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
311	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4.100.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
312	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
313	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
314	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	74.996.000,00	0,00	0,00	0,00	74.996.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit							
315	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
316	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
317	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
318	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan							
319	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
320	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.998.500,00	0,00	0,00	0,00	24.998.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
321	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	479.987.800,00	0,00	0,00	0,00	479.987.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan							
322	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
323	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
324	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah rekomendasi tanah restan yang terbit	300 bidang							
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah yang telah terbit	300 dokumen							
326	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	10 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah bidang tanah pemda yang telah bersertifikat	100 bidang							
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	100 dokumen							
327	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara									
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	20 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-							
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
328	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia									
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	44.996.400,00	0,00	0,00	0,00	44.996.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
329	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	0 laporan	194.565.000,00	0,00	0,00	0,00	194.565.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
330	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah									
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-							
331	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	24.233.500,00	0,00	0,00	0,00	24.233.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	62.155.000,00	0,00	0,00	0,00	62.155.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									
333	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	14.993.100,00	0,00	0,00	0,00	14.993.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-							
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
334	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	52 Laporan	162.468.000,00	0,00	0,00	0,00	162.468.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
335	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-							
336	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	8.132.500,00	0,00	0,00	0,00	8.132.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-							
337	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran									
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	24.636.000,00	0,00	0,00	0,00	24.636.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-							
338	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran									
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa/Kelurahan	39.995.000,00	0,00	0,00	0,00	39.995.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-							
339	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen							
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
340	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4.390.534.000,00	0,00	0,00	0,00	4.390.534.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
341	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
342	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.993.500,00	0,00	0,00	0,00	4.993.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
343	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.009.000,00	0,00	0,00	0,00	17.009.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
344	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7.498.000,00	0,00	0,00	0,00	7.498.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
345	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
346	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
347	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.950,00	0,00	0,00	0,00	75.000.950,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
348	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
349	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
350	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
351	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	36.034.064,00	0,00	0,00	0,00	36.034.064,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.020.846.800,00	0,00	0,00	0,00	4.020.846.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
353	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
354	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
355	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen 100 Persen 2486 Orang 2486 Orang 500 Orang							
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	100 Orang							
356	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang							
357	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan									
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
358	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
359	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi									
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	35.821.000,00	0,00	0,00	0,00	35.821.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
361	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
362	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
363	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
364	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Kawasan	150.006.000,00	0,00	0,00	0,00	150.006.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
365	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	250 Orang							
366	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas									
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
367	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
368	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	41.008.000,00	0,00	0,00	0,00	41.008.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
369	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Orang	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	64.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
370	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit									
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
371	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	3 Kegiatan							
372	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
373	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
374	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
375	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan									
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
376	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	35.404.000,00	0,00	0,00	0,00	35.404.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
377	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %							
378	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	1.327.838.000,00	0,00	0,00	0,00	1.327.838.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
379	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.012.700,00	0,00	0,00	0,00	5.012.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
380	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.610.000,00	0,00	0,00	0,00	43.610.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
381	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	24.900.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.019.200,00	0,00	0,00	0,00	12.019.200,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
383	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.030.000,00	0,00	0,00	0,00	75.030.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
384	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.000.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
385	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
386	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	606.051.600,00	0,00	0,00	0,00	606.051.600,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah daerah	100 %							
387	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	105.420.000,00	0,00	0,00	0,00	105.420.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase kesejahteraan sosial	95 persen							
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	persentase KAT yang terlatih	25 persen							
389	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT									
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Bonjol	[object Object]
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persentase PSKS yang terlatih	80 persen							
390	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
391	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	60.984.150,00	0,00	0,00	0,00	60.984.150,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga	14.999.929,00	0,00	0,00	0,00	14.999.929,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen							
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen							
393	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	13.105.000,00	0,00	0,00	0,00	13.105.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
394	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.746.885,00	0,00	0,00	0,00	7.746.885,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
395	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	8.888.750,00	0,00	0,00	0,00	8.888.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
396	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
397	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	93.450.000,00	0,00	0,00	0,00	93.450.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
398	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	650 Orang	76.380.500,00	0,00	0,00	0,00	76.380.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
399	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak									
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	3.039.750,00	0,00	0,00	0,00	3.039.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
400	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	100.156.500,00	0,00	0,00	0,00	100.156.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
401	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.513.000,00	0,00	0,00	0,00	4.513.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
402	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	2.745.050,00	0,00	0,00	0,00	2.745.050,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.130.900,00	0,00	0,00	0,00	5.130.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
404	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan									
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	3.607.500,00	0,00	0,00	0,00	3.607.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-							
405	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
406	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
407	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
408	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
409	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
410	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA									
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
411	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
412	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan									
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	11.260.000,00	0,00	0,00	0,00	11.260.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
413	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	82 persen							
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	95 persen							
414	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	102.549 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
415	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25103 Keluarga	44.999.670,00	0,00	0,00	0,00	44.999.670,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
416	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Keluarga	29.411.500,00	0,00	0,00	0,00	29.411.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
417	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	24.998.980,00	0,00	0,00	0,00	24.998.980,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen							
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen							
418	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	49.935.000,00	0,00	0,00	0,00	49.935.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
419	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	8.804.950,00	0,00	0,00	0,00	8.804.950,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Unit	8.153.500,00	0,00	0,00	0,00	8.153.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
421	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	6.337.500,00	0,00	0,00	0,00	6.337.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
422	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	4.317.500,00	0,00	0,00	0,00	4.317.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-							
423	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran	100 persen							
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya keuangan perangkat daerah	14 bulan							
424	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.291.328.000,00	0,00	0,00	0,00	3.291.328.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
426	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.034.000,00	0,00	0,00	0,00	44.034.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
427	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
428	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
429	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.569.000,00	0,00	0,00	0,00	26.569.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
430	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	137.910.500,00	0,00	0,00	0,00	137.910.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit							
431	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
432	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
433	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	31.900.000,00	0,00	0,00	31.900.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen							
434	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
435	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69.993.300,00	0,00	0,00	0,00	69.993.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
436	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	827.735.800,00	0,00	0,00	0,00	827.735.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
438	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	130.525.000,00	0,00	0,00	0,00	130.525.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
439	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
440	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen							
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada layanan pemberdayaan perempuan	38 OPD							
441	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	17 Organisasi							
442	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	9.525.000,00	0,00	0,00	0,00	9.525.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
443	2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	17 Lembaga	449.994.550,00	0,00	0,00	0,00	449.994.550,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	100 persen							
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 Kegiatan							
444	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya UPTD PPA untuk layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak	100 persen							
446	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
447	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Layanan	64.910.300,00	0,00	0,00	0,00	64.910.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
448	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
449	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	8 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-							
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
450	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Perangkat Daerah	34.692.700,00	0,00	0,00	0,00	34.692.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-							
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
451	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Madya Predikat/Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-							
452	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	17 Organisasi	55.766.000,00	0,00	0,00	0,00	55.766.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	terwujudnya kabupaten layak anak	madya predikat/nilai							
453	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen							
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak	10 Kegiatan							
454	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA									
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	103.400.000,00	0,00	0,00	0,00	103.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	100 persen							
455	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
456	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK									
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 Orang	253.689.700,00	0,00	0,00	0,00	253.689.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	75 persen							
457	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/									
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 Orang	88.400.000,00	0,00	0,00	0,00	88.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	persentase data kependudukan	100 persen							
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	terbitnya jukla/juknis kegiatan	85 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
459	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	3 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
460	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan									
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	27 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
461	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	11 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
462	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-							
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-							
464	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
465	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	132 Laporan	545.600.000,00	0,00	0,00	0,00	545.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
466	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
467	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	11 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
468	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal									
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
469	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase kemampuan petugas penyuluh KB dalam menjalankan program Bangga Kencana	75 persen							
470	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1560 Orang	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
471	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB									
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	11 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB
473	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2616 Orang	857.220.000,00	0,00	0,00	0,00	857.220.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
474	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	1000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
475	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB
476	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	21 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
477	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
478	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan									
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemahaman organisasi kemasyarakatan terhadap program Bangga Kencana	90 persen							
479	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
480	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	27 Kampung	425.500.000,00	0,00	0,00	0,00	425.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-							
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-							
481	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
482	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
483	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
484	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	435 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
486	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja									
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
487	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	435.000.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
488	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	4785 laporan	478.500.000,00	0,00	0,00	0,00	478.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
		Dinas Pangan dan Perikanan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen							
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok	<10 Persen							
489	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis									
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	15.041.500,00	0,00	0,00	0,00	15.041.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
490	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan									
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan	2 Dokumen	50.079.850,00	0,00	0,00	0,00	50.079.850,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	37 Persen							
491	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Ton	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya	94 Skor							
492	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	15.002.750,00	0,00	0,00	0,00	15.002.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	30.005.000,00	0,00	0,00	0,00	30.005.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	60 Persen							
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan yang tertangani	120 KK							
494	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	169.999.300,00	0,00	0,00	0,00	169.999.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Aman yang beredar dimasyarakat	85 persen							
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan keamanan pangan segar	11 Kecamatan 11 Kecamatan							
495	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	19.987.800,00	0,00	0,00	0,00	19.987.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen							
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi Keuangan perangkat daerah	100 Persen							
496	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.072.833.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072.833.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi umum	100 Persen							
497	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
498	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.067.000,00	0,00	0,00	0,00	40.067.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
499	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
500	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
501	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
502	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	83.061.000,00	0,00	0,00	0,00	83.061.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	53.200.000,00	0,00	0,00	53.200.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan	100 Persen							
504	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
505	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.500.550,00	0,00	0,00	0,00	47.500.550,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
506	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	742.771.800,00	0,00	0,00	0,00	742.771.800,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit							
507	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	22.768.750,00	0,00	0,00	0,00	22.768.750,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
508	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	2.09.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
510	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
511	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	15 persen							
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumbuhan Kelembagaan Nelayan Kecil	5 Kelompok							
512	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Usaha Perikanan yang berkembang	40 Persen							
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan yang di dampingi	110 Kelompok							
513	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
514	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan pembudidayaan ikan	30 Persen							
515	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	624.800.300,00	0,00	0,00	0,00	624.800.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Insentif Fiskal
516	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	158.603.450,00	11.400.000,00	0,00	0,00	170.003.450,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan	25 Persen							
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan konservasi perairan umum yang aktif	3 Kawasan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.002.500,00	0,00	0,00	0,00	15.002.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang berdaya saing	15 Persen							
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dan Konsumsi	20 Persen							
518	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	20.547.000,00	0,00	0,00	0,00	20.547.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Dinas Lingkungan Hidup									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 dokumen							
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten	2 dokumen							
519	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	46.015.000,00	0,00	0,00	0,00	46.015.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
520	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2 Dokumen							
521	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD									
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya luas tutupan lahan Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).	1 Ha 1 Ha 66 Poin							
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKA) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKU) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH)	56,40 persen 49,28 persen 83,95 persen 66,00 persen							
522	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	42.103.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	57.503.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
523	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	46.897.000,00	0,00	0,00	0,00	46.897.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
524	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	26 Dokumen	77.497.015,00	0,00	0,00	0,00	77.497.015,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya penghentian pencemaran	2 titik							
525	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik	48.593.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	53.093.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Dharmasraya	7 kawasan							
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7 Kawasan							
526	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	942.917.800,00	10.500.000,00	0,00	0,00	953.417.800,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	20 usaha/kegiatan							
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	20 usaha kegiatan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	15.005.000,00	0,00	0,00	0,00	15.005.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH	15 Usaha/ Kegiatan							
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup	58 Laporan							
528	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8 Dokumen	35.371.000,00	0,00	0,00	0,00	35.371.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
529	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha	33.384.000,00	0,00	0,00	0,00	33.384.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 kelompok/ MHA							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA	1 Kelompok							
530	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH									
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00	5.001.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup	10 Kelompok							
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terlaksanan	10 Kali							
531	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
532	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup									
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	30 Orang	15.159.000,00	259.608.060,00	0,00	0,00	274.767.060,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
533	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	501.202.300,00	0,00	0,00	0,00	501.202.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan	5 sekolah							
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	5 Sekolah							
534	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	5.022.000,00	0,00	0,00	0,00	5.022.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	100 persen							
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	2 Kasus							
535	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	2 Pengaduan	15.225.000,00	0,00	0,00	0,00	15.225.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya	18 persen 16 persen							
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengurangan sampah Terlaksananya penanganan sampah	16 persen 18 persen							
536	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
537	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
538	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
539	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah									
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	19 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
540	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan									
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	18000 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
541	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	48.494.000,00	0,00	0,00	0,00	48.494.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
542	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	18000 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen							
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen							
543	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.751.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.751.906.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen							
544	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.010.400,00	0,00	0,00	0,00	5.010.400,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
545	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	45.003.000,00	0,00	0,00	0,00	45.003.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
546	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	12.001.000,00	0,00	0,00	0,00	12.001.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	21.750.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
548	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	20.323.700,00	1.500.000,00	0,00	0,00	21.823.700,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
549	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	80.860.700,00	0,00	0,00	0,00	80.860.700,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana BMD pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	1 unit							
550	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	61.500.000,00	0,00	0,00	61.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya prasarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen							
551	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
552	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	47.477.300,00	0,00	0,00	0,00	47.477.300,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
553	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
554	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.353.663.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.663.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen							
555	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
556	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	41.750.000,00	0,00	0,00	0,00	41.750.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
557	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
558	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.064.000,00	0,00	0,00	0,00	20.064.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen							
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-							
559	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10000 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
560	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-							
561	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan									
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-							
562	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12.521.000,00	0,00	0,00	0,00	12.521.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
563	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	15000 Dokumen	40.091.250,00	0,00	0,00	0,00	40.091.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
564	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-							
565	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen							
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-							
566	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil									
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	24 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-							
567	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-							
569	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen							
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-							
570	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
571	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
572	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-							
573	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12.521.000,00	0,00	0,00	0,00	12.521.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
574	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
575	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-							
576	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 Laporan	15.201.000,00	0,00	0,00	0,00	15.201.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-							
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-							
577	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
578	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
579	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
580	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
581	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3.390.278.000,00	0,00	0,00	0,00	3.390.278.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
583	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	6.832.200,00	0,00	0,00	0,00	6.832.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
584	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	297.318.000,00	0,00	0,00	0,00	297.318.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
585	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
586	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	15.530.100,00	0,00	0,00	0,00	15.530.100,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
587	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
588	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	220.948.100,00	0,00	0,00	0,00	220.948.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
589	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
590	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
591	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
592	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
593	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.580.000,00	0,00	0,00	0,00	94.580.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
594	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	338.724.000,00	0,00	0,00	0,00	338.724.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
595	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
596	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
597	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	39.330.000,00	0,00	0,00	0,00	39.330.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
598	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	215.980.344,00	0,00	0,00	215.980.344,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari	100 %							
599	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	15.200.900,00	0,00	0,00	0,00	15.200.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
600	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	17.789.000,00	0,00	0,00	0,00	17.789.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76.92 persen 100 persen							
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari							
601	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5 Dokumen	200.002.400,00	0,00	0,00	0,00	200.002.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
602	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
603	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	52 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
604	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Dokumen	99.999.900,00	0,00	0,00	0,00	99.999.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
605	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa									
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	3 Dokumen	56.181.600,00	0,00	0,00	0,00	56.181.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
606	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	52 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
607	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD									
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	104 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
608	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	90 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	90 %							
609	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
610	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
611	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
612	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
613	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
614	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.321.763.000,00	0,00	0,00	0,00	3.321.763.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
615	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
616	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.999.200,00	0,00	0,00	0,00	4.999.200,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
617	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	29.272.500,00	0,00	0,00	0,00	29.272.500,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
618	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	13.550.000,00	0,00	0,00	0,00	13.550.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
619	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	14.999.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
620	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.738.000,00	0,00	0,00	0,00	25.738.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
621	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	133.064.000,00	0,00	0,00	0,00	133.064.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
622	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
623	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	[object Object]
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
625	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
626	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	44.998.100,00	0,00	0,00	0,00	44.998.100,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
627	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	364.080.400,00	0,00	0,00	0,00	364.080.400,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
628	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
629	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	120.970.000,00	0,00	0,00	0,00	120.970.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
630	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
631	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	[object Object]
		Dinas Perhubungan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 - 20 persen							
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Pkt							
632	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	16 Pkt							
633	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	29.986.000,00	34.390.720,00	0,00	0,00	64.376.720,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
635	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	40 Unit	209.945.200,00	0,00	0,00	0,00	209.945.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Th							
636	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
637	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
638	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2500 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
639	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	145.987.400,00	0,00	0,00	0,00	145.987.400,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
640	2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
641	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	2 Keg							
642	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan ANDALALIN Kabupaten/Kota	2 Keg							
643	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Audit Inpeksi Keselamatan LLAJ	12 Bln							
644	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6 Laporan	100.001.150,00	0,00	0,00	0,00	100.001.150,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen							
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Th							
645	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
646	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
647	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
648	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
649	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
650	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
651	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bln 14 Bulan							
652	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.947.603.000,00	0,00	0,00	0,00	3.947.603.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
653	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
654	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
655	2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
656	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
657	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
658	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
659	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Th							
660	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
661	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
662	2.15.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
663	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
664	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
665	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th							
666	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
667	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	15.759.000,00	0,00	0,00	0,00	15.759.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
668	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	7.503.000,00	0,00	0,00	0,00	7.503.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
669	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.620.000,00	0,00	0,00	0,00	13.620.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
670	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	11.840.000,00	0,00	0,00	0,00	11.840.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
671	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
672	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
674	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	78.291.350,00	0,00	0,00	0,00	78.291.350,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
675	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
676	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit mebel yang disediakan Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Unit 1 Unit 3 Unit							
677	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
678	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendarsan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
679	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
680	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
681	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
682	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
683	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang disediakan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	300 Laporan 12 Laporan 1 Th 14 Laporan							
684	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
685	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.206.001.350,00	0,00	0,00	0,00	4.206.001.350,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
686	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
687	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	2.762.850.200,00	0,00	0,00	0,00	2.762.850.200,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Th							
688	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
689	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	276.187.650,00	0,00	0,00	0,00	276.187.650,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
690	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
691	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00	4.830.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
692	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
693	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
694	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	[object Object]
		Dinas Komunikasi dan Informatika									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID) Kontrak Media Kelompok informasi masyarakat Perda/Perbup tentang SPBE Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah	7 Kelompok 5 jenis 10 Media 30 Kelompok 1 Perbup 96 Unit							
695	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
696	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	500.678.700,00	0,00	0,00	0,00	500.678.700,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
697	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	20 Dokumen	28.967.500,00	0,00	0,00	0,00	28.967.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
698	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media									
			Jumlah Layanan Hubungan Media	50 Layanan	1.029.513.800,00	0,00	0,00	0,00	1.029.513.800,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
699	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan									
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
700	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik									
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	74.968.400,00	0,00	0,00	0,00	74.968.400,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96 Unit	14.995.800,00	0,00	0,00	0,00	14.995.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	20 aplikasi							
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang terkoneksi dengan mobile broadband (kawasan digital, WIFI publik) monitoring Evaluasi Menara untuk SKRD Integrasi Rumah Data Sosialisasi Aplikasi baru Jumlah Informasi yang dihasilkan GCIO dalam 1 tahun	15 Titik 130 Menara 46 Unit 20 Aplikasi 10 Jenis							
702	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
703	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
704	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik									
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
705	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah									
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %							
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang	21 orang							
706	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.814.183.330,00	0,00	0,00	0,00	2.814.183.330,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain ATK Kantor Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll	3 Jenis 8 Jenis 50 Orang 10 Jenis 50 Orang 2 Aplikasi 30 Jenis 6 Jenis							
707	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4.999.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
708	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
709	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	7.545.500,00	0,00	0,00	0,00	7.545.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
710	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
711	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.180.700,00	0,00	0,00	0,00	12.180.700,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
712	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	75.117.000,00	0,00	0,00	0,00	75.117.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2 Roda 2 Gedung Command Center th 1 Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Kendaraan Roda 4 (1 unit)	10 Unit 1 Unit 0 Unit 5 Unit 0 Unit							
713	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
714	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
715	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
716	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
717	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun	500 Materai 5 Jenis 18 Orang 40 Surat 1 Tahun							
718	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
719	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	541.887.520,00	0,00	0,00	0,00	541.887.520,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
720	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
721	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	522.249.600,00	0,00	0,00	0,00	522.249.600,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	1 Tahun							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
723	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
724	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	83.264.750,00	0,00	0,00	0,00	83.264.750,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
725	2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
726	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	90 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pendukung Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah survey dan rekomendasi BPS Jumlah nagari Statistik jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral	120 orang 6 Kecamatan 8 kegiatan 36 Nagari 5 Dokumen							
727	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
728	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi									
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
729	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral									
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	22.896.500,00	0,00	0,00	0,00	22.896.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
730	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	42 Orang	46.974.100,00	0,00	0,00	0,00	46.974.100,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	35 %							
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN Jumlah Asesment website oleh BSSN	15 aplikasi 35 Unit							
731	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
732	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah	30.124.000,00	0,00	0,00	0,00	30.124.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	60 %							
733	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	25 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	[object Object]
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	35 KSP/USP							
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
734	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	45 Unit Usaha	34.994.700,00	0,00	0,00	0,00	34.994.700,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	60 Orang							
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
735	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	60 usaha mikro							
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									
736	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	90 Unit Usaha	220.205.250,00	0,00	0,00	0,00	220.205.250,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
737	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1 Unit Usaha	49.996.700,00	0,00	0,00	0,00	49.996.700,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Insentif Fiskal
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
738	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.959.244.000,00	0,00	0,00	0,00	2.959.244.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
739	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
740	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	5.022.000,00	0,00	0,00	0,00	5.022.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
741	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	15.002.000,00	0,00	0,00	0,00	15.002.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
742	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	9.805.000,00	0,00	0,00	0,00	9.805.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
743	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.046.000,00	0,00	0,00	0,00	10.046.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
744	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.310.700,00	0,00	0,00	0,00	12.310.700,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
745	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.657.350,00	0,00	0,00	0,00	102.657.350,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
747	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
748	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	6.800.000,00	121.682.295,00	0,00	0,00	128.482.295,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
749	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
750	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	239.999.550,00	0,00	0,00	0,00	239.999.550,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
751	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
752	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	677.651.200,00	0,00	0,00	0,00	677.651.200,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
753	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
754	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
755	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
756	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	10.320.000,00	0,00	0,00	0,00	10.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
757	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	13 paket							
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
758	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	26 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
759	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 Unit	122.119.900,00	0,00	0,00	0,00	122.119.900,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	- indeks							
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									
760	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.174.500,00	0,00	0,00	0,00	30.174.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	2600 unit							
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-							
761	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	800 Unit	47.969.500,00	0,00	0,00	0,00	47.969.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
762	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	6.698.000,00	0,00	0,00	0,00	6.698.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM	257 IKM							
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
763	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	40 Dokumen	11.747.000,00	0,00	0,00	0,00	11.747.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
764	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	70 Dokumen	171.212.550,00	0,00	0,00	0,00	171.212.550,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	70 persen							
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									
765	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	70 Dokumen	7.288.000,00	0,00	0,00	0,00	7.288.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan Investasi	4 dokumen							
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi yang dapat mendorong daya saing penanaman modal	2 dokumen							
766	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan							
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	4 kegiatan							
767	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	375.056.250,00	0,00	0,00	0,00	375.056.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
768	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 persen							
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
769	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	70.018.000,00	0,00	0,00	0,00	70.018.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
770	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	39.999.650,00	0,00	0,00	0,00	39.999.650,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
771	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1 Kegiatan Usaha.	87.013.000,00	0,00	0,00	0,00	87.013.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
772	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	319.052.000,00	0,00	0,00	0,00	319.052.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
773	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal									
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1 Kegiatan Usaha	174.027.000,00	0,00	0,00	0,00	174.027.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
774	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2.308.339.000,00	0,00	0,00	0,00	2.308.339.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
775	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.455.250,00	0,00	0,00	0,00	5.455.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
776	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.775.000,00	0,00	0,00	0,00	44.775.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
777	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.115.500,00	0,00	0,00	0,00	17.115.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
778	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.999.000,00	0,00	0,00	0,00	26.999.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
779	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.696.500,00	0,00	0,00	0,00	36.696.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
780	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	137.950.000,00	0,00	0,00	0,00	137.950.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
781	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
782	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	242.725.000,00	0,00	0,00	242.725.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
783	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
784	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.415.500,00	0,00	0,00	0,00	105.415.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.660.000,00	0,00	0,00	0,00	15.660.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
786	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	440.015.000,00	0,00	0,00	0,00	440.015.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
787	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
788	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
789	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
790	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	53.771.040,00	0,00	0,00	53.771.040,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi	253 Organisasi							
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan Tingkat Kabupaten	2 Kegiatan							
791	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor									
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	80 Orang	10.328.000,00	0,00	0,00	0,00	10.328.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
792	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	5 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	32 Cabor							
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten yang Terpelihara	6 Lokasi							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 Unit	879.993.063,00	0,00	0,00	0,00	879.993.063,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan dalam Event Daerah dan Multi Event	5 Event							
794	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan									
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	50 Orang	327.277.000,00	0,00	0,00	0,00	327.277.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksnanya Pengembangan dan Pembinaan Inorga	11 Inorga							
795	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi									
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	393.134.350,00	0,00	0,00	0,00	393.134.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi	353 Organisasi							
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Aktif	11 Kawasan							
796	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	35 Orang	130.441.000,00	0,00	0,00	0,00	130.441.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah	36 Unit							
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Gadang yang dibangun dan Rehab	36 Unit							
797	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	36 Objek	5.935.920.330,00	0,00	0,00	0,00	5.935.920.330,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang Aktif	90 Persentase							
798	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat									
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	522.321.000,00	0,00	0,00	0,00	522.321.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan	45 Sanggar							
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Daerah yang dilestarikan Jumlah Festival Daerah yang dilaksanakan Jumlah Group Kesenian Darah yang dibina	18 Jenis 5 Jenis 46 Group							
799	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	36 Orang	50.006.650,00	0,00	0,00	0,00	50.006.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
800	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional									
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	2.863.627.678,00	0,00	0,00	0,00	2.863.627.678,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-							
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
801	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-							
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-							
802	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	68.973.000,00	0,00	0,00	0,00	68.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun							
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran gaji, Tunjangan dan Honorarium Tahun 2024	1 Tahun							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	3.140.204.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.204.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
804	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
805	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
806	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.503.000,00	0,00	0,00	0,00	7.503.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
807	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
808	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.999.900,00	0,00	0,00	0,00	9.999.900,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
809	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.013.350,00	0,00	0,00	0,00	80.013.350,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
810	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
811	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	145.407.100,00	0,00	0,00	0,00	145.407.100,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
812	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.160.000,00	0,00	0,00	0,00	10.160.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
813	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	643.128.000,00	0,00	0,00	0,00	643.128.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpiliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan							
814	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
815	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
816	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
817	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	23 Kelompok Sadar Wisat							
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga pada Daya Tarik Pariwisata yang Bina	23 Kelompok Sadar Wisat							
818	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	18.376.000,00	0,00	0,00	0,00	18.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	1 Tahun							
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	2 Rakor							
819	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	115.981.000,00	0,00	0,00	0,00	115.981.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Peserta Pelatihan Songket	15 Orang							
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peserta Pelatihan Songket	15 Orang							
820	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	265.608.000,00	0,00	0,00	0,00	265.608.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
821	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
822	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen							
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	2 Perpustakaan							
823	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	30 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
824	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	39.884.800,00	0,00	0,00	0,00	39.884.800,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
825	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
826	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
827	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
828	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	375 Layanan	59.995.250,00	0,00	0,00	0,00	59.995.250,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
829	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka									
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1000 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
830	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka									
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10000 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
831	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	60 Orang							
832	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
833	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
834	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	30.110.000,00	0,00	0,00	0,00	30.110.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
835	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilestarikan Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya	100 persen 3 Koleksi dan Naskah Kuno							
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	2 Naska kuno							
836	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan									
			Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	8 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2 Item							
837	2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	2 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen							
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	7 Dokumen							
838	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun							
839	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.894.115.000,00	0,00	0,00	0,00	2.894.115.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen							
840	2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
841	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen							
842	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
843	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
844	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.805.900,00	0,00	0,00	0,00	15.805.900,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
845	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.764.000,00	0,00	0,00	0,00	45.764.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
846	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	26.057.000,00	0,00	0,00	0,00	26.057.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
847	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.758.000,00	0,00	0,00	0,00	21.758.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
848	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.720.000,00	0,00	0,00	0,00	13.720.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
849	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.480.600,00	0,00	0,00	0,00	99.480.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
850	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 unit/set							
851	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
852	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
853	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	44.350.000,00	0,00	0,00	44.350.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
854	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	[object Object]
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan							
855	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
856	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
857	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	318.091.200,00	0,00	0,00	0,00	318.091.200,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 unit							
858	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
859	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	58.120.000,00	0,00	0,00	0,00	58.120.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
860	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	16.980.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
861	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	199.980.000,00	0,00	0,00	0,00	199.980.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	100 persen							
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Arsip Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja dan Alat Bukti yang Sah	1 Dokumen							
862	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	30 Berkas	88.277.000,00	0,00	0,00	0,00	88.277.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
863	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	120 Berkas	32.726.000,00	0,00	0,00	0,00	32.726.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
864	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Laporan	43.029.000,00	0,00	0,00	0,00	43.029.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan informasi arsip Dinamis dan statis secara nasional	1 Layanan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
865	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	15.940.000,00	0,00	0,00	0,00	15.940.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	100 persen 100 persen							
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1 Dokumen							
866	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
		Dinas Pertanian									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %							
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10 %							
867	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20 Laporan	23.525.000,00	0,00	0,00	0,00	23.525.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura	10 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
868	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	2.169.480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.169.480.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal
869	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman									
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	242.520.450,00	0,00	0,00	0,00	242.520.450,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
870	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan									
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan angka kelahiran ternak di UPT Perbibitan dan HPT	10 %							
871	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	19.004.000,00	0,00	0,00	0,00	19.004.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan populasi ternak	10 %							
872	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	153 Dosis	1.500.753.250,00	0,00	0,00	0,00	1.500.753.250,00	[object Object]	Insentif Fiskal
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %							
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	1 Dok							
873	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	18 Unit							
874	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16 Unit	2.005.690.400,00	0,00	0,00	0,00	2.005.690.400,00	[object Object]	Insentif Fiskal
875	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	196.268.000,00	0,00	0,00	0,00	196.268.000,00	[object Object]	Insentif Fiskal
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %							
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan	100 %							
876	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	11 Laporan	55.297.050,00	0,00	0,00	0,00	55.297.050,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan kesehatan hewan	100 %							
877	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian	100 %							
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah area asuransi usaha tani yang mendapat subsidi	11 Kecamatan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
878	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian	75 %							
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian	75 %							
879	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	76.900.400,00	0,00	0,00	0,00	76.900.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
880	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	11 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
881	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	252.071.600,00	0,00	0,00	0,00	252.071.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %							
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium ASN	12 Bulan							
882	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	13.155.860.000,00	0,00	0,00	0,00	13.155.860.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan							
883	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	6.024.000,00	0,00	0,00	0,00	6.024.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
884	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	53.696.000,00	0,00	0,00	0,00	53.696.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
885	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	12.232.000,00	0,00	0,00	0,00	12.232.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
886	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	33.592.000,00	0,00	0,00	0,00	33.592.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
887	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	30.750.000,00	0,00	0,00	0,00	30.750.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
888	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	234.451.400,00	0,00	0,00	0,00	234.451.400,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi	5 Unit							
889	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran	12 Bulan							
890	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
891	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.228.650,00	0,00	0,00	0,00	129.228.650,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
892	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Laporan	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
893	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.529.190.600,00	0,00	0,00	0,00	1.529.190.600,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	139 Unit							
894	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
895	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	138 Unit	299.520.000,00	0,00	0,00	0,00	299.520.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke Perencanaan Tenaga Kerja	0 dokumen							
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0 Dokumen							
896	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro									
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	41.120.950,00	0,00	0,00	0,00	41.120.950,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja	78,92 persen							
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	18 Paket Pelatihan							
897	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang	51.466.000,00	0,00	0,00	0,00	51.466.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	29,32 persen							
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia	600 Lowongan							
898	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	90 Orang	53.740.000,00	0,00	0,00	0,00	53.740.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
899	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di Sisnaker	1 Keg							
900	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	50.841.000,00	0,00	0,00	0,00	50.841.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	85 persen							
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama	3 PP/PKB							
901	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 Laporan	960.960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.960.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang Terselesaikan	40 kasus							
902	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	48.843.700,00	0,00	0,00	0,00	48.843.700,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
903	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	42.034.000,00	0,00	0,00	0,00	42.034.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
	3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen							
	3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 dokumen							
904	3.32.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Honorarium, Gaji, dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	14 Bulan							
905	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.239.337.000,00	0,00	0,00	0,00	4.239.337.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
906	3.32.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.031.900,00	0,00	0,00	0,00	5.031.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
907	3.32.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	34.412.000,00	0,00	0,00	0,00	34.412.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
908	3.32.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	16.510.000,00	0,00	0,00	0,00	16.510.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
909	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	10.048.000,00	0,00	0,00	0,00	10.048.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
910	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	139.901.000,00	0,00	0,00	0,00	139.901.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	19 Unit							
911	3.32.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	5.700.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
912	3.32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	62.250.000,00	0,00	0,00	62.250.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
913	3.32.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terlaksana Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan 12 Bulan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
914	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.995.500,00	0,00	0,00	0,00	57.995.500,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
915	3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	439.553.200,00	0,00	0,00	0,00	439.553.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	43 Unit							
916	3.32.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
917	3.32.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
918	3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	8.270.000,00	0,00	0,00	0,00	8.270.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
919	3.32.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Sekretariat Daerah									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	100 Persen 20 indeks							
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Nilai LPPD Terfasilitasinya Kegiatan PATEN, Kompetensi Camat Berprestasi, HUT KAB/HUT RI, Rakor Pemerintah Tk. Kab/Prov, TOPONIMI, Batas Daerah dan Batas Nagari, Penamaan Rupabumi, LKPj, LPPD, EPPD, SPM dan Koord. Proses Pengusulan, Pengankatan dan Pemberhantian KDH/WKDH, Pengusulan izin dan cuti KDH/WKDH	2,92 sedang 3,40 sedang 15 dokumen							
920	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	85.272.000,00	0,00	0,00	0,00	85.272.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
921	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	150.123.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	157.623.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
922	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	104.495.200,00	0,00	0,00	0,00	104.495.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan, Safari Ramadhan, Haji,PHBI,MTQ Tk Kab/Prov, Operasional Masjid Agung, Hibanh Uang dan Rakor	7 Kegiatan							
923	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	7.345.931.000,00	0,00	0,00	0,00	7.345.931.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
924	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
925	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indek kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi hukum, penyelesaian permasalahan hukum dan penyuluhan hukum	87 %							
926	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	460 Dokumen	414.424.600,00	0,00	0,00	0,00	414.424.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
927	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	177.406.700,00	0,00	0,00	0,00	177.406.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
928	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	61.406.500,00	0,00	0,00	0,00	61.406.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Kerja Sama Jumlah MoU yang di tanda tangani	1 Kegiatan 10 dokumen							
929	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	52.689.900,00	0,00	0,00	0,00	52.689.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-							
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-							
930	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
931	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
932	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	34 Dokumen	293.575.250,00	0,00	0,00	0,00	293.575.250,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-							
933	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	54.663.000,00	0,00	0,00	0,00	54.663.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
934	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	51.505.900,00	0,00	0,00	0,00	51.505.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
935	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	63.829.000,00	0,00	0,00	0,00	63.829.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-							
936	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	186.623.250,00	0,00	0,00	0,00	186.623.250,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
937	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	161.941.000,00	0,00	0,00	0,00	161.941.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
938	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	38.265.000,00	0,00	0,00	0,00	38.265.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-							
939	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	26.425.400,00	0,00	0,00	0,00	26.425.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
940	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
941	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	9.439.020.000,00	0,00	0,00	0,00	9.439.020.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
942	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
943	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.040.000,00	0,00	0,00	0,00	125.040.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
944	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	177.912.000,00	0,00	0,00	0,00	177.912.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
945	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	113.515.000,00	0,00	0,00	0,00	113.515.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
946	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.019.856.000,00	0,00	0,00	0,00	1.019.856.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
947	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55.660.000,00	0,00	0,00	0,00	55.660.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
948	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.400.938.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.938.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telaksananya pengadaan barang milik daerah	5 paket,unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
949	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
950	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
951	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73 Unit	110.900.000,00	355.500.000,00	0,00	0,00	466.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
952	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	2.899.708.440,00	0,00	0,00	2.899.708.440,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
953	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
954	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.445.018.664,00	0,00	0,00	0,00	1.445.018.664,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
955	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.502.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
956	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.264.892.600,00	0,00	0,00	0,00	4.264.892.600,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
957	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	245.455.000,00	0,00	0,00	0,00	245.455.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
958	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	1.020.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
959	4.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
960	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	130 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
961	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	298 Unit	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00	70.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
962	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-							
963	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	220.892.000,00	0,00	0,00	0,00	220.892.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
964	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	282.500.000,00	0,00	0,00	0,00	282.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
965	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
966	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
967	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	421.489.000,00	0,00	0,00	0,00	421.489.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai SAKIP Jumlah Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (LAKIP,PK,Rencana Aksi,Cascading, Pohon Kinerja,RTL SAKIP Jumlah OPD yang terlibat dalam pencapaian Reformasi Birokrasi General Jumlah OPD yang mendapat pembinaan Penerapan SAKIP	76 baik 195 dokumen 7 OPD 38 OPD							
968	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
969	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	50.000.250,00	0,00	0,00	0,00	50.000.250,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
970	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	74.999.150,00	0,00	0,00	0,00	74.999.150,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terhadap Pelayanan Keprotokolan	8,5 Indeks							
971	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	2.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat DPRD									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02	SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-							
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-							
972	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5.169.145.000,00	0,00	0,00	0,00	5.169.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
973	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	390.600.000,00	0,00	0,00	0,00	390.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-							
974	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	818.948.000,00	0,00	0,00	0,00	818.948.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
975	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	818.948.000,00	0,00	0,00	0,00	818.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
976	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	677.464.500,00	0,00	0,00	0,00	677.464.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
977	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	677.464.500,00	0,00	0,00	0,00	677.464.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
978	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	677.464.500,00	0,00	0,00	0,00	677.464.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-							
979	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	370.367.000,00	0,00	0,00	0,00	370.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
980	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.097.928.000,00	0,00	0,00	0,00	2.097.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
981	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
982	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
983	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
984	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	959.760.000,00	0,00	0,00	0,00	959.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-							
985	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	9.007.145.850,00	0,00	0,00	0,00	9.007.145.850,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
986	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	30 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
987	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 Dokumen	564.330.000,00	0,00	0,00	0,00	564.330.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-							
988	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD									
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
989	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-							
990	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah									
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
991	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi									
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-							
992	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
993	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD									
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	35 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
994	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
995	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	145 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
996	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
997	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.766.055.066,00	0,00	0,00	0,00	2.766.055.066,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
998	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
999	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
1000	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1001	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1002	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1003	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
1004	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
1005	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1006	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.941.750,00	0,00	0,00	0,00	51.941.750,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1007	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	542.521.000,00	0,00	0,00	0,00	542.521.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1008	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	176.593.000,00	0,00	0,00	0,00	176.593.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1009	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	473.150.000,00	0,00	0,00	0,00	473.150.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1010	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	372.709.200,00	0,00	0,00	0,00	372.709.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1011	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1012	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1013	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1014	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	306.106.000,00	0,00	0,00	0,00	306.106.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1015	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1016	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
1017	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0,00	144.600.000,00	0,00	0,00	144.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1018	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1019	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1020	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	337.664.840,00	0,00	0,00	0,00	337.664.840,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1021	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1022	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.319.554.000,00	0,00	0,00	0,00	1.319.554.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1023	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1024	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1025	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	182.710.000,00	0,00	0,00	0,00	182.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1026	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	838.113.565,00	28.000.000,00	0,00	0,00	866.113.565,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1027	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-							
1028	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	11.828.541.016,00	0,00	0,00	0,00	11.828.541.016,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1029	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	701.000.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1030	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1031	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
1032	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	[object Object]
1033	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan	213.175.000,00	0,00	0,00	0,00	213.175.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1034	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.01	PERENCANAAN									
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD Persntase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	95 persen 90 persen 95 persen							
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan RKPD sesuai tatacara dan tahapan yang berlaku	2 dokumen							
1035	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	114.322.000,00	0,00	0,00	0,00	114.322.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1036	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	589.884.850,00	0,00	0,00	0,00	589.884.850,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan yang berkualitas	37 OPD							
1037	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	25.708.200,00	0,00	0,00	0,00	25.708.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaaan rencana pembangunan daerah	37 OPD 37 OPD 37 OPD							
1038	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
			0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
1039	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	20.823.000,00	0,00	0,00	0,00	20.823.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian hasil Renja PD Persentase pencapaian hasil Renstra PD	90 persen 90 persen							
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 persen							
1040	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	52.195.500,00	0,00	0,00	0,00	52.195.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1041	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	122.804.500,00	0,00	0,00	0,00	122.804.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	95 persen							
1042	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	24.997.500,00	0,00	0,00	0,00	24.997.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1043	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 persen							
1044	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1045	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	86.181.250,00	0,00	0,00	0,00	86.181.250,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen							
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran keuangan PD peembayaran gaji dan tunjangan asn	100 persen 1 tahun							
1046	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.940.332.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.332.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen							
1047	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7.037.000,00	0,00	0,00	0,00	7.037.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1048	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.618.000,00	0,00	0,00	0,00	27.618.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1049	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1050	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1051	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	13.334.900,00	0,00	0,00	0,00	13.334.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1052	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	104.542.850,00	0,00	0,00	0,00	104.542.850,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1053	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	49.125.000,00	0,00	0,00	49.125.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen							
1054	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1055	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.550.000,00	0,00	0,00	0,00	111.550.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1056	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.770.000,00	0,00	0,00	0,00	14.770.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1057	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	372.684.800,00	0,00	0,00	0,00	372.684.800,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen							
1058	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1059	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	70 indeks							
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	45 persen							
1060	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan									
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	137.325.000,00	0,00	0,00	0,00	137.325.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1061	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	118.203.100,00	0,00	0,00	0,00	118.203.100,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan	70 inovasi							
1062	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	69.471.900,00	0,00	0,00	0,00	69.471.900,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Badan Keuangan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen							
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen							
1063	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	239.965.000,00	0,00	0,00	0,00	239.965.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1064	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	248.245.000,00	0,00	0,00	0,00	248.245.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1065	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1066	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1067	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1068	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1069	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	305.710.000,00	0,00	0,00	0,00	305.710.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1070	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	961.608.000,00	0,00	0,00	0,00	961.608.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1071	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	350.684.000,00	0,00	0,00	0,00	350.684.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase penyerapan anggaran	95 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1072	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1073	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	114 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1074	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	69 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1075	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1076	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	54.525.300,00	0,00	0,00	0,00	54.525.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1077	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1078	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1079	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	474.813.350,00	0,00	0,00	0,00	474.813.350,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) LKPD tepat waktu	WTP Nilai 100 persen							
1080	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	648 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1081	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	648 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1082	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	50.671.000,00	0,00	0,00	0,00	50.671.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1083	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	54 Laporan	105.394.000,00	0,00	0,00	0,00	105.394.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1084	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	163.813.950,00	0,00	0,00	0,00	163.813.950,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1085	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1086	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	10.117.750,00	0,00	0,00	0,00	10.117.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1087	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1088	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1089	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1090	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1091	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota									
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	16 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1092	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai							
1093	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1094	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1095	5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1096	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi									
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1097	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	1.110.000.000,00	0,00	0,00	111.881.943.200,00	112.991.943.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1098	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1099	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	100 Persen							
1100	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	22.530.000,00	0,00	0,00	0,00	22.530.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1101	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	67.928.500,00	0,00	0,00	0,00	67.928.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 Persen 81 persen							
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga									
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1103	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1104	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	69.299.000,00	0,00	0,00	0,00	69.299.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1105	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1106	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	101.024.000,00	0,00	0,00	0,00	101.024.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1107	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	51.406.000,00	0,00	0,00	0,00	51.406.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1108	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1109	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1110	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1111	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	128.059.500,00	0,00	0,00	0,00	128.059.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1112	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	38 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1113	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1114	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase peningkatan PAD Persentase Pertumbuhan PAD	2.80 Persen 2,5 persen							
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase realisasi PAD Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2.80 Persen							
1115	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1116	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen	250.877.500,00	0,00	0,00	0,00	250.877.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1117	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1118	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1119	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan	59.217.000,00	0,00	0,00	0,00	59.217.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1120	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1121	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	85000 Obyek Pajak	231.661.000,00	0,00	0,00	0,00	231.661.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1122	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	550 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1123	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	177.214.000,00	0,00	0,00	0,00	177.214.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1124	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1125	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1126	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7 Dokumen	48.425.000,00	0,00	0,00	0,00	48.425.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1127	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1128	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai							
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah nilai AKIP BKD	BB Nilai							
1129	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1130	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1131	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai							
1132	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	7.083.895.500,00	0,00	0,00	0,00	7.083.895.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1133	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1134	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP BKD	BB Nilai							
1135	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai							
1136	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1137	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1138	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1139	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai							
1140	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1141	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	132.990.000,00	0,00	0,00	0,00	132.990.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1142	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	45.023.500,00	0,00	0,00	0,00	45.023.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1143	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	55.290.000,00	0,00	0,00	0,00	55.290.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1144	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	140.910.900,00	0,00	0,00	0,00	140.910.900,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1145	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1146	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	174.999.500,00	0,00	0,00	0,00	174.999.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1147	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai							
1148	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1149	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1150	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1151	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai							
1152	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1153	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	291.600.000,00	0,00	0,00	0,00	291.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1154	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39.994.400,00	0,00	0,00	0,00	39.994.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1155	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	496.949.600,00	0,00	0,00	0,00	496.949.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai							
1156	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1157	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	135.350.000,00	0,00	0,00	0,00	135.350.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1158	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1159	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1160	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya Kepegawaian Daerah	2746 indeks							
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-							
1161	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1162	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	21.973.000,00	0,00	0,00	0,00	21.973.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1163	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	120 Dokumen	8.070.000,00	0,00	0,00	0,00	8.070.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1164	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12.505.000,00	0,00	0,00	0,00	12.505.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1165	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	9.994.000,00	0,00	0,00	0,00	9.994.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-							
1166	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	270 Dokumen	5.007.000,00	0,00	0,00	0,00	5.007.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1167	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-							
1168	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN									
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	28.748.000,00	0,00	0,00	0,00	28.748.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1169	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	320 Dokumen	106.750.000,00	0,00	0,00	0,00	106.750.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1170	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 Dokumen	959.772.000,00	0,00	0,00	0,00	959.772.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1171	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-							
1172	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1173	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	161.474.000,00	0,00	0,00	0,00	161.474.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1174	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	9.998.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1175	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	14.993.000,00	0,00	0,00	0,00	14.993.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1176	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.856.146.000,00	0,00	0,00	0,00	3.856.146.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1177	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.994.000,00	0,00	0,00	0,00	3.994.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1178	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1179	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.498.000,00	0,00	0,00	0,00	7.498.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1180	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	15.010.000,00	0,00	0,00	0,00	15.010.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1181	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.200,00	0,00	0,00	0,00	15.000.200,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1182	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	89.998.000,00	0,00	0,00	0,00	89.998.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1183	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
1184	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
1185	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1186	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1187	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1188	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.840.496,00	0,00	0,00	0,00	50.840.496,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1189	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
1190	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	229.658.400,00	0,00	0,00	0,00	229.658.400,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1191	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1192	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1193	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1194	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	[object Object]
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-							
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-							
1195	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1196	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	105 Laporan	590.221.000,00	0,00	0,00	0,00	590.221.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Inspektorat Kabupaten									
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-							
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-							
1197	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	115.930.000,00	0,00	0,00	0,00	115.930.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1198	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30 Laporan	234.985.850,00	0,00	0,00	0,00	234.985.850,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1199	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	202.645.000,00	0,00	0,00	0,00	202.645.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1200	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	104.040.000,00	0,00	0,00	0,00	104.040.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1201	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	240.237.100,00	0,00	0,00	0,00	240.237.100,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1202	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	205.460.000,00	0,00	0,00	0,00	205.460.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1203	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dokumen	122.511.300,00	0,00	0,00	0,00	122.511.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-							
1204	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	143.080.750,00	0,00	0,00	0,00	143.080.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-							
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-							
1205	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	115.188.000,00	0,00	0,00	0,00	115.188.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1206	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	423.775.300,00	0,00	0,00	0,00	423.775.300,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1207	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	164.385.700,00	0,00	0,00	0,00	164.385.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1208	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	315.169.000,00	0,00	0,00	0,00	315.169.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1209	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	64.761.000,00	0,00	0,00	0,00	64.761.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1210	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.832.783.000,00	0,00	0,00	0,00	4.832.783.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1211	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	663.460.600,00	0,00	0,00	0,00	663.460.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1212	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.777.000,00	0,00	0,00	0,00	12.777.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1213	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	66.882.000,00	0,00	0,00	0,00	66.882.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1214	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.484.600,00	55.000.000,00	0,00	0,00	65.484.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1215	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1216	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.995.000,00	0,00	0,00	0,00	19.995.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1217	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1218	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	413.168.000,00	0,00	0,00	0,00	413.168.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1219	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1220	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	4.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	49.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1221	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	156.225.000,00	0,00	0,00	156.225.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1222	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1223	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.500.000,00	0,00	0,00	0,00	109.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1224	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.930.000,00	0,00	0,00	0,00	14.930.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1225	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	319.173.000,00	0,00	0,00	0,00	319.173.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1226	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1227	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1228	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	940.440.000,00	0,00	0,00	940.440.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan Pulau Punjung									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							
1229	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 tahun Dokumen	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1230	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 tahun Laporan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-							
1231	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 tahun Lembaga K emasyaraka tan	15.015.000,00	34.100.000,00	0,00	0,00	49.115.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1232	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 bulan Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1233	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 bulan Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-							
1234	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	12 bulan Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-							
1235	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-							
1236	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 tahun Laporan	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1237	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 tahun Dokumen	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1238	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1239	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang Orang/bulan	2.321.797.000,00	0,00	0,00	0,00	2.321.797.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1240	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1.991.000,00	0,00	0,00	0,00	1.991.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1241	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	16.828.000,00	0,00	0,00	0,00	16.828.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1242	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket	6.636.000,00	0,00	0,00	0,00	6.636.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1243	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1244	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun Paket	11.590.000,00	0,00	0,00	0,00	11.590.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1245	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Laporan	42.320.950,00	0,00	0,00	0,00	42.320.950,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1246	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
1247	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
1248	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1249	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1250	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1251	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1252	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan	188.422.000,00	0,00	0,00	0,00	188.422.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1253	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1254	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1255	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
1256	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Kecamatan Sitiung									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-							
1257	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	17.337.500,00	0,00	0,00	0,00	17.337.500,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-							
	7.01.04.7.04	[object Object]	-	-							
1258	7.01.04.7.04.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1259	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	13.830.000,00	0,00	0,00	0,00	13.830.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1260	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.674.683.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674.683.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1261	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.368.500,00	0,00	0,00	0,00	2.368.500,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1262	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.914.000,00	0,00	0,00	0,00	10.914.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1263	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	55.130.000,00	0,00	0,00	0,00	55.130.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1264	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1265	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.781.100,00	0,00	0,00	0,00	7.781.100,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1266	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	69.014.500,00	0,00	0,00	0,00	69.014.500,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1267	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	[object Object]
1268	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	[object Object]
1269	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.900.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1270	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1271	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.670.000,00	0,00	0,00	0,00	8.670.000,00	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1272	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	104.989.200,00	0,00	0,00	0,00	104.989.200,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Koto Baru									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen							
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis							
1273	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	[object Object]
1274	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.455.000,00	0,00	0,00	0,00	3.455.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten	45 Usulan							
1275	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	13.344.900,00	0,00	0,00	0,00	13.344.900,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	3 Kasus							
1276	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	3.455.000,00	0,00	0,00	0,00	3.455.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52 kasus							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis							
1277	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	6.745.000,00	0,00	0,00	0,00	6.745.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1278	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	[object Object]
1279	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	1 Tahun							
1280	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.827.018.000,00	0,00	0,00	0,00	1.827.018.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 event							
1281	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	[object Object]
1282	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun							
1283	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1284	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1285	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1286	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	31.050.000,00	0,00	0,00	0,00	31.050.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1287	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1288	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	[object Object]
1289	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	[object Object]
1290	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	118.411.000,00	0,00	0,00	0,00	118.411.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis							
1291	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1292	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1293	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1294	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 Persen							
1295	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1296	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.998.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1297	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	297.854.800,00	0,00	0,00	0,00	297.854.800,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	3 Jenis							
1298	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1299	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1300	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1301	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	[object Object]
		Kecamatan Sungai Rumbai									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen							
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis							
1302	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1303	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	550 Laporan	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis							
1304	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	13.860.000,00	0,00	0,00	0,00	13.860.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100 persen 100 persen							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 Kasus							
1305	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	100 Persen 100 Persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis							
1306	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	3.035.000,00	0,00	0,00	0,00	3.035.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	15 orang							
1307	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.596.282.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.282.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 ivent							
1308	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1309	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun							
1310	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	534.000,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1311	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.365.000,00	0,00	0,00	0,00	7.365.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1312	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.475.000,00	0,00	0,00	0,00	3.475.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1313	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.716.000,00	0,00	0,00	0,00	25.716.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1314	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.387.800,00	0,00	0,00	0,00	4.387.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1315	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1316	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1317	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	72.126.000,00	0,00	0,00	0,00	72.126.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis							
1318	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1319	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1320	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun							
1321	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1322	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.780.000,00	0,00	0,00	0,00	15.780.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1323	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1324	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	113.927.400,00	0,00	0,00	0,00	113.927.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	3 Jenis							
1325	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1326	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1327	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1328	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Kecamatan Sembilan Koto									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							
1329	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1330	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	600 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1331	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-							
1332	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1333	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1334	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1335	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.214.419.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214.419.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1336	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.022.500,00	0,00	0,00	0,00	2.022.500,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1337	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.506.000,00	0,00	0,00	0,00	12.506.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1338	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.572.000,00	0,00	0,00	0,00	6.572.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1339	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	25.763.000,00	0,00	0,00	0,00	25.763.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1340	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	11.560.000,00	0,00	0,00	0,00	11.560.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1341	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	[object Object]
1342	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	75.643.500,00	0,00	0,00	0,00	75.643.500,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1343	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	[object Object]
1344	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 jenis Unit	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1345	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1346	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 lembar Laporan	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1347	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	5.046.000,00	0,00	0,00	0,00	5.046.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1348	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	[object Object]
1349	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	145.363.800,00	0,00	0,00	0,00	145.363.800,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1350	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1351	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1352	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1353	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	99.970.200,00	0,00	0,00	99.970.200,00	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kecamatan Timpeh									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-							
1354	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.579.950,00	0,00	0,00	0,00	24.579.950,00	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1355	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	47.540.000,00	0,00	0,00	0,00	47.540.000,00	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1356	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.493.227.800,00	0,00	0,00	0,00	1.493.227.800,00	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1357	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.032.200,00	0,00	0,00	0,00	30.032.200,00	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1358	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	149.643.600,00	0,00	0,00	0,00	149.643.600,00	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1359	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			0	0 0	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH
		Kecamatan Koto Salak									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan	100 persen							
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	10 Jenis							
1360	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1361	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-							
1362	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	100 persen							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 Kasus							
1363	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	100 persen 100 persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1364	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan asn dan pembayaran tambahan penghasilan	1 Tahun							
1365	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.350.733.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.733.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
1366	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1367	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen							
1368	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1369	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.229.000,00	0,00	0,00	0,00	10.229.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1370	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.746.000,00	0,00	0,00	0,00	5.746.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1371	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1372	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	7.594.600,00	0,00	0,00	0,00	7.594.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1373	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1374	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	58.438.500,00	0,00	0,00	0,00	58.438.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis							
1375	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1376	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1377	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen							
1378	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1379	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.002.500,00	0,00	0,00	0,00	5.002.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1380	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.025.600,00	0,00	0,00	0,00	137.025.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dilakukan Pemeliharaan	5 Jenis							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1381	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1382	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1383	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1384	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Kecamatan Asam Jujuhan									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							
1385	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	12.058.000,00	0,00	0,00	0,00	12.058.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1386	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-							
1387	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.180.000,00	0,00	0,00	0,00	9.180.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1388	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1389	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	978.348.000,00	0,00	0,00	0,00	978.348.000,00	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1390	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.134.400,00	0,00	0,00	0,00	2.134.400,00	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1391	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.698.000,00	0,00	0,00	0,00	12.698.000,00	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1392	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.341.000,00	0,00	0,00	0,00	5.341.000,00	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1393	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	37.132.000,00	0,00	0,00	0,00	37.132.000,00	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1394	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	7.948.600,00	0,00	0,00	0,00	7.948.600,00	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1395	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	67.620.000,00	0,00	0,00	0,00	67.620.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1396	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined	undefined undefined							
1397	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1398	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1399	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1400	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	166.422.000,00	0,00	0,00	0,00	166.422.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1401	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1402	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Kecamatan Koto Besar									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen							
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis							
1403	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	8 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1404	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1405	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.275.000,00	0,00	0,00	0,00	9.275.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-							
1406	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis							
1407	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7.720.000,00	0,00	0,00	0,00	7.720.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan							
1408	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.850.362.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.362.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Paskibra HUTKEMRI dan Diklat Pegawai	2 Peristiwa							
1409	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	[object Object]
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun							
1410	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1411	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.848.800,00	0,00	0,00	0,00	9.848.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1412	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1413	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.687.000,00	0,00	0,00	0,00	22.687.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1414	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.294.100,00	0,00	0,00	0,00	7.294.100,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1415	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	67.515.900,00	0,00	0,00	0,00	67.515.900,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	1 Tahun							
1416	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	[object Object]
1417	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	141 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	[object Object]
1418	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun							
1419	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1420	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.358.000,00	0,00	0,00	0,00	7.358.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1421	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	143.323.800,00	0,00	0,00	0,00	143.323.800,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1422	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1423	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1424	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1425	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Kecamatan Padang Laweh									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen							
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	10 Jenis							
1426	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1427	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	285 Laporan	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis							
1428	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	9.975.000,00	0,00	0,00	0,00	9.975.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 kasus							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1429	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 persen 100 persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan Jenis pembinaan yang dilakukan	7 jenis 7 Jenis							
1430	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen							
1431	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	[object Object]
1432	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1433	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.269.456.000,00	0,00	0,00	0,00	1.269.456.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 kegiatan							
1434	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	[object Object]
1435	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen							
1436	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.906.800,00	0,00	0,00	0,00	1.906.800,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1437	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.198.500,00	0,00	0,00	0,00	10.198.500,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1438	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	6.271.000,00	0,00	0,00	0,00	6.271.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1439	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1440	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	8.004.400,00	0,00	0,00	0,00	8.004.400,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1441	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	[object Object]
1442	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	[object Object]
1443	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56.196.700,00	0,00	0,00	0,00	56.196.700,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis							
1444	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1445	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1446	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5.000.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	25.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1447	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen							
1448	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1449	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1450	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	[object Object]
1451	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.247.400,00	0,00	0,00	0,00	115.247.400,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1452	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1453	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1454	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1455	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Kecamatan Tiumang									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100 persen							
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							
1456	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1457	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4.310.000,00	0,00	0,00	0,00	4.310.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-							
1458	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.690.000,00	0,00	0,00	0,00	11.690.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-							
1459	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1460	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	[object Object]
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100 %							
1461	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang Orang/bulan	1.313.259.000,00	0,00	0,00	0,00	1.313.259.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
1462	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	[object Object]
1463	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	[object Object]
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1464	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.214.600,00	0,00	0,00	0,00	2.214.600,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1465	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.377.000,00	0,00	0,00	0,00	11.377.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1466	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	6.963.000,00	0,00	0,00	0,00	6.963.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1467	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1468	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	9.885.100,00	0,00	0,00	0,00	9.885.100,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1469	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	[object Object]
1470	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	51.984.000,00	0,00	0,00	0,00	51.984.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1471	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	[object Object]
1472	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	33.700.000,00	0,00	0,00	33.700.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1473	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1474	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.499.900,00	0,00	0,00	0,00	8.499.900,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1475	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	[object Object]
1476	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	194.600.200,00	0,00	0,00	0,00	194.600.200,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1477	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1478	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1479	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1480	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	[object Object]
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik									
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik Sosial	5 persen							
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	355 Orang/ Kali							
1481	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	355 Orang	21.380.000,00	0,00	0,00	0,00	21.380.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1482	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Laporan	12.136.500,00	0,00	0,00	0,00	12.136.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1483	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka									
			Jumlah Paskibraka	17 Orang	1.049.997.600,00	0,00	0,00	0,00	1.049.997.600,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pembinaan Partai Politik	30 persen							
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah partai politik yang dibina	10 partai							
1484	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 Orang	23.134.178.480,00	0,00	0,00	0,00	23.134.178.480,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1485	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan	7.911.000,00	0,00	0,00	0,00	7.911.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus							
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Konflik Sosial yangditangani	10 Kali							
1486	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	14.991.000,00	0,00	0,00	0,00	14.991.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1487	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Laporan	20.004.500,00	0,00	0,00	0,00	20.004.500,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Penyakit Masyarakat	2 kasus							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Jumlah Forum Kewaspadaan Dini masyarakat	100 Persen							
1488	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	469.609.000,00	0,00	0,00	0,00	469.609.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun							
1489	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/bulan	1.014.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014.330.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
1490	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.991.000,00	0,00	0,00	0,00	1.991.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1491	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.004.000,00	0,00	0,00	0,00	10.004.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1492	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.992.000,00	0,00	0,00	0,00	4.992.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1493	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.025.000,00	0,00	0,00	0,00	14.025.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1494	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.522.000,00	0,00	0,00	0,00	7.522.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1495	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54.629.000,00	0,00	0,00	0,00	54.629.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	3 meja 1/2 biro, 1 m Unit							
1496	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	[object Object]
1497	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0,00	22.300.000,00	0,00	0,00	22.300.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1498	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00	29.200.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan							
1499	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1500	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.450,00	0,00	0,00	0,00	18.000.450,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1501	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1502	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	172.720.200,00	0,00	0,00	0,00	172.720.200,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan							
1503	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1504	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

Bupati

SUTAN RISKA

LAMPIRAN V

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	260.712.833.011,00	0,00	0,00	0,00	260.712.833.011,00
1	01	1	02	Kesehatan	186.155.425.182,00	7.730.188.798,00	0,00	0,00	193.885.613.980,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.303.822.400,00	223.270.000,00	0,00	0,00	10.527.092.400,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.058.836.300,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.062.236.300,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.027.638.314,00	0,00	0,00	0,00	11.027.638.314,00
1	01	1	06	Sosial	4.584.095.600,00	31.900.000,00	0,00	0,00	4.615.995.600,00
1	01	2	09	Pangan	4.116.442.100,00	53.200.000,00	0,00	0,00	4.169.642.100,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	4.428.969.100,00	63.000.000,00	0,00	0,00	4.491.969.100,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.796.574.650,00	239.080.344,00	0,00	0,00	5.035.654.994,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.448.658.000,00	0,00	0,00	0,00	5.448.658.000,00
1	01	2	15	Perhubungan	11.350.985.550,00	0,00	0,00	0,00	11.350.985.550,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	4.228.003.400,00	7.500.000,00	0,00	0,00	4.235.503.400,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.120.857.800,00	121.682.295,00	0,00	0,00	4.242.540.095,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	3.204.420.750,00	296.496.040,00	0,00	0,00	3.500.916.790,00
1	01	2	20	Statistik	69.870.600,00	0,00	0,00	0,00	69.870.600,00
1	01	2	22	Kebudayaan	4.130.915.350,00	0,00	0,00	0,00	4.130.915.350,00
1	01	2	23	Perpustakaan	3.768.671.700,00	60.350.000,00	0,00	0,00	3.829.021.700,00
1	01	2	24	Kearsipan	179.972.000,00	0,00	0,00	0,00	179.972.000,00
1	01	3	27	Pertanian	15.517.644.650,00	0,00	0,00	0,00	15.517.644.650,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	3	32	Transmigrasi	4.999.758.600,00	77.050.000,00	0,00	0,00	5.076.808.600,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	35.031.664.364,00	3.262.708.440,00	0,00	0,00	38.294.372.804,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	42.827.399.787,00	172.600.000,00	0,00	0,00	42.999.999.787,00
1	01	5	01	Perencanaan	4.787.686.350,00	49.125.000,00	0,00	0,00	4.836.811.350,00
1	01	5	02	Keuangan	13.919.192.250,00	0,00	5.000.000.000,00	111.881.943.200,00	130.801.135.450,00
1	01	5	03	Kepegawaian	5.738.052.096,00	14.000.000,00	0,00	0,00	5.752.052.096,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	591.891.000,00	0,00	0,00	0,00	591.891.000,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00
1	01	6	01	Inspektorat	9.028.522.200,00	2.046.365.000,00	0,00	0,00	11.074.887.200,00
1	01	7	01	Kecamatan	20.570.571.400,00	288.670.200,00	0,00	0,00	20.859.241.600,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	26.054.641.730,00	51.500.000,00	0,00	0,00	26.106.141.730,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	961.213.500,00	0,00	0,00	0,00	961.213.500,00
2	03	1	06	Sosial	77.548.450,00	0,00	0,00	0,00	77.548.450,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.505.279.569,00	44.991.261.717,00	0,00	0,00	66.496.541.286,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	1.249.005.650,00	0,00	0,00	0,00	1.249.005.650,00
3	04	2	09	Pangan	355.116.200,00	0,00	0,00	0,00	355.116.200,00
3	04	2	15	Perhubungan	485.919.750,00	34.390.720,00	0,00	0,00	520.310.470,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	1.649.124.200,00	0,00	0,00	0,00	1.649.124.200,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	305.196.650,00	0,00	0,00	0,00	305.196.650,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	1.065.165.900,00	0,00	0,00	0,00	1.065.165.900,00
3	04	2	21	Persandian	30.124.000,00	0,00	0,00	0,00	30.124.000,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	818.953.250,00	11.400.000,00	0,00	0,00	830.353.250,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	3	27	Pertanian	6.555.210.150,00	0,00	0,00	0,00	6.555.210.150,00
3	04	3	30	Perdagangan	206.961.900,00	0,00	0,00	0,00	206.961.900,00
3	04	3	31	Perindustrian	190.247.550,00	0,00	0,00	0,00	190.247.550,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.481.741.504,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.483.741.504,00
4	05	2	10	Pertanahan	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	1.877.886.115,00	290.008.060,00	0,00	0,00	2.167.894.175,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	608.534.600,00	74.272.000,00	0,00	0,00	682.806.600,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.154.962.756,00	0,00	0,00	0,00	8.154.962.756,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	43.539.775.850,00	16.271.865.038,00	0,00	0,00	59.811.640.888,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.119.970.000,00	0,00	0,00	0,00	4.119.970.000,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	399.965.000,00	0,00	0,00	0,00	399.965.000,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	42.828.788.685,00	24.175.492.275,00	0,00	0,00	67.004.280.960,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	1.921.173.413,00	0,00	0,00	0,00	1.921.173.413,00
8	10	2	22	Kebudayaan	9.440.848.658,00	0,00	0,00	0,00	9.440.848.658,00
8	10	2	23	Perpustakaan	129.990.050,00	0,00	0,00	0,00	129.990.050,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	538.418.064,00	0,00	0,00	0,00	538.418.064,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.086.978.250,00	0,00	0,00	0,00	1.086.978.250,00
				TOTAL	**857.833.115.898,00**	**100.642.775.927,00**	**5.000.000.000,00**	**111.881.943.200,00**	**1.075.357.835.025,00**

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

Bupati

SUTAN RISKA

LAMPIRAN VI

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Ruang Kelas Baru	197.267.400,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	99.972.650,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	178.249.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	494.875.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	28.127.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00
		Total	998.491.050,00
2.	Pendidikan Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.357.345.750,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	293.311.500,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.451.500.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20.229.500,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.641.887.690,00
		Total	8.764.274.440,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
3.	Pendidikan Dasar	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.586.500,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	260.800.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	127.982.693,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	107.069.300,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.648.500.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.136.500,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.350.682.000,00
		Total	4.531.756.993,00
4.	Pendidikan Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00
		Total	0,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	14.294.522.483,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	245.416.000,00
		Total	245.416.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000,00
		Total	50.000.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	78.001.000,00
		Total	78.001.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	33.401.000,00
		Total	33.401.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	228.197.140,00
		Total	228.197.140,00
6.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	135.125.000,00
		Total	135.125.000,00
7.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000,00
		Total	50.000.000,00
8.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	348.509.900,00
		Total	348.509.900,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
9.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.000.000,00
		Total	50.000.000,00
10.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	216.733.000,00
		Total	216.733.000,00
11.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	187.520.800,00
		Total	187.520.800,00
12.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	312.183.850,00
		Total	312.183.850,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	1.935.087.690,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	260.360.600,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	22.528.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	399.918.000,00
		Total	682.806.600,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	79.601.654,00
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	37.470.750,00
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0,00
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	159.842.600,00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	216.810.000,00
		Total	493.725.004,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.176.531.604,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	53.117.250,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.971.000,00
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	884.500,00
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1.264.500,00
		Total	58.237.250,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	58.237.250,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	0,00
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	44.996.400,00
		Total	44.996.400,00
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	150.006.000,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0,00
		Penyusunan Rencana Kontijensi	35.821.000,00
		Total	185.827.000,00
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	41.008.000,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	64.800.000,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	0,00
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	50.000.000,00
		Total	155.808.000,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	39.995.000,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	162.468.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Total	202.463.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	589.094.400,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.039.750,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.156.500,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	93.450.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	76.380.500,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	4.513.000,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	2.745.050,00
		Pemberian Layanan Rujukan	3.607.500,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.130.900,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	8.888.750,00
		Penyediaan Permakanan	13.105.000,00
		Penyediaan Sandang	7.746.885,00
		Total	321.763.835,00
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	4.317.500,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.337.500,00
		Penyediaan Makanan	49.935.000,00
		Penyediaan Sandang	8.804.950,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	8.153.500,00
		Total	77.548.450,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	399.312.285,00

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

Bupati

SUTAN RISKA

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	260.712.833.011,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.088.068.000,00	66.874.694.410,00
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	207.769.100,00	110.000.050,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	514.697.700,00	19.586.500,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	193.885.613.980,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	138.055.000.000,00	57.672.177.338,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.368.400.000,00	1.506.612.550,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.278.542.080,00	372.331.000,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	831.000.000,00	260.520.000,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	10.527.092.400,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.000.000.000,00	3.401.180.000,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.000.000.000,00	682.806.600,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	44.113.500,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.000.000.000,00	493.725.004,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.500.000.000,00	0,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	10.669.639.165,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	35.000.000.000,00	52.225.722.121,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	200.000.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	500.000.000,00	1.945.903.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	3.062.236.300,00
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	195.696.800,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.415.000.000,00	84.307.000,00
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.525.000.000,00	517.525.750,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.200.000.000,00	7.357.433.206,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	11.027.638.314,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	433.000.000,00	348.943.000,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.240.000.000,00	377.039.000,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	235.231.500,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	4.615.995.600,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.750.000.000,00	75.984.079,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.252.500.000,00	363.023.835,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.700.000.000,00	99.410.150,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	750.000.000,00	77.548.450,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0,00	41.120.950,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.104.000.000,00	51.466.000,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.522.000.000,00	104.581.000,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	241.000.000,00	1.051.837.700,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	59.983.718,00	459.519.550,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	551.250.000,00	91.510.300,00
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	34.692.700,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	55.125.000,00	0,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	275.625.000,00	55.766.000,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	445.489.700,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	4.169.642.100,00
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	170.000.000,00	0,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	675.000.000,00	165.129.100,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	120.000.000,00	169.999.300,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	80.000.000,00	19.987.800,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0,00	70.000.000,00
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	0,00	100.000.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	4.491.969.100,00
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	543.984.375,00	46.015.000,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	6.415.182.313,00	234.990.015,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	762.491.094,00	953.417.800,00
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	31.518.750,00	15.005.000,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	173.353.125,00	68.755.000,00
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	1.575.937.500,00	5.001.000,00
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	775.969.360,00
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	126.075.000,00	5.022.000,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	26.265.625,00	15.225.000,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.108.409.375,00	48.494.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	4.747.820.744,00
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	665.650.000,00	52.612.250,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	715.450.000,00	200.000.000,00
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	217.400.000,00	35.222.000,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	4.099.484.200,00
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	135.135.000,00	32.989.900,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	883.763.291,00	356.183.900,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.433.855.929,00	960.000.000,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	222.000.000,00
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	282.900.000,00	2.684.470.000,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	623.840.000,00	1.213.500.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	11.350.985.550,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.215.096.445,00	520.310.470,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	4.235.503.400,00
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	200.000.000,00	1.649.124.200,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	598.000.000,00	0,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	4.242.540.095,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	12.000.000,00	0,00
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	70.000.000,00	34.994.700,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	210.000.000,00	0,00
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	10.000.000,00	0,00
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	270.000.000,00	270.201.950,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	3.500.916.790,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	405.955.000,00	0,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	655.384.799,00	375.056.250,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	220.993.711,00	110.017.650,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	397.654.797,00	580.092.000,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	200.856.500,00	190.328.000,00
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.010.176.400,00	1.600.404.413,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75.000.000,00	130.441.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	69.870.600,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	30.124.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	4.130.915.350,00
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.879.060.350,00	6.458.241.330,00
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	496.939.750,00	2.913.634.328,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	88.722.500,00	68.973.000,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	3.829.021.700,00
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	650.000.000,00	129.990.050,00
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100.000.000,00	0,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	385.000.000,00	179.972.000,00
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	250.000.000,00	0,00
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	25.000.000,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	110.000.000,00	0,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	794.803.750,00
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	15.002.500,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	20.547.000,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	288.476.500,00	18.376.000,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	106.235.000,00	115.981.000,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	55.000.000,00	265.608.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	15.517.644.650,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.352.002.840,00	3.955.282.700,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.848.448.410,00	2.201.958.400,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	55.297.050,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	70.000,00	13.700.000,00
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	63.212.820,00	0,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	680.986.790,00	328.972.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.060.000.000,00	122.119.900,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	205.000.000,00	30.174.500,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	285.000.000,00	54.667.500,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.200.000.000,00	182.959.550,00
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	100.000.000,00	0,00
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.540.000.000,00	7.288.000,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	5.076.808.600,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	29.018.296.104,00
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.082.244.800,00	8.399.248.900,00
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	23.993.263.497,00	876.827.800,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	20.770.434.437,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.142.113.775,00	22.229.565.350,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	3.729.894.550,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	750.738.050,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	356.178.750,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	8.636.003.400,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	113.926.475.000,00	121.047.949.050,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.168.650.000,00	349.788.500,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.089.237.500,00	767.394.500,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	4.372.688.096,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.526.000.000,00	1.379.364.000,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.405.130.000,00	591.891.000,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	25.000.000,00	325.000.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	8.687.479.200,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.068.197.000,00	1.368.890.000,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	435.176.000,00	1.018.518.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		KECAMATAN		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	20.524.641.250,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.750.000.000,00	43.053.000,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.100.000.000,00	171.547.350,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.815.000.000,00	24.930.000,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	968.000.000,00	99.070.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	587.680.711.718,00	1.375.933.650,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	441.650.000,00	1.083.514.100,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.068.424.160,00	23.142.089.480,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	62.012.500,00	0,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	157.300.000,00	34.995.500,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	484.000.000,00	469.609.000,00

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

Bupati

SUTAN RISKA

LAMPIRAN VIII

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan	301.110.587.666,00	355.727.581.200,00	327.717.113.971,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	301.110.587.666,00	355.727.581.200,00	327.717.113.971,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	301.110.587.666,00	355.727.581.200,00	327.717.113.971,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	110.386.704.400,00	61.259.483.600,00	66.874.694.410,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	51.147.665.842,00	39.527.956.900,00	41.738.223.087,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.008.001.442,00	648.000.000,00	552.250.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.173.600.000,00	1.645.260.587,00	3.493.973.647,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	288.000.000,00	183.100.000,00	183.100.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	288.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	720.000.000,00	393.600.000,00	393.600.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	750.000.000,00	708.400.000,00	1.844.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.425.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.381.000.000,00	0,00	2.451.500.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50.000.000,00	0,00	34.925.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	500.000.000,00	0,00	20.229.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.000.000.000,00	268.395.000,00	293.311.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25.768.450.000,00	24.794.900.000,00	24.794.900.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	600.000.000,00	1.467.200.000,00	1.467.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.511.300.000,00	5.877.157.863,00	2.357.345.750,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	720.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	18.314.400,00	0,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	816.000.000,00	3.341.943.450,00	3.641.887.690,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.738.589.558,00	14.494.612.000,00	17.547.723.173,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	945.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	4.620.000.000,00	720.237.000,00	720.237.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.246.400.000,00	329.655.000,00	1.151.661.680,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.592.000.000,00	2.103.956.000,00	2.350.682.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3.148.000.000,00	207.184.000,00	207.184.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.400.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.700.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	900.000.000,00	712.200.000,00	836.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.650.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.880.971.252,00	0,00	1.648.500.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000,00	0,00	127.982.693,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50.000.000,00	80.740.000,00	115.770.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	520.000.000,00	0,00	17.136.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.000.000.000,00	85.940.000,00	107.069.300,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.469.903.906,00	9.993.900.000,00	9.993.900.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	18.314.400,00	0,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.134.000.000,00	260.800.000,00	260.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.944.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.225.864.800,00	6.251.602.900,00	6.543.590.850,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.050.000.000,00	1.242.500.000,00	1.242.500.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	144.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	60.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	250.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	625.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	730.000.000,00	256.485.000,00	494.875.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	10.000.000,00	21.000.000,00	20.999.800,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	500.000.000,00	0,00	28.127.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2.000.000.000,00	252.750.500,00	178.249.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	220.464.800,00	0,00	99.972.650,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.971.400.000,00	4.281.600.000,00	4.281.600.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	90.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.575.000.000,00	197.267.400,00	197.267.400,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.274.584.200,00	985.311.800,00	1.045.157.300,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	240.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	35.278.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00	0,00	25.508.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500.000.000,00	81.611.800,00	110.789.800,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.032.800.200,00	903.700.000,00	908.859.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	30.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	60.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	16.506.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	60.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	235.190.000,00	0,00	110.000.050,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	185.190.000,00	0,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	55.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.190.000,00	0,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50.000.000,00	0,00	100.000.050,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50.000.000,00	0,00	100.000.050,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	120.000.000,00	0,00	19.586.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	120.000.000,00	0,00	19.586.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.000.000,00	0,00	19.586.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	190.368.693.266,00	294.468.097.600,00	260.712.833.011,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	182.351.331.746,00	289.105.678.000,00	255.870.762.211,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	182.351.331.746,00	289.105.678.000,00	255.870.762.211,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.000.000,00	209.974.000,00	210.425.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.451.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	99.974.000,00	99.974.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.000.000,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.207.861.520,00	5.078.945.600,00	4.558.145.600,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.057.861.520,00	4.934.945.600,00	4.414.145.600,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	170.677.735.030,00	131.328.766.486,00	124.263.080.408,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	170.677.735.030,00	131.328.766.486,00	124.263.080.408,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.360.000.000,00	48.239.286.714,00	40.914.947.938,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37.915.000.000,00	20.990.300.824,00	19.617.944.798,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	400.000.000,00	560.566.000,00	560.566.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	2.800.000.000,00	13.284.543.000,00	11.873.955.638,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.000.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.400.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.500.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.500.000.000,00	284.000.000,00	290.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1.165.000.000,00	186.860.900,00	219.080.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	6.000.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	14.600.000.000,00	6.559.992.324,00	6.560.003.660,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	150.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	200.000.000,00	114.338.600,00	114.338.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.045.000.000,00	26.868.611.040,00	20.917.008.290,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	150.000.000,00	216.662.900,00	216.733.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	250.000.000,00	187.630.800,00	187.520.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200.000.000,00	272.182.500,00	312.183.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000,00	245.416.000,00	245.416.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	65.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000,00	37.340.000,00	78.001.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	75.000.000,00	39.350.000,00	33.401.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	95.000.000,00	228.197.140,00	228.197.140,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	95.000.000,00	135.125.000,00	135.125.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	65.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.000,00	348.516.900,00	348.509.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	85.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	200.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	65.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	125.000.000,00	562.585.000,00	562.585.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	65.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.000.000,00	97.010.000,00	97.010.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	50.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50.000.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.000.000,00	175.240.000,00	175.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.500.000.000,00	23.283.492.800,00	16.391.746.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	180.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.000.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	15.000.000.000,00	0,00	659.277.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	250.000.000,00	160.000.000,00	366.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	350.000.000,00	101.270.000,00	101.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	95.000.000,00	27.060.000,00	27.060.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	65.000.000,00	110.132.000,00	110.132.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	150.000.000,00	131.405.000,00	131.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	150.000.000,00	131.405.000,00	131.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	248.969.850,00	248.969.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	248.969.850,00	248.969.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	50.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	420.000.000,00	1.353.718.450,00	1.506.612.550,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	60.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	60.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	303.017.850,00	449.702.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.000.000,00	303.017.850,00	449.702.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	1.050.700.600,00	1.056.909.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	1.050.700.600,00	1.056.909.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	570.286.528,00	372.331.000,00	372.331.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	382.286.528,00	63.730.000,00	63.730.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	382.286.528,00	63.730.000,00	63.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	26.400.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	26.400.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	40.000.000,00	308.601.000,00	308.601.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	40.000.000,00	308.601.000,00	308.601.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	75.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	75.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	21.600.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	21.600.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	25.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	25.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	270.000.000,00	105.240.000,00	260.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	105.240.000,00	110.520.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	85.000.000,00	105.240.000,00	110.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	85.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.057.448.502,00	81.258.190.322,00	81.208.668.920,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	516.025.323,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	346.025.323,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.195.307.675,00	77.126.538.500,00	77.131.452.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.098.722.675,00	77.093.637.000,00	77.093.637.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.310.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.275.000,00	14.327.500,00	14.327.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	18.574.000,00	23.488.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.982.500,00	39.969.200,00	39.969.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.327.500,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	35.000.000,00	13.504.200,00	13.504.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.655.000,00	26.465.000,00	26.465.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	366.208.289,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	80.072.289,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.986.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	213.150.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.306.115,00	205.206.400,00	207.024.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.626.704,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.859.643,00	54.013.000,00	55.831.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.979.000,00	11.195.000,00	11.195.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.549.734,00	19.999.900,00	19.999.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.319.034,00	99.998.500,00	99.998.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.972.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.460.518.600,00	3.819.295.222,00	3.762.895.222,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.453.600,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.410.000,00	74.980.822,00	74.980.822,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.655.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.300.000.000,00	3.732.874.400,00	3.676.474.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.100.000,00	67.181.000,00	67.327.598,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.100.000,00	9.681.000,00	9.827.598,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	150.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	150.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0001						Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	6.600.000.000,00	8.800.000.000,00	10.960.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	600.000.000,00	2.200.000.000,00	4.360.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	2.200.000.000,00	4.360.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	600.000.000,00	2.200.000.000,00	4.360.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.000.000.000,00	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	6.000.000.000,00	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.000.000.000,00	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002						Puskesmas Sungai Rumbai	2.065.325.600,00	2.068.478.000,00	2.065.702.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.199.378.600,00	1.048.682.000,00	1.048.702.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.199.378.600,00	1.048.682.000,00	1.048.702.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.199.378.600,00	1.048.682.000,00	1.048.702.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	865.947.000,00	1.019.796.000,00	1.017.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	865.947.000,00	1.019.796.000,00	1.017.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	865.947.000,00	1.019.796.000,00	1.017.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003						Puskesmas Koto Besar	2.038.112.916,00	1.484.442.916,00	1.590.314.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.324.738.000,00	771.068.000,00	771.314.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.324.738.000,00	771.068.000,00	771.314.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.324.738.000,00	771.068.000,00	771.314.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	713.374.916,00	713.374.916,00	819.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	713.374.916,00	713.374.916,00	819.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	713.374.916,00	713.374.916,00	819.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						Puskesmas Sungai Limau	1.669.826.000,00	1.379.982.500,00	1.407.710.246,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.100.086.000,00	957.238.000,00	958.824.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.100.086.000,00	957.238.000,00	958.824.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.100.086.000,00	957.238.000,00	958.824.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	569.740.000,00	422.744.500,00	448.886.246,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	569.740.000,00	422.744.500,00	448.886.246,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	569.740.000,00	422.744.500,00	448.886.246,00
1.02.0.00.0.00.01.0005						Puskesmas Koto Baru	2.662.770.000,00	2.897.241.057,00	2.897.241.057,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	709.960.000,00	1.110.765.000,00	1.110.765.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	709.960.000,00	1.110.765.000,00	1.110.765.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	709.960.000,00	1.110.765.000,00	1.110.765.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.952.810.000,00	1.786.476.057,00	1.786.476.057,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.952.810.000,00	1.786.476.057,00	1.786.476.057,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.952.810.000,00	1.786.476.057,00	1.786.476.057,00
1.02.0.00.0.00.01.0006						Puskesmas Tiumang	917.829.700,00	1.400.753.000,00	1.400.496.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	699.104.700,00	904.496.000,00	904.496.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	699.104.700,00	904.496.000,00	904.496.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	699.104.700,00	904.496.000,00	904.496.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	218.725.000,00	496.257.000,00	496.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	218.725.000,00	496.257.000,00	496.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	218.725.000,00	496.257.000,00	496.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007						Puskesmas Padang Laweh	1.248.945.300,00	1.104.919.400,00	1.105.394.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	802.484.500,00	700.474.000,00	700.474.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	802.484.500,00	700.474.000,00	700.474.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	802.484.500,00	700.474.000,00	700.474.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	446.460.800,00	404.445.400,00	404.920.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	446.460.800,00	404.445.400,00	404.920.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	446.460.800,00	404.445.400,00	404.920.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0008						Puskesmas Sitiung I	2.123.450.800,00	2.264.696.537,00	2.264.689.537,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.080.905.000,00	985.018.400,00	985.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.080.905.000,00	985.018.400,00	985.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.080.905.000,00	985.018.400,00	985.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.042.545.800,00	1.279.678.137,00	1.279.664.537,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.042.545.800,00	1.279.678.137,00	1.279.664.537,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.042.545.800,00	1.279.678.137,00	1.279.664.537,00
1.02.0.00.0.00.01.0009						Puskesmas Timpeh	1.579.615.000,00	1.486.210.000,00	1.486.213.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.002.375.000,00	908.970.000,00	908.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.002.375.000,00	908.970.000,00	908.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.002.375.000,00	908.970.000,00	908.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	577.240.000,00	577.240.000,00	577.243.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	577.240.000,00	577.240.000,00	577.243.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	577.240.000,00	577.240.000,00	577.243.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010						Puskesmas Gunung Medan	1.443.790.000,00	1.402.253.000,00	1.402.253.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	801.790.000,00	722.253.000,00	722.253.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	801.790.000,00	722.253.000,00	722.253.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	801.790.000,00	722.253.000,00	722.253.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	642.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	642.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	642.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011						Puskesmas Sitiung II	1.499.465.900,00	1.517.249.650,00	1.517.249.650,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	802.591.000,00	725.745.200,00	725.745.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	802.591.000,00	725.745.200,00	725.745.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	802.591.000,00	725.745.200,00	725.745.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	696.874.900,00	791.504.450,00	791.504.450,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	696.874.900,00	791.504.450,00	791.504.450,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	696.874.900,00	791.504.450,00	791.504.450,00
1.02.0.00.0.00.01.0012						Puskesmas Beringin Sakti	916.068.730,00	899.959.060,00	991.691.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	697.343.730,00	671.691.000,00	671.691.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	697.343.730,00	671.691.000,00	671.691.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	697.343.730,00	671.691.000,00	671.691.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	218.725.000,00	228.268.060,00	320.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	218.725.000,00	228.268.060,00	320.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	218.725.000,00	228.268.060,00	320.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013						Puskesmas Silago	1.669.378.400,00	1.671.831.934,00	1.671.831.934,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	906.351.000,00	825.798.000,00	825.798.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	906.351.000,00	825.798.000,00	825.798.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	906.351.000,00	825.798.000,00	825.798.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	763.027.400,00	846.033.934,00	846.033.934,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	763.027.400,00	846.033.934,00	846.033.934,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	763.027.400,00	846.033.934,00	846.033.934,00
1.02.0.00.0.00.01.0014						Puskesmas Sungai Dareh	2.542.874.064,00	2.540.393.436,00	2.701.589.436,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.199.140.064,00	869.602.000,00	1.053.042.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.199.140.064,00	869.602.000,00	1.053.042.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.199.140.064,00	869.602.000,00	1.053.042.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.343.734.000,00	1.670.791.436,00	1.648.547.436,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.343.734.000,00	1.670.791.436,00	1.648.547.436,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.343.734.000,00	1.670.791.436,00	1.648.547.436,00
1.02.0.00.0.00.01.0015						Puskesmas Sialang	1.217.214.000,00	1.278.688.000,00	1.278.678.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	794.805.000,00	703.308.000,00	703.308.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	794.805.000,00	703.308.000,00	703.308.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	794.805.000,00	703.308.000,00	703.308.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	422.409.000,00	575.380.000,00	575.370.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	422.409.000,00	575.380.000,00	575.370.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	422.409.000,00	575.380.000,00	575.370.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016						Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten	0,00	54.430.200,00	54.430.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	54.430.200,00	54.430.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	54.430.200,00	54.430.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	54.430.200,00	54.430.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0017						Laboratorium Kesehatan Daerah	0,00	427.392.000,00	427.392.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	252.392.000,00	252.392.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000						Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	67.076.697.000,00	94.211.299.000,00	94.211.299.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	22.076.697.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.076.697.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.500.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.500.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	12.076.697.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.000.000.000,00	94.211.299.000,00	94.211.299.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	34.211.299.000,00	34.211.299.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	34.211.299.000,00	34.211.299.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	45.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	45.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	61.850.593.150,00	69.742.116.996,00	80.190.181.790,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	61.850.593.150,00	69.742.116.996,00	80.190.181.790,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.300.000.000,00	6.081.540.000,00	3.401.180.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.300.000.000,00	2.941.240.000,00	1.460.130.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1.100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.000.000.000,00	2.941.240.000,00	1.460.130.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000.000,00	3.140.300.000,00	1.941.050.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.500.000.000,00	1.419.050.000,00	719.300.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.500.000.000,00	1.721.250.000,00	1.221.750.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.385.000.000,00	1.078.236.600,00	682.806.600,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.385.000.000,00	1.078.236.600,00	682.806.600,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	0,00	22.528.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	35.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.850.000.000,00	578.318.600,00	260.360.600,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500.000.000,00	499.918.000,00	399.918.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	315.000.000,00	41.055.500,00	44.113.500,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	315.000.000,00	41.055.500,00	44.113.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	280.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01	0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	17.500.000,00	41.055.500,00	44.113.500,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	17.500.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.800.000.000,00	278.535.600,00	493.725.004,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.800.000.000,00	278.535.600,00	493.725.004,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	70.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	70.000.000,00	161.535.600,00	159.842.600,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	0,00	37.470.750,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	35.000.000,00	117.000.000,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	0,00	79.601.654,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.625.000.000,00	0,00	216.810.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.240.000.000,00	8.560.198.625,00	10.669.639.165,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.240.000.000,00	8.560.198.625,00	10.669.639.165,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	100.000.000,00	123.840.000,00	123.840.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	7.772.382.625,00	9.881.823.165,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.000.000,00	150.207.000,00	150.207.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	640.000.000,00	513.769.000,00	513.769.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	150.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	26.700.000.000,00	40.318.558.271,00	52.225.722.121,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	26.700.000.000,00	40.318.558.271,00	52.225.722.121,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	13.500.000.000,00	36.168.340.971,00	45.424.749.421,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	5.000.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	5.000.000.000,00	1.100.215.800,00	3.750.971.200,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.150.000.000,00	1.250.001.500,00	1.250.001.500,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.750.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	650.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	150.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.350.000.000,00	2.167.222.000,00	1.945.903.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.585.800.000,00	1.585.800.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.585.800.000,00	1.585.800.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	581.422.000,00	360.103.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	450.000.000,00	581.422.000,00	360.103.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.960.593.150,00	10.816.770.400,00	10.527.092.400,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.934.000,00	26.210.000,00	25.910.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.934.000,00	26.210.000,00	25.910.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.776.000.900,00	5.928.556.000,00	5.928.556.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.721.000.900,00	5.928.556.000,00	5.928.556.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.506.050,00	540.365.800,00	540.365.800,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.700,00	4.995.800,00	4.995.800,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	243.660.000,00	220.070.000,00	220.070.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.957.350,00	15.318.000,00	15.318.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.250.000,00	40.950.000,00	25.950.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.638.000,00	259.032.000,00	259.032.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	532.000.000,00	44.170.000,00	44.170.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	150.000.000,00	44.170.000,00	44.170.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	332.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.620.152.200,00	3.074.905.600,00	3.136.140.600,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	670.300.000,00	550.010.000,00	640.285.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.939.752.200,00	2.519.795.600,00	2.490.755.600,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.301.000.000,00	1.202.563.000,00	851.950.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	438.925.000,00	336.150.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.000.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	761.000.000,00	747.838.000,00	500.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.065.499.167,00	11.312.262.676,00	11.387.199.056,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.925.499.167,00	11.142.262.676,00	11.217.199.056,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	345.000.000,00	195.767.300,00	195.696.800,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	5.190.500,00	2.971.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	5.190.500,00	2.971.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	1.264.500,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	40.000.000,00	0,00	1.264.500,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	53.117.250,00	53.117.250,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000,00	53.117.250,00	53.117.250,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	884.500,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.04	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	884.500,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	150.000.000,00	137.459.550,00	137.459.550,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	150.000.000,00	137.459.550,00	137.459.550,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	208.447.000,00	84.307.000,00	84.307.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	108.447.000,00	84.307.000,00	84.307.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	27.856.000,00	15.655.500,00	15.655.500,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	30.591.000,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	50.000.000,00	68.651.500,00	68.651.500,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.000.000,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	200.000.000,00	292.525.750,00	517.525.750,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	292.525.750,00	517.525.750,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	200.000.000,00	292.525.750,00	517.525.750,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	100.000.000,00	7.507.426.326,00	7.357.433.206,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100.000.000,00	7.507.426.326,00	7.357.433.206,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100.000.000,00	7.507.426.326,00	7.357.433.206,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.072.052.167,00	3.062.236.300,00	3.062.236.300,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.878.534.367,00	2.341.254.000,00	2.341.254.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.878.534.367,00	2.341.254.000,00	2.341.254.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.000.000,00	149.496.000,00	149.496.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	74.996.000,00	74.996.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	416.000.000,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	60.000.000,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.464.800,00	508.986.300,00	508.986.300,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	24.998.500,00	24.998.500,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.464.800,00	479.987.800,00	479.987.800,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.053.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.553.000,00	0,00	0,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	140.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	140.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	90.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	90.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	2	10	09	2.01	0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	90.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.437.215.818,00	9.196.934.314,00	9.316.930.814,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.437.215.818,00	9.196.934.314,00	9.316.930.814,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.437.215.818,00	9.196.934.314,00	9.316.930.814,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	543.000.000,00	259.023.500,00	348.943.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	368.000.000,00	172.635.000,00	247.561.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	80.000.000,00	30.000.000,00	44.996.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	280.000.000,00	134.635.000,00	194.565.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	175.000.000,00	86.388.500,00	86.388.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.000.000,00	24.233.500,00	24.233.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	150.000.000,00	62.155.000,00	62.155.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	14.993.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0,00	0,00	14.993.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.097.710.000,00	205.163.500,00	235.231.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	875.000.000,00	132.400.000,00	162.468.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	375.000.000,00	132.400.000,00	162.468.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	500.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	11.490.000,00	8.132.500,00	8.132.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	11.490.000,00	8.132.500,00	8.132.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	21.360.000,00	24.636.000,00	24.636.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	21.360.000,00	24.636.000,00	24.636.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	39.860.000,00	39.995.000,00	39.995.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	39.860.000,00	39.995.000,00	39.995.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	150.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	150.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.796.505.818,00	8.732.747.314,00	8.732.756.314,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.500.000.000,00	4.390.534.000,00	4.390.534.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.500.000.000,00	4.390.534.000,00	4.390.534.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	500.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.000.000,00	133.892.450,00	133.901.450,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	4.993.500,00	4.993.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	17.000.000,00	17.009.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	7.498.000,00	7.498.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	75.000.950,00	75.000.950,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.545.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.786.005.818,00	4.060.880.864,00	4.060.880.864,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	36.034.064,00	36.034.064,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.741.005.818,00	4.020.846.800,00	4.020.846.800,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.500.000,00	147.440.000,00	147.440.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.500.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.157.619.052,00	2.671.921.000,00	2.671.921.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.265.000.000,00	377.039.000,00	377.039.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	25.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	815.000.000,00	185.827.000,00	185.827.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	200.000.000,00	35.821.000,00	35.821.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	15.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	10.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	350.000.000,00	150.006.000,00	150.006.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	360.000.000,00	155.808.000,00	155.808.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,00	41.008.000,00	41.008.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	10.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	65.000.000,00	35.404.000,00	35.404.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	5.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00	35.404.000,00	35.404.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.892.619.052,00	2.294.882.000,00	2.294.882.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	930.731.292,00	1.327.838.000,00	1.327.838.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	930.731.292,00	1.327.838.000,00	1.327.838.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.000.000,00	160.571.900,00	160.571.900,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	5.012.700,00	5.012.700,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	43.610.000,00	43.610.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	12.019.200,00	12.019.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	75.030.000,00	75.030.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.387.760,00	626.052.100,00	626.052.100,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	20.000.500,00	20.000.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	626.387.760,00	606.051.600,00	606.051.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.500.000,00	180.420.000,00	180.420.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.500.000,00	105.420.000,00	105.420.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.2.14.01.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.551.664.899,00	10.244.580.154,00	10.438.910.364,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.461.847.899,00	5.494.623.954,00	5.231.962.114,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	160.000.000,00	79.993.804,00	75.984.079,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	35.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	35.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	79.993.804,00	75.984.079,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	64.993.875,00	60.984.150,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	14.999.929,00	14.999.929,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	229.468.150,00	615.078.400,00	363.023.835,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	229.468.150,00	318.158.400,00	321.763.835,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	34.823.400,00	13.105.000,00	13.105.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	15.146.900,00	7.747.500,00	7.746.885,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	19.037.500,00	8.888.750,00	8.888.750,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13.022.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	24.234.400,00	93.450.000,00	93.450.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	22.566.900,00	76.380.500,00	76.380.500,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.020.900,00	3.039.750,00	3.039.750,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.294.700,00	100.157.950,00	100.156.500,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	13.313.650,00	4.513.000,00	4.513.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	25.594.200,00	2.745.050,00	2.745.050,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.524.000,00	5.130.900,00	5.130.900,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	26.889.400,00	0,00	3.607.500,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	296.920.000,00	41.260.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	0,00	285.660.000,00	30.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	0,00	11.260.000,00	11.260.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	65.381.300,00	103.017.650,00	99.410.150,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	65.381.300,00	103.017.650,00	99.410.150,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	44.999.670,00	44.999.670,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	25.381.300,00	33.019.000,00	29.411.500,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	40.000.000,00	24.998.980,00	24.998.980,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	74.618.700,00	77.548.500,00	77.548.450,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	74.618.700,00	77.548.500,00	77.548.450,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	25.224.900,00	49.935.000,00	49.935.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	10.000.000,00	8.805.000,00	8.804.950,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	17.936.900,00	8.153.500,00	8.153.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12.700.000,00	6.337.500,00	6.337.500,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	8.756.900,00	4.317.500,00	4.317.500,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.932.379.749,00	4.618.985.600,00	4.615.995.600,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.450.035.829,00	3.294.628.000,00	3.291.328.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.450.035.829,00	3.294.628.000,00	3.291.328.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.000.000,00	259.934.500,00	239.013.500,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	60.004.000,00	44.034.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	18.645.000,00	18.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	27.865.000,00	26.569.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	140.920.500,00	137.910.500,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	17.900.000,00	31.900.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	17.900.000,00	31.900.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.343.920,00	834.118.100,00	901.729.100,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	69.993.300,00	69.993.300,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	871.343.920,00	760.124.800,00	827.735.800,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.000.000,00	212.405.000,00	152.025.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.500.000,00	21.500.000,00	16.500.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272.500.000,00	181.025.000,00	130.525.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	9.880.000,00	5.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.089.817.000,00	4.749.956.200,00	5.206.948.250,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.338.800.000,00	629.986.200,00	1.086.978.250,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	295.121.000,00	0,00	459.519.550,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.121.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	45.121.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	0,00	459.519.550,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	9.525.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	02	2.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	449.994.550,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	126.982.200,00	91.500.300,00	91.510.300,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	77.386.200,00	64.900.300,00	64.910.300,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	52.386.200,00	64.900.300,00	64.910.300,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.596.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.596.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	150.000.000,00	64.692.700,00	34.692.700,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	64.692.700,00	34.692.700,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	64.692.700,00	34.692.700,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	354.879.000,00	35.303.500,00	55.766.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	269.354.000,00	35.303.500,00	55.766.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	269.354.000,00	35.303.500,00	55.766.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	85.525.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.525.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	411.817.800,00	438.489.700,00	445.489.700,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	84.700.000,00	103.400.000,00	103.400.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	84.700.000,00	103.400.000,00	103.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	277.117.800,00	246.689.700,00	253.689.700,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	202.117.800,00	246.689.700,00	253.689.700,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	50.000.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.751.017.000,00	4.119.970.000,00	4.119.970.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	585.400.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	400.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.01	0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	130.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	200.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	70.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	185.400.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	55.200.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	66.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.857.017.000,00	2.684.470.000,00	2.684.470.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.159.650.000,00	1.200.600.000,00	1.200.600.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	529.650.000,00	545.600.000,00	545.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	275.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	125.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	217.600.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	104.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	113.600.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.087.367.000,00	898.620.000,00	898.620.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	48.100.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	895.167.000,00	857.220.000,00	857.220.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.100.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	50.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	30.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	392.400.000,00	429.250.000,00	429.250.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	383.400.000,00	425.500.000,00	425.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.308.600.000,00	1.213.500.000,00	1.213.500.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.308.600.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	611.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	697.600.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	913.500.000,00	913.500.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00
1.06.2.08.2.14.01.0000	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	478.500.000,00	478.500.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000						Dinas Pangan dan Perikanan	4.166.753.677,00	5.254.365.850,00	5.355.111.550,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.828.753.677,00	4.516.505.450,00	4.524.758.300,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	150.000.000,00	152.639.900,00	165.129.100,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	55.000.000,00	30.122.750,00	65.121.350,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	30.000.000,00	15.041.500,00	15.041.500,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	25.000.000,00	15.081.250,00	50.079.850,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	85.000.000,00	67.517.150,00	45.007.750,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.000.000,00	21.257.450,00	15.002.750,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	75.000.000,00	46.259.700,00	30.005.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40.000.000,00	180.005.300,00	169.999.300,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	180.005.300,00	169.999.300,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	180.005.300,00	169.999.300,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	35.000.000,00	19.987.800,00	19.987.800,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	19.987.800,00	19.987.800,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	19.987.800,00	19.987.800,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.603.753.677,00	4.163.872.450,00	4.169.642.100,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.500.396.917,00	3.068.833.000,00	3.072.833.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.500.396.917,00	3.068.833.000,00	3.072.833.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.000.000,00	167.558.350,00	170.628.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	40.058.000,00	40.067.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	80.000.350,00	83.061.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	54.500.000,00	53.200.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	54.500.000,00	53.200.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	810.856.760,00	794.272.350,00	794.272.350,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.000.000,00	47.500.550,00	47.500.550,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	757.856.760,00	742.771.800,00	742.771.800,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.500.000,00	78.708.750,00	78.708.750,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	22.768.750,00	22.768.750,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	20.000.000,00	0,00	0,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	338.000.000,00	737.860.400,00	830.353.250,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	338.000.000,00	737.860.400,00	830.353.250,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	63.000.000,00	0,00	0,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	63.000.000,00	0,00	0,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	63.000.000,00	0,00	0,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	225.000.000,00	702.310.900,00	794.803.750,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	120.000.000,00	0,00	0,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	65.000.000,00	0,00	0,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	55.000.000,00	0,00	0,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	105.000.000,00	702.310.900,00	794.803.750,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	632.309.700,00	624.800.300,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.001.200,00	170.003.450,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.000.000,00	15.002.500,00	15.002.500,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	25.000.000,00	15.002.500,00	15.002.500,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	25.000.000,00	15.002.500,00	15.002.500,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25.000.000,00	20.547.000,00	20.547.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	20.547.000,00	20.547.000,00
2.09.3.25.0.00.01.0000	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	20.547.000,00	20.547.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000						Dinas Lingkungan Hidup	5.409.249.140,00	6.459.863.273,00	6.659.863.275,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.409.249.140,00	6.459.863.273,00	6.659.863.275,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.409.249.140,00	6.459.863.273,00	6.659.863.275,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	303.663.200,00	46.015.000,00	46.015.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	53.663.200,00	46.015.000,00	46.015.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	28.663.200,00	46.015.000,00	46.015.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	250.000.000,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	278.808.200,00	234.990.015,00	234.990.015,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	259.792.400,00	181.897.015,00	181.897.015,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	120.570.000,00	57.503.000,00	57.503.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	39.222.400,00	46.897.000,00	46.897.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	100.000.000,00	77.497.015,00	77.497.015,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	19.015.800,00	53.093.000,00	53.093.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.015.800,00	53.093.000,00	53.093.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	64.370.870,00	764.381.000,00	953.417.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	64.370.870,00	764.381.000,00	953.417.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	64.370.870,00	764.381.000,00	953.417.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.993.000,00	15.005.000,00	15.005.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	15.993.000,00	15.005.000,00	15.005.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.993.000,00	15.005.000,00	15.005.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	51.145.400,00	68.755.000,00	68.755.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51.145.400,00	68.755.000,00	68.755.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.675.200,00	35.371.000,00	35.371.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	26.470.200,00	33.384.000,00	33.384.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	10.000.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	10.000.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	10.000.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	688.118.400,00	775.001.158,00	775.969.360,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	688.118.400,00	775.001.158,00	775.969.360,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	388.118.400,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	150.000.000,00	0,00	274.767.060,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	150.000.000,00	775.001.158,00	501.202.300,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	16.893.000,00	5.022.000,00	5.022.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.893.000,00	5.022.000,00	5.022.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16.893.000,00	5.022.000,00	5.022.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	13.500.000,00	15.225.000,00	15.225.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	13.500.000,00	15.225.000,00	15.225.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	13.500.000,00	15.225.000,00	15.225.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	497.992.000,00	38.499.000,00	48.494.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	497.992.000,00	38.499.000,00	48.494.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	25.000.000,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	15.000.000,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	100.000.000,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	142.992.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	25.000.000,00	38.499.000,00	48.494.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	150.000.000,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.468.765.070,00	4.491.969.100,00	4.491.969.100,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.047.304.460,00	2.751.906.000,00	2.751.906.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.047.304.460,00	2.751.906.000,00	2.751.906.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.000.000,00	186.448.800,00	186.448.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.000.000,00	5.010.400,00	5.010.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	45.003.000,00	45.003.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	12.001.000,00	12.001.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	21.750.000,00	21.750.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	21.823.700,00	21.823.700,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	80.860.700,00	80.860.700,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.634.330,00	61.500.000,00	61.500.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.634.330,00	61.500.000,00	61.500.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.022.326.280,00	1.413.300.300,00	1.413.300.300,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.600.000,00	47.477.300,00	47.477.300,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	940.726.280,00	1.353.663.000,00	1.353.663.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.500.000,00	78.814.000,00	78.814.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	41.750.000,00	41.750.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	20.064.000,00	20.064.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.467.033.942,00	4.885.654.994,00	5.035.654.994,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.467.033.942,00	4.885.654.994,00	5.035.654.994,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	143.000.000,00	63.967.250,00	52.612.250,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	40.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	30.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	5.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	5.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	83.000.000,00	63.967.250,00	52.612.250,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20.000.000,00	16.696.000,00	12.521.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	48.000.000,00	40.091.250,00	40.091.250,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	15.000.000,00	7.180.000,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	15.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	15.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	400.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	10.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	10.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	40.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	20.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	20.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	350.000.000,00	0,00	200.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	350.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	115.000.000,00	44.553.000,00	35.222.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	45.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	15.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60.000.000,00	24.196.000,00	20.021.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.000.000,00	16.696.000,00	12.521.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000,00	20.357.000,00	15.201.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	10.000.000,00	20.357.000,00	15.201.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	25.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	25.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	10.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.784.033.942,00	4.777.134.744,00	4.747.820.744,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.762.373.422,00	3.390.278.000,00	3.390.278.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.762.373.422,00	3.390.278.000,00	3.390.278.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.000.000,00	580.022.400,00	561.328.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	5.000.000,00	6.832.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	327.712.000,00	297.318.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	14.040.000,00	20.700.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	20.567.900,00	15.530.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	212.702.500,00	220.948.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	36.300.000,00	23.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	36.300.000,00	23.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.160.520,00	438.504.000,00	437.304.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	95.780.000,00	94.580.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.160.520,00	338.724.000,00	338.724.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.500.000,00	332.030.344,00	335.810.344,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	35.550.000,00	39.330.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	215.980.344,00	215.980.344,00
2.13.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.314.960.855,00	5.403.658.000,00	5.448.658.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.314.960.855,00	5.403.658.000,00	5.448.658.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	40.000.000,00	32.989.900,00	32.989.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	40.000.000,00	32.989.900,00	32.989.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	20.000.000,00	15.200.900,00	15.200.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	20.000.000,00	17.789.000,00	17.789.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	505.000.001,00	356.183.900,00	356.183.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	505.000.001,00	356.183.900,00	356.183.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.000.000,00	200.002.400,00	200.002.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	30.000.000,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	50.000.000,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	125.000.000,00	99.999.900,00	99.999.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30.000.000,00	56.181.600,00	56.181.600,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100.000.000,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	70.000.000,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	155.000.001,00	960.000.000,00	960.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	155.000.001,00	960.000.000,00	960.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1,00	900.000.000,00	900.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	75.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	30.000.000,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.614.960.853,00	4.054.484.200,00	4.099.484.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.772.745.575,00	3.321.763.000,00	3.321.763.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.772.745.575,00	3.321.763.000,00	3.321.763.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.999.994,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.999.994,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.000.000,00	216.894.700,00	221.622.700,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.999.200,00	4.999.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	26.097.500,00	29.272.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	12.000.000,00	13.550.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	14.999.000,00	14.999.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	25.735.000,00	25.738.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	133.064.000,00	133.064.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.002,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	1,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.715.280,00	413.078.500,00	413.078.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	44.998.100,00	44.998.100,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386.715.280,00	364.080.400,00	364.080.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.500.001,00	102.748.000,00	143.020.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	80.698.000,00	120.970.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	8.902.515.730,00	6.616.263.320,00	11.871.296.020,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.902.515.730,00	6.616.263.320,00	11.871.296.020,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.114.571.000,00	300.008.820,00	520.310.470,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	100.004.820,00	274.321.920,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	64.376.720,00	64.376.720,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	40.000.000,00	35.628.100,00	209.945.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	704.571.000,00	100.002.850,00	145.987.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	62.500.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	179.071.000,00	100.002.850,00	145.987.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	50.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	30.000.000,00	100.001.150,00	100.001.150,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	30.000.000,00	100.001.150,00	100.001.150,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.787.944.730,00	6.316.254.500,00	11.350.985.550,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.906.863.450,00	3.127.777.000,00	3.947.603.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.906.863.450,00	3.127.777.000,00	3.947.603.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.000.000,00	125.242.600,00	132.013.350,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	15.759.000,00	15.759.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	7.503.000,00	7.503.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	10.020.000,00	13.620.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000,00	11.840.000,00	11.840.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	75.120.600,00	78.291.350,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.060.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	415.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.246.581.280,00	2.915.901.100,00	6.972.851.550,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.000.000,00	178.447.300,00	4.206.001.350,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.086.581.280,00	2.733.453.800,00	2.762.850.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.500.000,00	147.333.800,00	298.517.650,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000,00	125.003.800,00	276.187.650,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	8.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	5.083.966.353,00	4.984.622.200,00	5.984.622.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.618.966.353,00	4.884.627.600,00	5.884.627.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.583.800.000,00	739.898.200,00	1.649.124.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.583.800.000,00	739.898.200,00	1.649.124.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	40.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	347.800.000,00	142.343.000,00	500.678.700,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	85.000.000,00	15.066.000,00	28.967.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	765.000.000,00	492.525.000,00	1.029.513.800,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	60.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	86.000.000,00	74.968.400,00	74.968.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	14.995.800,00	14.995.800,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	270.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	80.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	50.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	70.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	70.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.765.166.353,00	4.144.729.400,00	4.235.503.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.010.666.351,00	2.814.183.080,00	2.814.183.330,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.010.666.351,00	2.814.183.080,00	2.814.183.330,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.000.000,00	125.529.200,00	125.538.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	4.999.000,00	4.999.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	7.545.500,00	7.545.500,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.000.000,00	12.171.700,00	12.180.700,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	75.117.000,00	75.117.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.000.002,00	9.800.000,00	17.300.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	0,00	7.500.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.084.000.000,00	1.073.617.120,00	1.073.617.120,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	575.000.000,00	541.887.520,00	541.887.520,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.000.000,00	522.249.600,00	522.249.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.500.000,00	121.600.000,00	204.864.750,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	0,00	83.264.750,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	290.000.000,00	69.870.600,00	69.870.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	290.000.000,00	69.870.600,00	69.870.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000,00	69.870.600,00	69.870.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	70.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	80.000.000,00	22.896.500,00	22.896.500,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	90.000.000,00	46.974.100,00	46.974.100,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	175.000.000,00	30.124.000,00	30.124.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	175.000.000,00	30.124.000,00	30.124.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	30.124.000,00	30.124.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	40.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	30.124.000,00	30.124.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	4.989.228.733,00	4.677.316.445,00	4.944.946.195,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.489.228.733,00	4.400.046.195,00	4.547.736.745,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	67.000.000,00	34.994.700,00	34.994.700,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.000.000,00	34.994.700,00	34.994.700,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	67.000.000,00	34.994.700,00	34.994.700,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	157.778.000,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	157.778.000,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	157.778.000,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	245.592.000,00	270.201.950,00	270.201.950,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	245.592.000,00	270.201.950,00	270.201.950,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	63.000.000,00	220.205.250,00	220.205.250,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	182.592.000,00	49.996.700,00	49.996.700,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.018.858.733,00	4.094.849.545,00	4.242.540.095,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.320.338.653,00	2.891.615.000,00	2.959.244.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.320.338.653,00	2.891.615.000,00	2.959.244.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.000.000,00	125.377.250,00	154.843.050,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	5.022.000,00	5.022.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	15.002.000,00	15.002.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	7.513.000,00	9.805.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	10.046.000,00	10.046.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	12.003.900,00	12.310.700,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	75.790.350,00	102.657.350,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000,00	79.021.545,00	128.482.295,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000,00	79.021.545,00	128.482.295,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985.020.080,00	922.955.750,00	921.650.750,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000,00	239.999.550,00	239.999.550,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	726.020.080,00	678.956.200,00	677.651.200,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.500.000,00	75.880.000,00	78.320.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	7.880.000,00	10.320.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	500.000.000,00	277.270.250,00	397.209.450,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	200.000.000,00	187.013.900,00	206.961.900,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100.000.000,00	122.171.900,00	122.119.900,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000,00	122.171.900,00	122.119.900,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000,00	122.171.900,00	122.119.900,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	30.000.000,00	10.174.500,00	30.174.500,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	30.000.000,00	10.174.500,00	30.174.500,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.000.000,00	10.174.500,00	30.174.500,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	70.000.000,00	54.667.500,00	54.667.500,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	70.000.000,00	54.667.500,00	54.667.500,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	50.000.000,00	47.969.500,00	47.969.500,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	20.000.000,00	6.698.000,00	6.698.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	300.000.000,00	90.256.350,00	190.247.550,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	280.000.000,00	82.968.350,00	182.959.550,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	280.000.000,00	82.968.350,00	182.959.550,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	30.000.000,00	11.747.000,00	11.747.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	250.000.000,00	71.221.350,00	171.212.550,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	20.000.000,00	7.288.000,00	7.288.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	7.288.000,00	7.288.000,00
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	20.000.000,00	7.288.000,00	7.288.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.894.699.556,00	4.066.090.840,00	4.566.082.690,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.894.699.556,00	4.066.090.840,00	4.566.082.690,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.894.699.556,00	4.066.090.840,00	4.566.082.690,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.000.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	513.994.650,00	25.007.050,00	375.056.250,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	513.994.650,00	25.007.050,00	375.056.250,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	488.994.650,00	25.007.050,00	375.056.250,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	54.450.000,00	150.018.000,00	110.017.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	54.450.000,00	150.018.000,00	110.017.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	54.450.000,00	70.018.000,00	70.018.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0,00	80.000.000,00	39.999.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	580.092.000,00	580.092.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	580.092.000,00	580.092.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0,00	87.013.000,00	87.013.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0,00	319.052.000,00	319.052.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	0,00	174.027.000,00	174.027.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.226.254.906,00	3.310.973.790,00	3.500.916.790,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.794.490.106,00	2.308.339.000,00	2.308.339.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.794.490.106,00	2.308.339.000,00	2.308.339.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.142.000,00	248.718.250,00	268.991.250,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.400.100,00	5.455.250,00	5.455.250,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.233.000,00	43.325.000,00	44.775.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.258.000,00	17.020.500,00	17.115.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.700.000,00	25.660.000,00	26.999.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.996.100,00	36.696.500,00	36.696.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.554.800,00	120.561.000,00	137.950.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	414.900.000,00	126.225.000,00	242.725.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.000.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.900.000,00	126.225.000,00	242.725.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.065.000,00	530.920.500,00	565.090.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.074.000,00	105.415.500,00	105.415.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.660.000,00	25.050.000,00	15.660.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	406.331.000,00	396.455.000,00	440.015.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.657.800,00	96.771.040,00	115.771.040,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	16.500.000,00	21.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.300.000,00	26.500.000,00	40.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	4.815.800,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.542.000,00	53.771.040,00	53.771.040,00
2.22.3.26.2.19.01.0000						Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.554.771.513,00	11.485.142.749,00	15.892.902.421,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.137.029.000,00	2.784.992.755,00	1.921.173.413,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	384.940.000,00	1.222.058.000,00	190.328.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	384.940.000,00	1.222.058.000,00	190.328.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	55.000.000,00	1.042.058.000,00	10.328.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	329.940.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.452.089.000,00	1.432.493.755,00	1.600.404.413,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	552.089.000,00	779.999.755,00	879.993.063,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	552.089.000,00	779.999.755,00	879.993.063,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00	520.419.000,00	327.277.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.100.000.000,00	520.419.000,00	327.277.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	800.000.000,00	132.075.000,00	393.134.350,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	800.000.000,00	132.075.000,00	393.134.350,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	130.441.000,00	130.441.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000,00	130.441.000,00	130.441.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000,00	130.441.000,00	130.441.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	10.117.742.513,00	8.550.184.994,00	13.571.764.008,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.619.271.000,00	4.173.760.994,00	6.458.241.330,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.019.120.600,00	3.943.760.044,00	5.935.920.330,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.019.120.600,00	3.943.760.044,00	5.935.920.330,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.150.400,00	230.000.950,00	522.321.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	600.150.400,00	230.000.950,00	522.321.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.542.500.000,00	246.608.650,00	2.913.634.328,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.542.500.000,00	246.608.650,00	2.913.634.328,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	88.300.000,00	50.008.650,00	50.006.650,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.454.200.000,00	196.600.000,00	2.863.627.678,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	25.000.000,00	0,00	0,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	0,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	25.000.000,00	0,00	0,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	121.200.000,00	0,00	68.973.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	121.200.000,00	0,00	68.973.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	121.200.000,00	0,00	68.973.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.809.771.513,00	4.129.815.350,00	4.130.915.350,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.649.951.433,00	3.139.104.000,00	3.140.204.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.649.951.433,00	3.139.104.000,00	3.140.204.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.000.000,00	132.516.250,00	132.516.250,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	7.503.000,00	7.503.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	80.013.350,00	80.013.350,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.320.080,00	802.695.100,00	802.695.100,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000,00	145.407.100,00	145.407.100,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	10.160.000,00	10.160.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	683.320.080,00	643.128.000,00	643.128.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.300.000.000,00	149.965.000,00	399.965.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.300.000.000,00	149.965.000,00	399.965.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	500.000.000,00	18.376.000,00	18.376.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000,00	18.376.000,00	18.376.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000,00	18.376.000,00	18.376.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	400.000.000,00	115.981.000,00	115.981.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000,00	115.981.000,00	115.981.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000,00	115.981.000,00	115.981.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.400.000.000,00	15.608.000,00	265.608.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	900.000.000,00	15.608.000,00	265.608.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	400.000.000,00	15.608.000,00	265.608.000,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	500.000.000,00	0,00	0,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	500.000.000,00	0,00	0,00
2.22.3.26.2.19.01.0000	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	500.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.229.700.147,00	4.333.674.500,00	4.138.983.750,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.229.700.147,00	4.333.674.500,00	4.138.983.750,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.079.635.147,00	4.153.702.500,00	3.959.011.750,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.900.000.000,00	329.976.800,00	129.990.050,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.400.000.000,00	99.886.800,00	99.880.050,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	200.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	39.891.550,00	39.884.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	100.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,00	59.995.250,00	59.995.250,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	200.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	100.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	230.090.000,00	30.110.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.980.000,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	50.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	200.000.000,00	30.110.000,00	30.110.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	50.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.079.635.147,00	3.823.725.700,00	3.829.021.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.314.732.147,00	3.063.599.000,00	2.894.115.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.314.732.147,00	3.063.599.000,00	2.894.115.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.000.000,00	222.585.500,00	222.585.500,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	15.805.900,00	15.805.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	45.764.000,00	45.764.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	26.057.000,00	26.057.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	21.758.000,00	21.758.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	13.720.000,00	13.720.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	99.480.600,00	99.480.600,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.000.000,00	60.350.000,00	60.350.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	25.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	44.350.000,00	44.350.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.903.000,00	386.091.200,00	360.891.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.300.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.603.000,00	343.291.200,00	318.091.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.000.000,00	91.100.000,00	291.080.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	58.120.000,00	58.120.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	0,00	199.980.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	150.065.000,00	179.972.000,00	179.972.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	134.065.000,00	179.972.000,00	179.972.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	114.065.000,00	164.032.000,00	164.032.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	42.000.000,00	88.277.000,00	88.277.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	25.996.000,00	32.726.000,00	32.726.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	46.069.000,00	43.029.000,00	43.029.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000,00	15.940.000,00	15.940.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	20.000.000,00	15.940.000,00	15.940.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	16.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	16.000.000,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	16.000.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pertanian	16.944.322.658,00	22.039.994.000,00	22.072.854.800,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	16.944.322.658,00	22.039.994.000,00	22.072.854.800,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	16.944.322.658,00	22.039.994.000,00	22.072.854.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	990.000.000,00	3.846.501.450,00	3.955.282.700,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	20.000.000,00	24.785.000,00	23.525.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20.000.000,00	24.785.000,00	23.525.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	2.361.816.450,00	2.412.000.450,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100.000.000,00	2.161.787.000,00	2.169.480.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	150.000.000,00	100.016.000,00	242.520.450,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	150.000.000,00	100.013.450,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	20.000.000,00	19.004.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	70.000.000,00	20.000.000,00	19.004.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	500.000.000,00	1.439.900.000,00	1.500.753.250,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	500.000.000,00	1.439.900.000,00	1.500.753.250,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	260.000.000,00	2.099.579.400,00	2.201.958.400,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	35.000.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	35.000.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	225.000.000,00	2.099.579.400,00	2.201.958.400,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	200.000.000,00	1.899.995.400,00	2.005.690.400,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	25.000.000,00	199.584.000,00	196.268.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	827.875.000,00	80.000.000,00	55.297.050,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	80.000.000,00	55.297.050,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	80.000.000,00	55.297.050,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	752.875.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	752.875.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	15.000.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	15.000.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	15.000.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.076.500.000,00	669.179.550,00	328.972.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.076.500.000,00	669.179.550,00	328.972.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	126.500.000,00	150.533.400,00	76.900.400,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100.000.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	850.000.000,00	518.646.150,00	252.071.600,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.774.947.658,00	15.331.033.600,00	15.517.644.650,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.508.702.258,00	13.155.860.000,00	13.155.860.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.508.702.258,00	13.155.860.000,00	13.155.860.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.000.000,00	266.313.000,00	370.745.400,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.900.000,00	5.059.000,00	6.024.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	40.450.000,00	53.696.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	9.232.000,00	12.232.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.100.000,00	27.016.000,00	33.592.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	28.950.000,00	30.750.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	155.606.000,00	234.451.400,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.605.745.400,00	1.595.340.600,00	1.677.519.250,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.000.000,00	60.010.000,00	129.228.650,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.518.745.400,00	1.516.230.600,00	1.529.190.600,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.500.000,00	313.520.000,00	313.520.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	299.520.000,00	299.520.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000						Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.709.400.257,00	6.334.348.250,00	6.325.814.250,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.009.975.500,00	1.216.039.650,00	1.249.005.650,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.009.975.500,00	1.216.039.650,00	1.249.005.650,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	65.000.000,00	44.620.950,00	41.120.950,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	65.000.000,00	44.620.950,00	41.120.950,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	65.000.000,00	44.620.950,00	41.120.950,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	750.000.000,00	0,00	51.466.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	750.000.000,00	0,00	51.466.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	750.000.000,00	0,00	51.466.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	124.316.500,00	109.581.000,00	104.581.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	50.860.500,00	58.740.000,00	53.740.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	50.860.500,00	58.740.000,00	53.740.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	0,00	0,00	0,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	73.456.000,00	50.841.000,00	50.841.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	73.456.000,00	50.841.000,00	50.841.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	70.659.000,00	1.061.837.700,00	1.051.837.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.318.000,00	960.960.000,00	960.960.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	33.318.000,00	960.960.000,00	960.960.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	37.341.000,00	100.877.700,00	90.877.700,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.341.000,00	53.843.700,00	48.843.700,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	0,00	47.034.000,00	42.034.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.699.424.757,00	5.118.308.600,00	5.076.808.600,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4.699.424.757,00	5.118.308.600,00	5.076.808.600,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.699.424.757,00	5.118.308.600,00	5.076.808.600,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.363.257.257,00	4.385.165.000,00	4.239.337.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.363.257.257,00	4.385.165.000,00	4.239.337.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.024.500,00	190.334.900,00	205.902.900,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	5.031.900,00	5.031.900,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000,00	30.000.000,00	34.412.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	10.000.000,00	16.510.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	10.048.000,00	10.048.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.024.500,00	135.255.000,00	139.901.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	435.000.000,00	7.950.000,00	82.750.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	75.000.000,00	0,00	20.500.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000,00	7.950.000,00	62.250.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	0,00	0,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.643.000,00	484.588.700,00	497.548.700,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	57.995.500,00	57.995.500,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	516.643.000,00	426.593.200,00	439.553.200,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.500.000,00	47.270.000,00	48.270.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	7.270.000,00	8.270.000,00
3.32.2.07.0.00.01.0000	3	32	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat Daerah	32.200.000.000,00	35.888.164.214,00	38.294.372.804,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	32.200.000.000,00	35.888.164.214,00	38.294.372.804,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	32.200.000.000,00	35.888.164.214,00	38.294.372.804,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.846.408.790,00	6.176.580.550,00	8.399.248.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	643.436.100,00	327.360.500,00	347.390.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	106.299.900,00	99.872.000,00	85.272.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	381.784.200,00	100.023.000,00	157.623.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	155.352.000,00	127.465.500,00	104.495.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.896.409.690,00	5.626.500.750,00	7.345.931.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.798.676.690,00	5.599.636.000,00	7.345.931.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	53.003.000,00	12.142.250,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	44.730.000,00	14.722.500,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	249.999.000,00	149.999.800,00	653.237.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	84.127.900,00	68.749.600,00	414.424.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	109.476.100,00	50.630.600,00	177.406.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	56.395.000,00	30.619.600,00	61.406.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	56.564.000,00	72.719.500,00	52.689.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	56.564.000,00	72.719.500,00	52.689.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	783.567.700,00	686.840.150,00	876.827.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	151.689.000,00	123.585.600,00	293.575.250,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	21.576.000,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	50.200.000,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	79.913.000,00	123.585.600,00	293.575.250,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	175.000.000,00	149.999.900,00	169.997.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	71.314.000,00	54.663.000,00	54.663.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	51.517.000,00	51.505.900,00	51.505.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	52.169.000,00	43.831.000,00	63.829.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400.297.600,00	386.829.250,00	386.829.250,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	172.710.600,00	186.623.250,00	186.623.250,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	165.908.800,00	161.941.000,00	161.941.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	61.678.200,00	38.265.000,00	38.265.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	56.581.100,00	26.425.400,00	26.425.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	29.545.100,00	26.425.400,00	26.425.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	27.036.000,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.570.023.510,00	29.024.743.514,00	29.018.296.104,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.540.433.000,00	9.431.020.000,00	9.439.020.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.540.433.000,00	9.431.020.000,00	9.439.020.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.306.760.500,00	2.771.925.000,00	2.892.921.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	128.640.000,00	125.040.000,00	125.040.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.812.000,00	150.656.000,00	177.912.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.173.500,00	40.021.000,00	113.515.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.378.805.000,00	1.019.860.000,00	1.019.856.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.700.000,00	35.410.000,00	55.660.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.437.630.000,00	1.400.938.000,00	1.400.938.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.685.543.600,00	355.500.000,00	3.366.108.440,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.325.000.000,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	200.000.000,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.543.600,00	355.500.000,00	466.400.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000.000,00	0,00	2.899.708.440,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.274.165.936,00	7.370.211.264,00	7.249.411.264,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.400.000,00	25.000.000,00	37.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.442.043.336,00	1.445.018.664,00	1.445.018.664,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.663.200.000,00	1.502.500.000,00	1.502.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.118.522.600,00	4.397.692.600,00	4.264.892.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.460.106.400,00	4.386.205.000,00	1.335.955.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.150.000,00	245.455.000,00	245.455.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.021.956.400,00	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	20.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	0,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	3.050.250.000,00	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	908.473.000,00	1.003.392.000,00	1.003.392.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	178.473.000,00	220.892.000,00	220.892.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	270.000.000,00	282.500.000,00	282.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	16.325.000,00	421.489.000,00	421.489.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	16.325.000,00	421.489.000,00	421.489.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	249.994.800,00	150.001.250,00	174.999.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	85.105.800,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	76.319.000,00	50.000.250,00	50.000.250,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	88.570.000,00	50.001.000,00	74.999.150,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.893.221.274,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	1.893.221.274,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	44.610.768.252,00	38.901.520.498,00	42.999.999.787,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	44.610.768.252,00	38.901.520.498,00	42.999.999.787,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.262.388.252,00	18.285.376.100,00	22.229.565.350,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.000.000.000,00	6.154.028.800,00	5.559.745.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5.000.000.000,00	5.763.428.800,00	5.169.145.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	0,00	390.600.000,00	390.600.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.250.000.000,00	4.020.134.000,00	3.670.289.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	650.000.000,00	929.058.000,00	818.948.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	650.000.000,00	929.167.250,00	818.948.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	650.000.000,00	720.636.250,00	677.464.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	650.000.000,00	720.636.250,00	677.464.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	650.000.000,00	720.636.250,00	677.464.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	4.600.000.000,00	4.821.418.000,00	3.428.055.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	400.000.000,00	406.360.000,00	370.367.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.000.000.000,00	3.206.698.000,00	2.097.928.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.200.000.000,00	1.208.360.000,00	959.760.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	10.412.388.252,00	3.289.795.300,00	9.571.475.850,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	9.712.388.252,00	2.725.465.300,00	9.007.145.850,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	700.000.000,00	564.330.000,00	564.330.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.348.380.000,00	20.616.144.398,00	20.770.434.437,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000.000,00	2.766.055.066,00	2.766.055.066,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.000.000.000,00	2.766.055.066,00	2.766.055.066,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.830.000.000,00	1.857.064.750,00	1.923.020.950,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	51.941.750,00	51.941.750,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.100.000.000,00	514.745.000,00	542.521.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000,00	176.411.000,00	176.593.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000,00	427.100.000,00	473.150.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	250.000.000,00	372.705.000,00	372.709.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	314.162.000,00	306.106.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.750.000.000,00	257.950.000,00	144.600.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000.000,00	257.950.000,00	144.600.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.933.404.000,00	1.770.148.566,00	1.693.218.840,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	373.000.000,00	382.914.566,00	337.664.840,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.415.404.000,00	1.351.234.000,00	1.319.554.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.000.000,00	1.000.160.000,00	1.410.823.565,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	16.750.000,00	12.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.000.000,00	333.210.000,00	182.710.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000,00	300.200.000,00	866.113.565,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12.134.976.000,00	12.635.041.016,00	12.619.541.016,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.544.976.000,00	11.828.541.016,00	11.828.541.016,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	500.000.000,00	716.500.000,00	701.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	400.000.000,00	329.725.000,00	213.175.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	400.000.000,00	329.725.000,00	213.175.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	0,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000						Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	5.577.297.050,00	4.861.811.450,00	5.161.811.350,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.577.297.050,00	4.861.811.450,00	5.161.811.350,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	4.984.297.050,00	4.536.811.450,00	4.836.811.350,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.215.781.600,00	450.738.150,00	750.738.050,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.002.781.600,00	404.206.950,00	704.206.850,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	320.000.000,00	114.322.000,00	114.322.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	682.781.600,00	289.884.950,00	589.884.850,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	35.000.000,00	25.708.200,00	25.708.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	35.000.000,00	25.708.200,00	25.708.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	178.000.000,00	20.823.000,00	20.823.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	28.000.000,00	20.823.000,00	20.823.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	391.707.000,00	356.178.750,00	356.178.750,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	110.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.000.000,00	52.195.500,00	52.195.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.000.000,00	122.804.500,00	122.804.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	61.707.000,00	24.997.500,00	24.997.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.707.000,00	24.997.500,00	24.997.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	220.000.000,00	156.181.250,00	156.181.250,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	120.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000,00	86.181.250,00	86.181.250,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.376.808.450,00	3.729.894.550,00	3.729.894.550,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.394.508.450,00	2.940.332.000,00	2.940.332.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.394.508.450,00	2.940.332.000,00	2.940.332.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.300.000,00	190.932.750,00	190.932.750,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.800.000,00	7.037.000,00	7.037.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	27.618.000,00	27.618.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.500.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000,00	13.334.900,00	13.334.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	104.542.850,00	104.542.850,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271.500.000,00	49.125.000,00	49.125.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	271.500.000,00	49.125.000,00	49.125.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.000.000,00	504.004.800,00	504.004.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	111.550.000,00	111.550.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	14.770.000,00	14.770.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.000.000,00	372.684.800,00	372.684.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.500.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.000.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	593.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	593.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	458.000.000,00	255.528.100,00	255.528.100,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	90.000.000,00	137.325.000,00	137.325.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	368.000.000,00	118.203.100,00	118.203.100,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	135.000.000,00	69.471.900,00	69.471.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	135.000.000,00	69.471.900,00	69.471.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000						Badan Keuangan Daerah	126.665.951.012,00	130.390.809.150,00	130.801.135.450,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02				KEUANGAN	126.665.951.012,00	130.390.809.150,00	130.801.135.450,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	119.137.173.895,00	120.712.622.750,00	121.047.949.050,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.919.400.004,00	1.990.327.550,00	2.106.212.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	300.041.000,00	328.592.550,00	239.965.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	262.800.000,00	262.960.000,00	248.245.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	124.326.000,00	337.070.000,00	305.710.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	944.173.000,00	915.291.000,00	961.608.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	288.060.000,00	146.414.000,00	350.684.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	435.003.006,00	309.896.800,00	529.338.650,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.557.000,00	54.525.300,00	54.525.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	363.446.000,00	255.371.500,00	474.813.350,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	465.844.008,00	329.996.700,00	329.996.700,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	64.012.000,00	50.671.000,00	50.671.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	163.036.000,00	105.394.000,00	105.394.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	222.423.000,00	163.813.950,00	163.813.950,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	11.565.000,00	10.117.750,00	10.117.750,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4.808.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	116.121.431.277,00	117.991.943.200,00	117.991.943.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	113.121.431.272,00	112.991.943.200,00	112.991.943.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	195.495.600,00	90.458.500,00	90.458.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	15.497.000,00	22.530.000,00	22.530.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	179.998.600,00	67.928.500,00	67.928.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	494.329.009,00	349.788.500,00	349.788.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	494.329.009,00	349.788.500,00	349.788.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	1,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	55.810.000,00	69.299.000,00	69.299.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	122.891.000,00	101.024.000,00	101.024.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	67.930.000,00	51.406.000,00	51.406.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	247.698.000,00	128.059.500,00	128.059.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	685.726.609,00	767.394.500,00	767.394.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	685.726.609,00	767.394.500,00	767.394.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	231.034.600,00	250.877.500,00	250.877.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	49.120.000,00	59.217.000,00	59.217.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	188.122.000,00	231.661.000,00	231.661.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	169.100.000,00	177.214.000,00	177.214.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	48.350.000,00	48.425.000,00	48.425.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.348.721.499,00	8.561.003.400,00	8.636.003.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000.002,00	7.083.895.500,00	7.083.895.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000.000,00	7.083.895.500,00	7.083.895.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.000.002,00	564.213.900,00	564.213.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	132.990.000,00	132.990.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	45.023.500,00	45.023.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	55.290.000,00	55.290.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.000.000,00	140.910.900,00	140.910.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	174.999.500,00	174.999.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.221.480,00	838.544.000,00	838.544.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.000.000,00	291.600.000,00	291.600.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	39.994.400,00	39.994.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.221.480,00	496.949.600,00	496.949.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.500.003,00	74.350.000,00	149.350.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000,00	60.350.000,00	135.350.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.656.401.757,00	6.243.950.096,00	6.343.943.096,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	6.046.401.757,00	5.652.055.096,00	5.752.052.096,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.365.000.000,00	1.279.367.000,00	1.379.364.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	190.000.000,00	65.045.000,00	65.042.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	30.000.000,00	12.502.000,00	12.500.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	70.000.000,00	21.973.000,00	21.973.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	30.000.000,00	8.070.000,00	8.070.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.000.000,00	12.506.000,00	12.505.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	30.000.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	60.000.000,00	42.007.000,00	42.007.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	25.000.000,00	5.007.000,00	5.007.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	35.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.045.000.000,00	997.693.000,00	1.097.693.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	25.000.000,00	28.748.000,00	28.748.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	80.000.000,00	6.750.000,00	106.750.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	925.000.000,00	959.772.000,00	959.772.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15.000.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	70.000.000,00	174.622.000,00	174.622.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	20.000.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	30.000.000,00	161.474.000,00	161.474.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20.000.000,00	9.998.000,00	9.998.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.681.401.757,00	4.372.688.096,00	4.372.688.096,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	14.993.000,00	14.993.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	14.993.000,00	14.993.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.840.701.077,00	3.856.146.000,00	3.856.146.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.840.701.077,00	3.856.146.000,00	3.856.146.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.000.000,00	156.500.200,00	156.500.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	3.994.000,00	3.994.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	7.498.000,00	7.498.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	15.010.000,00	15.010.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	15.000.200,00	15.000.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	89.998.000,00	89.998.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.700.680,00	283.498.896,00	283.498.896,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.837.800,00	50.840.496,00	50.840.496,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.862.880,00	229.658.400,00	229.658.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	47.550.000,00	47.550.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	610.000.000,00	591.895.000,00	591.891.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	610.000.000,00	591.895.000,00	591.891.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	10.000.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	600.000.000,00	590.225.000,00	590.221.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	600.000.000,00	590.225.000,00	590.221.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat Kabupaten	9.443.604.600,00	8.304.887.200,00	11.074.887.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.443.604.600,00	8.304.887.200,00	11.074.887.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	9.443.604.600,00	8.304.887.200,00	11.074.887.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.035.644.000,00	1.035.594.300,00	1.368.890.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	975.644.000,00	975.598.550,00	1.225.809.250,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	117.416.000,00	117.411.000,00	115.930.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	142.898.000,00	142.885.850,00	234.985.850,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	166.833.000,00	166.823.300,00	202.645.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	148.769.000,00	148.760.000,00	104.040.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	138.350.000,00	138.347.100,00	240.237.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	138.865.000,00	138.860.000,00	205.460.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	122.513.000,00	122.511.300,00	122.511.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60.000.000,00	59.995.750,00	143.080.750,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60.000.000,00	59.995.750,00	143.080.750,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	700.000.000,00	575.510.450,00	1.018.518.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	150.000.000,00	115.189.000,00	115.188.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	150.000.000,00	115.189.000,00	115.188.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	550.000.000,00	460.321.450,00	903.330.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000,00	161.834.750,00	423.775.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	150.000.000,00	149.994.700,00	164.385.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	200.000.000,00	148.492.000,00	315.169.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.707.960.600,00	6.693.782.450,00	8.687.479.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.000.000,00	70.986.000,00	64.761.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.000.000,00	70.986.000,00	64.761.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.947.410.600,00	5.119.783.000,00	4.832.783.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.947.410.600,00	5.119.783.000,00	4.832.783.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000,00	121.853.600,00	663.460.600,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000,00	121.853.600,00	663.460.600,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	850.253.000,00	239.993.600,00	603.306.600,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000,00	5.000.000,00	12.777.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.568.000,00	39.999.000,00	66.882.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.035.000,00	9.999.600,00	65.484.600,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.700.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.450.000,00	19.995.000,00	19.995.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.000.000,00	140.000.000,00	413.168.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000,00	632.200.000,00	1.055.625.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	500.000.000,00	850.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	11.400.000,00	49.400.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	120.800.000,00	156.225.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.297.000,00	361.082.250,00	445.603.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.660.000,00	94.999.250,00	109.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.900.000,00	14.930.000,00	14.930.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335.737.000,00	249.153.000,00	319.173.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.000.000,00	147.884.000,00	1.021.940.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	66.384.000,00	940.440.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						Kecamatan Pulau Punjung	2.053.696.060,00	2.630.440.950,00	2.710.009.950,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.053.696.060,00	2.630.440.950,00	2.710.009.950,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	2.053.696.060,00	2.630.440.950,00	2.710.009.950,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.000.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.000.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.000.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.000.000,00	10.215.000,00	49.115.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000,00	10.215.000,00	49.115.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	10.215.000,00	49.115.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	8.160.000,00	5.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	8.160.000,00	5.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	8.160.000,00	5.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.017.696.060,00	2.604.785.950,00	2.647.914.950,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.659.848.660,00	2.311.797.000,00	2.321.797.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.659.848.660,00	2.311.797.000,00	2.321.797.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.000.000,00	90.296.950,00	107.365.950,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	15.430.000,00	16.828.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	6.636.000,00	6.636.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	13.000.000,00	28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	12.230.000,00	11.590.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	41.009.950,00	42.320.950,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	1.500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.347.400,00	187.192.000,00	200.752.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.347.400,00	174.862.000,00	188.422.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.500.000,00	15.500.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	11.500.000,00	14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						Kecamatan Sitiung	2.010.227.273,00	1.987.917.750,00	2.002.917.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.445.200,00	17.337.500,00	17.337.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.445.200,00	17.337.500,00	17.337.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.445.200,00	17.337.500,00	17.337.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.520.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	7.04		[object Object]	8.520.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	7.04	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.520.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.600.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.600.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.600.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.970.662.073,00	1.952.750.250,00	1.967.750.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.602.776.773,00	1.674.683.000,00	1.674.683.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.602.776.773,00	1.674.683.000,00	1.674.683.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.555.400,00	145.208.050,00	160.208.100,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.170.500,00	2.368.500,00	2.368.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.552.000,00	10.904.000,00	10.914.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.076.200,00	55.130.000,00	55.130.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000,00	10.050.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.054.700,00	7.501.200,00	7.781.100,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.202.000,00	59.254.350,00	69.014.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	17.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.329.900,00	115.659.200,00	115.659.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.047.500,00	8.670.000,00	8.670.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.282.400,00	104.989.200,00	104.989.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						Kecamatan Koto Baru	2.103.065.505,00	2.253.847.600,00	2.352.831.700,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.000.000,00	3.000.000,00	3.455.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.455.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.500.000,00	3.000.000,00	3.455.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.000.000,00	12.000.000,00	13.344.900,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	13.344.900,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	13.344.900,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.000.000,00	3.000.000,00	3.455.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.000.000,00	3.000.000,00	3.455.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.000.000,00	3.000.000,00	3.455.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	9.000.000,00	6.745.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000,00	9.000.000,00	6.745.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000,00	9.000.000,00	6.745.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.069.065.505,00	2.226.847.600,00	2.325.831.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.200.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.601.872.145,00	1.823.027.450,00	1.827.018.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.601.872.145,00	1.823.027.450,00	1.827.018.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.000.000,00	93.487.350,00	173.961.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	9.000.000,00	31.050.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	4.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	59.987.350,00	118.411.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.193.360,00	290.332.800,00	304.852.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.500.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287.193.360,00	283.334.800,00	297.854.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						Kecamatan Sungai Rumbai	1.750.860.212,00	1.862.413.200,00	1.895.413.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.993.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.993.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.662.000,00	700.000,00	700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.331.000,00	850.000,00	850.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.533.980,00	13.860.000,00	13.860.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.533.980,00	13.860.000,00	13.860.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.533.980,00	13.860.000,00	13.860.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.872.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.872.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.872.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.000.000,00	3.210.000,00	3.035.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	3.210.000,00	3.035.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000,00	3.210.000,00	3.035.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.721.461.232,00	1.840.918.200,00	1.874.093.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.395.598.292,00	1.596.282.000,00	1.596.282.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.395.598.292,00	1.596.282.000,00	1.596.282.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.401.020,00	95.828.800,00	113.603.800,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	534.000,00	534.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	6.215.000,00	7.365.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	3.100.000,00	3.475.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	10.716.000,00	25.716.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	4.387.800,00	4.387.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.401.020,00	70.876.000,00	72.126.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	0,00	15.400.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	0,00	15.400.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.761.920,00	132.307.400,00	132.307.400,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	15.780.000,00	15.780.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.761.920,00	113.927.400,00	113.927.400,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.700.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.200.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000						Kecamatan Sembilan Koto	1.498.222.619,00	1.611.969.000,00	1.646.986.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.800.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.820.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.820.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.820.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.180.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.180.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.180.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.482.222.619,00	1.601.299.000,00	1.636.316.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.138.235.459,00	1.214.419.000,00	1.214.419.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.138.235.459,00	1.214.419.000,00	1.214.419.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.000.000,00	112.350.000,00	134.067.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.022.500,00	2.022.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	10.124.000,00	12.506.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	6.295.000,00	6.572.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	10.763.000,00	25.763.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	7.510.000,00	11.560.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	1.500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.500.000,00	75.635.500,00	75.643.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.000.000,00	0,00	12.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	0,00	12.300.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.487.160,00	152.309.800,00	152.309.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	5.046.000,00	5.046.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.487.160,00	145.363.800,00	145.363.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.500.000,00	122.220.200,00	123.220.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.500.000,00	16.500.000,00	17.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	99.970.200,00	99.970.200,00
7.01.0.00.0.00.06.0000						Kecamatan Timpeh	1.493.627.912,00	1.787.023.550,00	1.802.023.550,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.450.000,00	23.357.750,00	24.579.950,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.450.000,00	23.357.750,00	24.579.950,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.450.000,00	23.357.750,00	24.579.950,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.450.000,00	32.673.000,00	47.540.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.450.000,00	32.673.000,00	47.540.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.450.000,00	32.673.000,00	47.540.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.468.727.912,00	1.730.992.800,00	1.729.903.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.299.118.752,00	1.493.227.800,00	1.493.227.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.299.118.752,00	1.493.227.800,00	1.493.227.800,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.169.160,00	176.265.000,00	179.675.800,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	26.621.400,00	30.032.200,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.169.160,00	149.643.600,00	149.643.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.440.000,00	61.500.000,00	57.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.440.000,00	61.500.000,00	57.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000						Kecamatan Koto Salak	1.656.308.616,00	1.617.164.200,00	1.666.664.200,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.280.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.280.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.180.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.100.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.520.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.520.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.520.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.643.508.616,00	1.600.484.200,00	1.649.984.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.303.106.696,00	1.347.233.000,00	1.350.733.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.303.106.696,00	1.347.233.000,00	1.350.733.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.000.000,00	93.151.300,00	109.653.100,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	10.229.000,00	10.229.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	5.086.000,00	5.746.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	10.200.000,00	25.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	7.549.800,00	7.594.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	57.941.500,00	58.438.500,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.700.000,00	12.300.000,00	27.600.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	6.500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.200.000,00	12.300.000,00	27.600.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.701.920,00	129.329.900,00	144.028.100,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.500.000,00	5.002.500,00	5.002.500,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.201.920,00	122.327.400,00	137.025.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.500.000,00	18.470.000,00	17.970.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	9.500.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000						Kecamatan Asam Jujuhan	1.109.551.520,00	1.298.242.000,00	1.338.242.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.900.000,00	8.862.000,00	15.858.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.900.000,00	8.862.000,00	15.858.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.600.000,00	4.112.000,00	12.058.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.300.000,00	4.750.000,00	3.800.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.040.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.040.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.040.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.420.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.420.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.420.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.075.191.520,00	1.276.700.000,00	1.306.204.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	729.519.120,00	978.348.000,00	978.348.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	729.519.120,00	978.348.000,00	978.348.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.000.000,00	103.370.000,00	132.874.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.134.400,00	2.134.400,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	12.684.000,00	12.698.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	5.341.000,00	5.341.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	17.142.000,00	37.132.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	7.930.600,00	7.948.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	58.138.000,00	67.620.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.640.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.640.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.532.400,00	172.482.000,00	172.482.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.532.400,00	166.422.000,00	166.422.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000						Kecamatan Koto Besar	2.111.769.480,00	2.141.759.600,00	2.156.759.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.346.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.346.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.776.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.570.000,00	750.000,00	750.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.121.800,00	9.275.000,00	9.275.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.121.800,00	9.275.000,00	9.275.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.121.800,00	9.275.000,00	9.275.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.872.200,00	3.740.000,00	3.740.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.872.200,00	3.740.000,00	3.740.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.872.200,00	3.740.000,00	3.740.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.960.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.960.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.960.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.082.469.480,00	2.119.074.600,00	2.134.074.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.747.402.320,00	1.850.362.000,00	1.850.362.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.747.402.320,00	1.850.362.000,00	1.850.362.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.000.000,00	98.280.800,00	113.280.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	9.848.800,00	9.848.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	7.687.000,00	22.687.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	7.294.100,00	7.294.100,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	67.515.900,00	67.515.900,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.867.160,00	151.681.800,00	151.681.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000,00	7.358.000,00	7.358.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.367.160,00	143.323.800,00	143.323.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.500.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	750.000,00	750.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000						Kecamatan Padang Laweh	1.614.700.264,00	1.529.700.800,00	1.584.700.800,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.660.000,00	3.700.000,00	3.550.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.660.000,00	3.700.000,00	3.550.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.160.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.500.000,00	2.200.000,00	2.050.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.940.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.940.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.940.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.595.200.264,00	1.511.525.800,00	1.566.675.800,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.189.413.584,00	1.269.456.000,00	1.269.456.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.189.413.584,00	1.269.456.000,00	1.269.456.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.000.000,00	91.177.400,00	106.577.400,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.906.800,00	1.906.800,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	10.148.500,00	10.198.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	5.246.000,00	6.271.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	10.200.000,00	24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	7.579.400,00	8.004.400,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	56.096.700,00	56.196.700,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.500.000,00	12.300.000,00	50.800.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	0,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	12.300.000,00	25.800.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.286.680,00	118.842.400,00	118.842.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.286.680,00	115.247.400,00	115.247.400,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.000.000,00	19.750.000,00	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.750.000,00	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000						Kecamatan Tiumang	1.628.225.720,00	1.691.692.800,00	1.706.692.800,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000,00	4.700.000,00	6.110.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000,00	4.700.000,00	6.110.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.500.000,00	2.900.000,00	4.310.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.000.000,00	11.690.000,00	11.690.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.000.000,00	11.690.000,00	11.690.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.000.000,00	11.690.000,00	11.690.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.598.225.720,00	1.672.302.800,00	1.685.892.800,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.235.693.320,00	1.313.259.000,00	1.313.259.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.235.693.320,00	1.313.259.000,00	1.313.259.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.000.000,00	97.381.900,00	112.423.700,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.214.600,00	2.214.600,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	11.377.000,00	11.377.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	6.963.000,00	6.963.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	9.843.300,00	9.885.100,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	4.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	51.984.000,00	51.984.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.000.000,00	49.850.000,00	33.700.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	49.850.000,00	33.700.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.032.400,00	190.401.900,00	205.100.100,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.500.000,00	8.499.900,00	8.499.900,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.532.400,00	179.902.000,00	194.600.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.500.000,00	21.410.000,00	21.410.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	29.268.721.399,00	25.056.144.030,00	26.106.141.730,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	29.268.721.399,00	25.056.144.030,00	26.106.141.730,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29.268.721.399,00	25.056.144.030,00	26.106.141.730,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.385.000.000,00	33.516.500,00	1.083.514.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.385.000.000,00	33.516.500,00	1.083.514.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.373.000.000,00	21.380.000,00	21.380.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12.000.000,00	12.136.500,00	12.136.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	0,00	0,00	1.049.997.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	26.093.000.000,00	23.125.875.980,00	23.142.089.480,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	26.093.000.000,00	23.125.875.980,00	23.142.089.480,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26.063.000.000,00	23.090.883.880,00	23.134.178.480,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.000.000,00	34.992.100,00	7.911.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	35.000.000,00	34.995.500,00	34.995.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	35.000.000,00	34.995.500,00	34.995.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15.000.000,00	14.991.000,00	14.991.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20.000.000,00	20.004.500,00	20.004.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	650.000.000,00	499.959.000,00	469.609.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	650.000.000,00	499.959.000,00	469.609.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	650.000.000,00	499.959.000,00	469.609.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.105.721.399,00	1.361.797.050,00	1.375.933.650,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	743.128.999,00	1.014.330.000,00	1.014.330.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	743.128.999,00	1.014.330.000,00	1.014.330.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.000.000,00	79.026.400,00	93.163.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	10.004.000,00	10.004.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	14.025.000,00	14.025.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	7.521.400,00	7.522.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	40.493.000,00	54.629.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.092.400,00	197.440.650,00	197.440.650,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000,00	18.000.450,00	18.000.450,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.092.400,00	172.720.200,00	172.720.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
						TOTAL	**1.016.241.880.004,00**	**1.073.714.835.025,00**	**1.075.361.835.025,00**

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

Bupati

SUTAN RISKA

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.092.400,00	197.440.650,00	197.440.650,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000,00	18.000.450,00	18.000.450,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.092.400,00	172.720.200,00	172.720.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
						TOTAL	**1.016.241.880.004,00**	**1.073.714.835.025,00**	**1.075.361.835.025,00**

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

Bupati

SUTAN RISKA

LAMPIRAN IX

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	377.039.000,00	0,00	0,00	0,00	377.039.000,00
2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.282.862.800,00	0,00	0,00	0,00	2.282.862.800,00
3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	942.917.800,00	10.500.000,00	0,00	0,00	953.417.800,00
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	48.494.000,00	0,00	0,00	0,00	48.494.000,00
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup	15.005.000,00	0,00	0,00	0,00	15.005.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	215.090.015,00	19.900.000,00	0,00	0,00	234.990.015,00
7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	516.361.300,00	259.608.060,00	0,00	0,00	775.969.360,00
8	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	4.407.969.100,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.409.469.100,00
9	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	19.759.000,00	0,00	0,00	0,00	19.759.000,00
11	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	9.233.116.400,00	1.436.522.765,00	0,00	0,00	10.669.639.165,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
13	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	493.725.004,00	0,00	0,00	0,00	493.725.004,00
14	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	608.534.600,00	74.272.000,00	0,00	0,00	682.806.600,00
15	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	3.401.180.000,00	0,00	0,00	3.401.180.000,00
16	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
17	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	44.113.500,00	0,00	0,00	0,00	44.113.500,00
18	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	9.803.822.400,00	223.270.000,00	0,00	0,00	10.027.092.400,00
19	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	10.272.163.169,00	40.153.558.952,00	0,00	0,00	50.425.722.121,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
20	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.943.903.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.945.903.000,00
21	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	11.331.226.550,00	0,00	0,00	0,00	11.331.226.550,00
22	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	485.919.750,00	34.390.720,00	0,00	0,00	520.310.470,00
23	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	115.981.000,00	0,00	0,00	0,00	115.981.000,00
24	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	265.608.000,00	0,00	0,00	0,00	265.608.000,00
25	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	18.376.000,00	0,00	0,00	0,00	18.376.000,00
26	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	580.092.000,00	0,00	0,00	0,00	580.092.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
27	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	10.320.000,00	0,00	0,00	0,00	10.320.000,00
29	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	30.174.500,00	0,00	0,00	0,00	30.174.500,00
30	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pangan dan Perikanan	70.041.500,00	0,00	0,00	0,00	70.041.500,00
31	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pangan dan Perikanan	3.072.833.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072.833.000,00
32	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110.017.650,00	0,00	0,00	0,00	110.017.650,00
33	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	896.081.750,00	296.496.040,00	0,00	0,00	1.192.577.790,00
34	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
35	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	19.100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00
37	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sembilan Koto	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
38	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	393.134.350,00	0,00	0,00	0,00	393.134.350,00
39	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	879.993.063,00	0,00	0,00	0,00	879.993.063,00
40	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	190.328.000,00	0,00	0,00	0,00	190.328.000,00
41	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	130.441.000,00	0,00	0,00	0,00	130.441.000,00
42	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	260.520.000,00	0,00	0,00	0,00	260.520.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
43	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	28.303.082.900,00	12.611.865.038,00	0,00	0,00	40.914.947.938,00
44	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1.506.612.550,00	0,00	0,00	0,00	1.506.612.550,00
45	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	81.183.890.322,00	24.778.598,00	0,00	0,00	81.208.668.920,00
46	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	372.331.000,00	0,00	0,00	0,00	372.331.000,00
47	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	21.202.290.687,00	5.457.318.813,00	0,00	0,00	26.659.609.500,00
49	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan	4.842.070.800,00	0,00	0,00	0,00	4.842.070.800,00
50	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
51	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	129.990.050,00	0,00	0,00	0,00	129.990.050,00
52	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.768.671.700,00	60.350.000,00	0,00	0,00	3.829.021.700,00
53	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.213.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213.500.000,00
54	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75.984.079,00	0,00	0,00	0,00	75.984.079,00
55	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.534.470.000,00	0,00	0,00	0,00	2.534.470.000,00
56	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77.548.450,00	0,00	0,00	0,00	77.548.450,00
57	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	459.519.550,00	0,00	0,00	0,00	459.519.550,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
58	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	222.000.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000.000,00
60	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34.692.700,00	0,00	0,00	0,00	34.692.700,00
61	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.584.095.600,00	31.900.000,00	0,00	0,00	4.615.995.600,00
62	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99.410.150,00	0,00	0,00	0,00	99.410.150,00
63	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	445.489.700,00	0,00	0,00	0,00	445.489.700,00
64	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91.510.300,00	0,00	0,00	0,00	91.510.300,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
65	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	363.023.835,00	0,00	0,00	0,00	363.023.835,00
66	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.051.837.700,00	0,00	0,00	0,00	1.051.837.700,00
67	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	51.466.000,00	0,00	0,00	0,00	51.466.000,00
68	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	104.581.000,00	0,00	0,00	0,00	104.581.000,00
69	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.999.758.600,00	77.050.000,00	0,00	0,00	5.076.808.600,00
70	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	41.120.950,00	0,00	0,00	0,00	41.120.950,00
71	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten	54.430.200,00	0,00	0,00	0,00	54.430.200,00
72	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laboratorium Kesehatan Daerah	252.392.000,00	0,00	0,00	0,00	252.392.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
73	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laboratorium Kesehatan Daerah	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00
74	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Beringin Sakti	671.691.000,00	0,00	0,00	0,00	671.691.000,00
75	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Beringin Sakti	314.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00
76	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Gunung Medan	722.253.000,00	0,00	0,00	0,00	722.253.000,00
77	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Gunung Medan	674.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	680.000.000,00
78	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Koto Baru	1.110.765.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.765.000,00
79	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Koto Baru	1.727.476.057,00	59.000.000,00	0,00	0,00	1.786.476.057,00
80	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Koto Besar	771.314.000,00	0,00	0,00	0,00	771.314.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
81	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Koto Besar	799.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	819.000.000,00
82	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Padang Laweh	700.474.000,00	0,00	0,00	0,00	700.474.000,00
83	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sialang	703.308.000,00	0,00	0,00	0,00	703.308.000,00
84	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sialang	555.370.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	575.370.000,00
85	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Silago	825.798.000,00	0,00	0,00	0,00	825.798.000,00
86	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Silago	815.033.934,00	31.000.000,00	0,00	0,00	846.033.934,00
87	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sitiung I	985.025.000,00	0,00	0,00	0,00	985.025.000,00
88	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sitiung I	1.179.664.537,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1.279.664.537,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
89	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sitiung II	725.745.200,00	0,00	0,00	0,00	725.745.200,00
90	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sitiung II	713.804.450,00	77.700.000,00	0,00	0,00	791.504.450,00
91	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sungai Dareh	1.053.042.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.042.000,00
92	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sungai Dareh	1.501.547.436,00	147.000.000,00	0,00	0,00	1.648.547.436,00
93	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sungai Limau	958.824.000,00	0,00	0,00	0,00	958.824.000,00
94	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sungai Limau	422.886.246,00	26.000.000,00	0,00	0,00	448.886.246,00
95	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sungai Rumbai	1.048.702.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048.702.000,00
96	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sungai Rumbai	972.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	1.017.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
97	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Timpeh	908.970.000,00	0,00	0,00	0,00	908.970.000,00
98	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Timpeh	557.243.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	577.243.000,00
99	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Tiumang	904.496.000,00	0,00	0,00	0,00	904.496.000,00
100	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tiumang	476.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	496.000.000,00
101	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	87.695.351.000,00	6.515.948.000,00	0,00	0,00	94.211.299.000,00
103	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	700.000.000,00	3.660.000.000,00	0,00	0,00	4.360.000.000,00
104	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	6.002.237.800,00	597.762.200,00	0,00	0,00	6.600.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
105	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00
107	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.989.900,00	0,00	0,00	0,00	32.989.900,00
108	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.078.484.200,00	0,00	0,00	0,00	4.078.484.200,00
109	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	179.972.000,00	0,00	0,00	0,00	179.972.000,00
111	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Timpeh	24.579.950,00	0,00	0,00	0,00	24.579.950,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
113	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Timpeh	47.540.000,00	0,00	0,00	0,00	47.540.000,00
114	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.993.100,00	0,00	0,00	0,00	14.993.100,00
115	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	653.237.800,00	0,00	0,00	0,00	653.237.800,00
116	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah	16.324.067.664,00	3.255.208.440,00	0,00	0,00	19.579.276.104,00
117	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	356.178.750,00	0,00	0,00	0,00	356.178.750,00
118	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	729.915.050,00	0,00	0,00	0,00	729.915.050,00
119	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.981.508.250,00	0,00	0,00	0,00	3.981.508.250,00
120	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
121	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.021.000,00	0,00	0,00	0,00	20.021.000,00
123	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	241.648.100,00	0,00	0,00	0,00	241.648.100,00
125	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.530.192.500,00	0,00	0,00	0,00	1.530.192.500,00
127	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika	188.406.250,00	7.500.000,00	0,00	0,00	195.906.250,00
128	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
129	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	34.995.500,00	0,00	0,00	0,00	34.995.500,00
130	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12.136.500,00	0,00	0,00	0,00	12.136.500,00
131	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.319.713.650,00	0,00	0,00	0,00	1.319.713.650,00
132	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Koto Salak	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
133	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Koto Salak	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00
134	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Koto Salak	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
135	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Koto Salak	1.622.384.200,00	27.600.000,00	0,00	0,00	1.649.984.200,00
136	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Koto Salak	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
137	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Padang Laweh	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
138	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Padang Laweh	9.975.000,00	0,00	0,00	0,00	9.975.000,00
139	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Padang Laweh	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
140	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Padang Laweh	1.269.456.000,00	0,00	0,00	0,00	1.269.456.000,00
141	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Padang Laweh	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
142	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	235.231.500,00	0,00	0,00	0,00	235.231.500,00
143	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	333.949.900,00	0,00	0,00	0,00	333.949.900,00
144	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.732.756.314,00	0,00	0,00	0,00	8.732.756.314,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
145	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	392.580.100,00	7.500.000,00	0,00	0,00	400.080.100,00
146	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah	9.439.020.000,00	0,00	0,00	0,00	9.439.020.000,00
147	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	876.827.800,00	0,00	0,00	0,00	876.827.800,00
148	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	564.330.000,00	0,00	0,00	0,00	564.330.000,00
149	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	182.710.000,00	144.600.000,00	0,00	0,00	327.310.000,00
150	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	68.973.000,00	0,00	0,00	0,00	68.973.000,00
151	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
152	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6.458.241.330,00	0,00	0,00	0,00	6.458.241.330,00
153	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.913.634.328,00	0,00	0,00	0,00	2.913.634.328,00
154	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	7.345.931.000,00	0,00	0,00	0,00	7.345.931.000,00
				TOTAL	**406.865.067.320,00**	**78.970.279.626,00**	**0,00**	**0,00**	**485.835.346.946,00**

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

Bupati

SUTAN RISKA

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN
DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran X Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 desember 2023

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	GOLONGAN	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Golongan IV/ e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Golongan IV/ d	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
3	Golongan IV/ c	-	13	-	-	-	4	3	4	-	24
4	Golongan IV/ b	-	7	18	-	-	155	13	4	3	200
5	Golongan IV/ a	-	2	64	36	-	218	47	4	23	394
SUB JUMLAH		-	25	82	36	-	377	63	12	26	621
6	Golongan III/ d	-	-	35	139	-	287	152	17	35	665
7	Golongan III/ c	-	-	3	70	-	364	93	18	38	586
8	Golongan III/ b	-	-	-	12	-	222	159	39	76	508
9	Golongan III/ a	-	-	-	2	-	260	50	41	74	427
SUB JUMLAH		-	-	38	223	-	1.133	454	115	223	2.186
10	Golongan II/ d	-	-	-	-	-	3	116	14	60	193
11	Golongan II/ c	-	-	-	-	-	3	56	5	77	141
12	Golongan II/ b	-	-	-	-	-	2	3	6	9	20
13	Golongan II/ a	-	-	-	-	-	1	-	-	6	7
SUB JUMLAH		-	-	-	-	-	9	175	25	152	361
14	Golongan I/ d	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
15	Golongan I/ c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
16	Golongan I/ b	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
17	Golongan I/ a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SUB JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
JUMLAH		-	25	120	259	-	1.519	692	152	409	3.176

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XI

DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 desember 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir N-1
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=4+5-6*
I	**PIUTANG PAJAK**		**36.232.224.028**	**3.398.295.876**	**1.233.796.160**	**38.396.723.744**
	- PBB-P2	Tahun 2021	35.163.427.868	2.278.295.876	165.000.000	37.276.723.744
	- Pajak Penerangan Jalan	Tahun 2021	1.067.255.885	1.120.000.000	1.067.255.885	1.120.000.000
	- Pajak Hotel	Tahun 2021	-	-	-	-
	- Pajak Restoran	Tahun 2021	1.540.275	-	1.540.275	-
I	**PIUTANG RETRIBUSI**		**767.327.811**	**-**	**129.670.000**	**637.657.811**
	- Retribusi Pelayanan Pasar	Tahun 2021	2.300.000	-	-	2.300.000
	- Retribusi Pengedalian Menara Telekomunikasi	Tahun 2021	240.299.261	-	119.900.000	120.399.261
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Tahun 2021	53.067.000	-		53.067.000
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Tahun 2021	471.661.550	-	9.770.000	461.891.550
II	**PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**		**10.284.830**	**-**	**10.284.830**	**-**
	- Penambahan Piutang Deviden PT. BPR	Tahun 2021	-	-	-	-
	- Penambahan Piutang Deviden PT. Balairung Citrajaya Sumbar	Tahun 2021	10.284.830	-	10.284.830	-
III	**PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH**		**18.281.799.828**	**-**	**13.396.779.623**	**4.885.020.205**
	- Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh	Tahun 2021	13.310.387.523		13.306.665.323	3.722.200
	- Piutang Dana Bergulir	Tahun 2021	554.897.679		-	554.897.679
	- Piutang TGR	Tahun 2021	4.410.484.635		89.214.300	4.321.270.335
	- Piutang Pengembalian Belanja	Tahun 2021	5.129.991		-	5.129.991
	- Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah	Tahun 2021	900.000		900.000	-
IV	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**		**9.630.356.468**	**-**	**9.630.356.468**	**-**
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Tahun 2021	2.272.094.248	-	2.272.094.248	-
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Tahun 2021	1.979.521.626	-	1.979.521.626	-
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB)	Tahun 2021	5.368.133.877	-	5.368.133.877	-
	- Pajak Air Permukaan (PAP)	Tahun 2021	10.606.717	-	10.606.717	-
V	**PIUTANG LAINNYA**	Tahun 2021	**13.050.752**	**-**	**13.050.752**	**-**
	- CV. Artha Mandiri atas hutang PPN dan PPh		13.050.752	-	13.050.752	-
	JUMLAH		**64.935.043.717**	**3.398.295.876**	**24.413.937.833**	**43.919.401.760**

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH
DAN INVESTASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran XII : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 desember 2023

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13 = 9-12
1	2006 dan 2007 2012 2013 2017 2023	PT BPD Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari	Perda No. 2 Tahun 2009 Perda No.8 Tahun 2017 Perda No.8 Tahun 2017	11.000 lembar saham Seri A 3.236 lembar saham Seri A 5.400 lembar saham seri A 3.716 lembar saham seri A	25.852.000.000,00	25.852.000.000,00	1.500.000.000,00	27.352.000.000,00	-	4.832.210.107,00	-	27.352.000.000,00
2	2010	PT. Balairung Citra Jaya Sumbar	Surat Gubernur Sumbar	900 lembar saham Seri A 600.000 lembar Saham Seri B	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	9.000.000,00	-	1.500.000.000,00
3	2012	PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung		10.000 lembar saham Seri B	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	6.000.000,00		100.000.000,00
JUMLAH					27.452.000.000,00	27.452.000.000,00	1.500.000.000,00	28.952.000.000,00	-	4.847.210.107,00	-	28.952.000.000,00

Pulau Punjung, 29 Desember 2023

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XIII

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Ref	Anggaran 2022 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	V.A.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.A.1.a				
Pendapatan Pajak Daerah	V.A.1.a.1	22.776.715.953,00	21.634.156.143,46	94,98	20.495.633.388,25
Pendapatan Retribusi Daerah	V.A.1.a.2	3.873.808.400,00	2.759.700.350,00	71,24	2.411.365.382,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.A.1.a.3	4.324.065.836,00	4.324.065.836,00	100,00	3.524.570.411,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.A.1.a.4	74.440.779.485,00	79.292.868.316,34	106,52	56.397.892.339,62
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**105.415.369.674,00**	**108.010.790.645,80**	**102,46**	**82.829.461.520,87**
PENDAPATAN TRANSFER	V.A.1.b				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	V.A.1.b.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.1.a	17.815.048.000,00	23.514.204.916,00	131,99	30.199.842.269,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.A.1.b.1.b	4.490.028.000,00	5.871.006.918,00	130,76	3.462.713.300,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.A.1.b.1.c	472.606.168.000,00	472.528.368.549,00	99,98	472.416.143.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.A.1.b.1.d	187.370.966.000,00	171.656.788.100,00	91,61	207.765.406.760,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**682.282.210.000,00**	**673.570.378.483,00**	**98,72**	**713.844.105.329,00**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	V.A.1.b.2				
Dana Otonomi Khusus		-	-		-
Dana Penyesuaian	V.A.1.b.2	54.283.677.000,00	54.283.677.000,00	100,00	73.540.405.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		**54.283.677.000,00**	**54.283.677.000,00**	**100,00**	**73.540.405.000,00**
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	V.A.1.b.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.3.a	60.871.766.184,00	58.631.965.543,00	96,32	51.272.491.740,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.A.1.b.3.b	-	-	-	-

Uraian	Ref	Anggaran 2022 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
Bantuan Keuangan		-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		**60.871.766.184,00**	**58.631.965.543,00**	**96,32**	**51.272.491.740,00**
Total Pendapatan Transfer		**797.437.653.184,00**	**788.486.021.026,00**	**98,83**	**838.657.002.069,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.A.1.c				
Pendapatan Hibah	V.A.1.c.1	15.624.620.000,00	16.580.071.607,00	106,12	26.548.313.512,00
Pendapatan Dana Darurat	V.A.1.c.2	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	V.A.1.c.3	-	-	0,00	30.885.940.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		**15.624.620.000,00**	**16.580.071.607,00**	**106,12**	**57.434.253.512,00**
JUMLAH PENDAPATAN		**918.477.642.858,00**	**911.076.883.278,80**	**99,19**	**978.920.717.101,87**
BELANJA	V.A.2				
BELANJA OPERASI	V.A.2.a				
Belanja Pegawai	V.A.2.a.1	393.543.166.479,00	380.048.882.570,44	96,57	380.289.821.307,81
Belanja Barang	V.A.2.a.2	320.595.136.217,00	304.834.151.224,05	95,08	246.512.992.141,35
Bunga		-		-	
Subsidi		-		-	
Hibah	V.A.2.a.3	11.550.690.880,00	11.277.041.621,00	97,63	11.804.111.087,00
Bantuan Sosial	V.A.2.a.4	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		**725.688.993.576,00**	**696.160.075.415,49**	**95,93**	**638.706.924.536,16**
BELANJA MODAL	V.A.2.b				
Belanja Tanah	V.A.2.b.1	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2	49.984.934.923,00	48.052.940.621,00	96,13	51.641.549.726,92
Belanja Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3	21.484.719.732,00	15.750.482.106,12	73,31	85.966.356.136,57
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.A.2.b.4	77.611.351.420,00	66.363.505.690,74	85,51	22.155.213.262,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5	2.824.227.376,00	2.624.446.575,00	92,93	6.569.632.088,00
Jumlah Belanja Modal		**151.905.233.451,00**	**132.791.374.992,86**	**87,42**	**166.252.751.216,49**
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	V.A.2.c	450.000.000,00	369.162.297,00	82,04	164.439.330,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		**450.000.000,00**	**369.162.297,00**	**82,04**	**164.439.330,00**
JUMLAH BELANJA		**878.044.227.027,00**	**829.320.612.705,35**	**94,45**	**805.124.115.082,65**

Uraian	Ref	Anggaran 2022 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
TRANSFER	V.A.3				
TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA					
Bagi Hasil Pajak		2.825.328.297,00	2.384.214.550,00	84,39	1.658.321.536,00
Bagi Hasil Retribusi		423.889.516,00	275.334.926,00	64,95	202.856.707,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		107.391.184.000,00	107.391.175.000,00	100,00	110.062.863.000,00
JUMLAH TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA		**110.640.401.813,00**	**110.050.724.476,00**	**99,47**	**111.924.041.243,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**988.684.628.840,00**	**939.371.337.181,35**	**95,01**	**917.048.156.325,65**
SURPLUS/(DEFISIT)	V.A.4	**(70.206.985.982,00)**	**(28.294.453.902,55)**	**(40,30)**	**61.872.560.776,22**
PEMBIAYAAN	V.A.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.A.5.a				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	V.A.5.a	70.206.985.982,00	70.206.985.982,71	100,00	8.334.425.206,49
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan		**70.206.985.982,00**	**70.206.985.982,71**	**100,00**	**8.334.425.206,49**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.A.5.b	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	V.A.5.b	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang					
Pemberian Pinjaman Daerah					
Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		**70.206.985.982,00**	**70.206.985.982,71**	**100**	**8.334.425.206,49**

Uraian	Ref	Anggaran 2022 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI		-	41.912.532.080,16	-	70.206.985.982,71
KOREKSI SILPA		-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SETELAH KOREKSI	V.A.6	-	41.912.532.080,16	-	70.206.985.982,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.B	**70.206.985.982,71**	**8.334.425.206,49**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		70.206.985.982,71	8.334.425.206,49
Subtotal		-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		41.912.532.080,16	70.206.985.982,71
Subtotal		**41.912.532.080,16**	**70.206.985.982,71**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-Lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir		41.912.532.080,16	70.206.985.982,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

3. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Ref	SALDO 31 DES 2022	SALDO 31 DES 2021
1	2	3	4
ASET	V.C.1		
ASET LANCAR	V.C.1.a		
Kas di Kas Daerah	V.C.1.a.1	34.291.745.810,17	66.539.152.597,42
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.a.2	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	V.C.1.a.3	-	-
Kas di BLUD	V.C.1.a.4	7.566.677.529,99	3.500.297.770,29
Kas di BOS	V.C.1.a.5	52.108.740,00	154.484.863,00
Kas Lainnya	V.C.1.a.6	123.263.561,00	312.184.107,27
Setara Kas	V.C.1.a.7	-	-
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak	V.C.1.a.8	36.486.798.355,00	36.232.224.028,00
Penyisihan Piutang Pajak		(26.707.658.256,28)	(26.498.466.733,38)
Piutang Pajak Netto		9.779.140.098,72	9.733.757.294,62
Piutang Retribusi	V.C.1.a.9	946.831.911,00	767.327.811,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(647.241.325,00)	(486.855.897,00)
Piutang Retribusi Netto		299.590.586,00	280.471.914,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.C.1.a.10	12.032.841,00	10.284.830,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		(60.164,21)	(51.424,15)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		11.972.676,79	10.233.405,85
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.C.1.a.11	11.378.150.461,63	18.281.799.828,37
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(3.046.534.023,19)	(2.215.643.743,10)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		8.331.616.438,44	16.066.156.083,27
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	V.C.1.a.12	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.C.1.a.13	9.186.486.845,00	9.630.356.468,00
Piutang Pendapatan Lainnya	V.C.1.a.14	-	13.050.752,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		-	(13.050.752,00)
Piutang Lainnya Netto		-	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	V.C.1.a.15	276.872.526,15	1.558.223.934,04
Persediaan	V.C.1.a.16	46.047.259.249,88	38.086.898.001,69
Jumlah Aset Lancar		**115.968.534.062,14**	**145.872.214.439,45**
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.C.1.b		
Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen		-	-

URAIAN	Ref	SALDO 31 DES 2022	SALDO 31 DES 2021
1	2	3	4
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.b.1	27.452.000.000,00	27.452.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Permanen		**27.452.000.000,00**	**27.452.000.000,00**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**27.452.000.000,00**	**27.452.000.000,00**
ASET TETAP			
Tanah	V.C.1.c.1	642.128.841.182,00	667.421.012.047,00
Peralatan dan Mesin	V.C.1.c.2	409.319.869.697,76	365.830.496.579,36
Gedung dan Bangunan	V.C.1.c.3	861.592.577.852,96	828.611.661.247,60
Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.C.1.c.4	1.417.084.539.911,16	1.347.104.392.370,42
Aset Tetap Lainnya	V.C.1.c.5	110.099.518.896,00	108.279.890.823,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.C.1.c.6	12.734.430.274,00	11.750.539.457,00
Akumulasi Penyusutan		(1.190.948.112.056,18)	(1.055.277.207.905,60)
Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan		**2.282.111.665.957,72**	**2.273.720.784.618,98**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	V.C.1.d	-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	V.C.1.e		
Tuntutan Ganti Rugi	V.C.1.e.1	287.907.729,00	293.258.963,00
Aset Tak Berwujud	V.C.1.e.2	4.345.006.277,00	4.013.267.277,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(2.233.315.887,00)	(1.906.476.687,00)
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi		2.111.690.390,00	2.106.788.590,00
Aset Lain-Lain	V.C.1.e.3	201.056.181.109,44	205.255.939.395,84
Penyusutan Aset Lain-Lain		(157.064.214.099,44)	(148.585.496.096,84)
Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan		43.991.967.010,00	56.670.443.299,00
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	V.C.1.e.4	2.689.400.169,00	-
Jumlah Aset Lainnya		**49.080.965.298,00**	**59.070.490.852,00**
JUMLAH ASET		**2.474.613.185.317,86**	**2.506.115.489.910,43**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.2.a.1	257.846.811,27	785.399.544,27
Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.a.2	83.144.415,10	102.623.340,64
Utang Belanja	V.C.2.a.3	11.321.739.731,88	12.286.454.764,47
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.a.4	4.891.202.700,00	4.891.202.700
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**16.553.933.658,25**	**18.045.680.349,38**

URAIAN	Ref	SALDO 31 DES 2022	SALDO 31 DES 2021
1	2	3	4
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya	V.C.2.b	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**16.553.933.658,25**	**18.045.680.340,38**
EKUITAS			
EKUITAS	V.A.3	2.458.059.251.659,61	2.488.069.809.561,05
JUMLAH EKUITAS		2.458.059.251.659,61	2.488.069.809.561,05
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**2.474.613.185.317,86**	**2.506.115.489.910,43**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Ref	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pendapatan Pajak Daerah	V.D.1.a.1	23.850.796.763,46	22.455.754.207,25	1.395.042.556,21	6,21
Pendapatan Retribusi Daerah	V.D.1.a.2	2.947.679.575,54	2.499.784.055,43	447.895.520,11	17,92
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.D.1.a.3	4.325.813.847,00	10.284.830,00	4.315.529.017,00	41.960,14
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	V.D.1.a.4	68.255.991.163,72	68.868.917.011,55	(612.925.847,83)	(0,89)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**99.380.281.349,72**	**93.834.740.104,23**	**5.545.541.245,49**	**5,91**
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b.1.a	26.203.605.085,00	26.352.048.498,00	(148.443.413,00)	(0,56)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.D.1.b.1.b	5.871.006.918,00	3.419.652.416,00	2.451.354.502,00	71,68
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.D.1.b.1.c	472.528.368.549,00	472.416.143.000,00	112.225.549,00	0,02
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.D.1.b.1.d	171.656.798.100,00	207.765.406.760,00	(36.108.608.660,00)	(17,38)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**676.259.778.652,00**	**709.953.250.674,00**	**(33.693.472.022,00)**	**(4,75)**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA					
Dana Penyesuaian		54.283.677.000,00	73.540.405.000,00	(19.256.728.000,00)	(26,19)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		**54.283.677.000,00**	**73.540.405.000,00**	**(19.256.728.000,00)**	**(26,19)**

URAIAN	Ref	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b.3.a	58.188.095.920,00	51.935.128.939,00	6.252.966.981,00	12,04
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.D.1.b.3.b	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		**58.188.095.920,00**	**51.935.128.939,00**	**6.252.966.981,00**	**12,04**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**788.731.551.572,00**	**835.428.784.613,00**	**(46.697.233.041,00)**	**(5,59)**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	V.D.1.c.1	62.593.326.137,23	91.236.115.776,00	(28.642.789.638,77)	(31,39)
Pendapatan Dana Darurat	V.D.1.c.2	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	V.D.1.c.3	-	30.885.940.000,00	(30.885.940.000,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		**62.593.326.137,23**	**122.122.055.776,00**	**(59.528.729.638,77)**	**(48,75)**
JUMLAH PENDAPATAN		**950.706.159.058,95**	**1.051.385.580.493,23**	**(100.680.421.434,28)**	**(9,58)**
BEBAN					
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	V.D.2.a	380.917.803.230,71	382.354.718.195,46	(1.436.914.964,75)	(0,38)
Beban Persediaan	V.D.2.b	108.439.121.892,65	72.600.984.126,33	35.838.137.766,32	49,36
Beban Jasa	V.D.2.c	110.592.860.111,88	98.084.318.217,81	12.508.541.894,07	12,75
Beban Sewa	V.D.2.d	4.396.584.495,00	2.509.976.767,12	1.886.607.727,88	75,16
Beban Pemeliharaan	V.D.2.e	12.208.329.617,99	11.196.376.603,00	1.011.953.014,99	9,04
Beban Perjalanan Dinas	V.D.2.f	60.814.621.826,00	47.517.031.727,00	13.297.590.099,00	27,98
Beban Hibah	V.D.2.g	12.430.936.621,00	21.567.610.832,00	(9.136.674.211,00)	(42,36)
Beban Bantuan Sosial	V.D.2.h	-	-	-	-
Beban Penyusutan/Amortisasi	V.D.2.i	152.432.894.181,18	168.473.799.471,73	(16.040.905.290,55)	(9,52)
Beban Penyisihan Piutang	V.D.2.j	3.187.423.217,05	3.573.789.229,02	(386.366.011,97)	(10,81)
Beban Transfer	V.D.2.k	109.572.502.947,00	112.110.404.801,00	(2.537.901.854,00)	(2,26)
Beban Lain-Lain	V.D.2.l	1.658.326.578,00	3.567.438.148,62	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASI		**956.651.404.718,46**	**923.556.448.119,09**	**33.094.956.599,37**	**3,58**
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	V.D.3	**(5.946.245.659,51)**	**127.829.132.374,14**	**(133.775.378.033,65)**	**(104,65)**

URAIAN	Ref	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	V.D.4				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		945.393.931,00	363.292.100,00	582.101.831,00	160,23
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V.D.4.1	-	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		**945.393.931,00**	**363.292.100,00**	**582.101.831,00**	**160,23**
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	V.D.5	**(5.000.851.728,51)**	**128.192.424.474,14**	**(133.193.276.202,65)**	**(103,90)**
POS LUAR BIASA	V.D.6				
Pendapatan Luar Biasa	V.D.6.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	V.D.6.2	336.162.297,00	197.439.330,00	138.722.967,00	70,26
Jumlah Pos Luar Biasa		**336.162.297,00**	**197.439.330,00**	**138.722.967,00**	**70,26**
SURPLUS/DEFISIT LO	V.D.7	**(5.337.014.025,51)**	**127.994.985.144,14**	**(133.331.999.169,65)**	**(104,17)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Ref	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
Arus Masuk Kas	V.E.1.a		
Penerimaan Pajak Daerah		21.634.156.143,46	20.495.633.388,25
Penerimaan Retribusi Daerah		2.759.700.350,00	2.411.365.382,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.324.065.836,00	3.524.570.411,00
Lain-Lain PAD yang Sah		78.250.863.518,34	56.034.600.239,62
Dana Bagi Hasil Pajak		23.514.204.916,00	30.199.842.269,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		5.871.006.918,00	3.462.713.300,00
Dana Alokasi Umum		472.528.368.549,00	472.416.143.000,00
Dana Alokasi Khusus		171.656.798.100,00	207.765.406.760,00
Dana Otonomi Khusus		-	-
Dana Penyesuaian		54.283.677.000,00	73.540.405.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		58.631.965.543,00	51.272.491.740,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Penerimaan Hibah		16.580.071.607,00	26.548.313.512,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	30.885.940.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**910.034.878.480,80**	**978.557.425.001,87**
Arus Keluar Kas	V.E.1.b		
Pembayaran Pegawai		380.048.862.570,44	380.289.821.307,81
Pembayaran Barang		304.834.151.224,05	246.612.992.141,35
Pembayaran Bunga			
Pembayaran Subsidi			
Pembayaran Hibah		11.277.041.621,00	11.804.111.087,00
Pembayaran Bantuan Sosial		-	0,00
Pembayaran Tak Terduga		369.162.297,00	164.439.330,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		2.384.214.550,00	1.708.764.771,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		275.334.926,00	152.413.472,00

URAIAN	Ref	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	2	3	4
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan		107.391.175.000,00	110.062.863.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**806.579.962.188,49**	**750.795.405.109,16**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**103.454.916.292,31**	**227.762.019.892,71**
Arus Kas dari Aktifitas Investasi	V.E.2		
Arus Masuk Kas	V.E.2.a		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.041.104.798,00	354.867.100,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		900.000,00	8.425.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**1.042.004.798,00**	**363.292.100,00**
Arus Keluar Kas	V.E.2.b		
Perolehan Tanah			
Perolehan Peralatan dan Mesin		48.052.940.621,00	51.541.549.729,92
Perolehan Gedung dan Bangunan		15.750.482.106,12	85.986.356.136,57
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		66.363.505.690,74	22.155.213.262,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.624.446.575,00	6.569.632.088,00
Perolehan Aset Lainnya			
Jumlah Arus Keluar Kas		**132.791.374.992,86**	**166.252.751.216,49**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(131.749.370.194,86)**	**(165.889.459.116,49)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.E.3		
Arus Masuk Kas	V.E.3.a		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas			
Arus Keluar Kas	V.E.3.b		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			

URAIAN	Ref	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	2	3	4
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.E.4		
Arus Masuk Kas	V.E.4.a		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		60.514.332.892,54	62.122.057.999,27
Penerimaan Kas		13.497.676,00	38.500.244,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**60.527.830.568,54**	**62.160.558.243,27**
Arus Keluar Kas	V.E.4.b		
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		60.665.200.118,81	61.853.274.136,00
Pengeluaran Kas		38.500.244,00	1.897.200,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**60.703.700.362,81**	**61.855.171.336,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(175.869.794,27)**	**305.386.907,27**
Kenaikan/Penurunan Kas		**(28.470.323.696,82)**	**62.177.947.683,49**
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas		66.539.152.597,42	6.155.879.601,54
Saldo Awal Kas di BLUD		3.500.297.770,29	1.526.712.732,95
Saldo Awal Kas di Dana BOS		154.484.863,00	645.579.320,00
Saldo Awal Kas Lainnya		312.184.107,27	
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		34.291.745.810,17	66.539.152.597,42
Saldo Akhir Kas di BLUD		7.568.677.529,99	3.500.297.770,29
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Saldo Akhir Kas di Dana BOS		52.106.740,00	154.484.863,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		123.263.561,00	312.184.107,27
Saldo Akhir Kas		**42.035.795.641,16**	**70.506.119.337,98**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Ref	2022	2021
1	2	3	4
Ekuitas Awal	V.F	**2.488.069.809.661,05**	**2.346.493.866.411,02**
Surplus/Defisit-LO		(5.337.014.025,51)	127.994.985.144,14
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar			
a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		-	-
b Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar		(24.673.543.875,93)	13.580.958.005,89
Ekuitas Akhir		**2.458.059.251.659,61**	**2.488.069.809.661,05**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

LAMPIRAN XIV

DAFTAR ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XIV.a Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 desember 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Nama OPD	Saldo Pada Akhir Tahun T-2 (2021)	Perkiraan Penambahan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Pengurangan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun T-1 (2022)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat DPRD	64.042.307.564	1.517.870.832	1.933.528.530	63.626.649.866
2	Sekretariat Daerah	505.623.295.325	14.949.606.295	29.087.339.293	491.485.562.327
3	Kec. Pulau Punjung	2.544.907.545	8.000.000	139.590.000	2.413.317.545
4	Kec. Sitiung	2.004.317.865	45.184.520	48.915.000	2.000.587.385
5	Kec. Koto Baru	3.306.365.686	139.704.000	-	3.446.069.686
6	Kec. Sungai Rumbai	3.091.561.053	-	-	3.091.561.053
7	Kec. IX Koto	808.276.379	14.000.000	26.715.000	795.561.379
8	Kec. Timpeh	2.830.507.271	148.680.125	199.747.457	2.779.439.939
9	Kec. Padang Laweh	1.832.928.683	-	19.546.000	1.813.382.683
10	Kec Tiumang	2.934.837.284	-	57.700.000	2.877.137.284
11	Kec Koto Besar	3.148.939.052	-	27.500.000	3.121.439.052
12	Kec Koto Salak	2.516.606.224	266.200.000	157.950.000	2.624.856.224
13	Kec. Asam Jujuhan	3.473.762.125	24.150.000	61.463.800	3.436.448.325
14	Dinas PUPR	1.599.306.404.134	88.690.722.700	3.368.745.832	1.684.628.381.003
15	Dinas PERKIMTAN	31.123.254.710	22.696.726.480	292.850.000	53.527.131.190
16	Dinas Perhubungan	14.923.747.886	439.888.480	321.000.000	15.042.636.366
17	Dinas Kesehatan	175.016.203.402	16.663.496.160	7.557.762.858	184.121.936.704
18	RSUD	163.315.274.428	17.761.427.745	1.957.785.640	179.118.916.533
19	Dinas Pendidikan	416.871.588.779	27.904.099.476	775.546.207	444.000.142.048
20	Dinas BUDPARPORA	105.803.055.753	456.452.938	296.480.000	105.963.028.691
21	Dinas TRANSNAKER	6.694.572.581	153.323.000	-	6.847.895.581
22	DSP3KB	7.002.590.598	1.755.886.263	509.608.507	8.248.868.354
23	DISDUKCAPIL	4.548.592.822	631.178.000	96.229.250	5.083.541.572
24	Dinas PMD	1.428.703.300	620.244.138	283.294.138	1.765.653.300
25	Dinas Pertanian	39.634.345.715	1.335.579.340	62.113.453	40.907.811.602

NO	Nama OPD	Saldo Pada Akhir Tahun T-2 (2021)	Perkiraan Penambahan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Pengurangan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun T-1 (2022)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
26	Dinas Pangan dan Perikanan	18.798.630.952	1.714.000.000	23.250.000	20.489.380.952
27	Dinas KUMPERDAG	81.692.572.557	-	273.772.600	81.418.799.957
28	BKD	10.669.293.510	530.704.000	243.413.160	10.956.584.350
29	DPMPTSP	2.147.265.441	454.260.838	157.500.000	2.444.026.279
30	Inspektorat Kabupaten	3.068.373.687	736.978.459	57.704.000	3.747.648.146
31	BAPPPEDA	1.697.805.442	412.343.607	217.072.057	1.893.076.992
32	DLH	11.532.926.205	834.532.500	976.266.412	11.391.192.293
33	Kantor KESBANGPOL	258.254.500	29.435.000	-	287.689.500
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.551.227.096	1.000.000	-	6.552.227.096
35	BPBD	17.005.512.808	22.381.483.018	30.866.410.232	8.520.585.594
36	BKPSDM	2.115.542.136	148.210.000	13.410.000	2.250.342.136
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.875.846.483	100.531.000	33.385.000	5.942.992.483
38	Dinas KOMINFO	3.757.795.544	639.501.000	-	4.397.296.544
	JUMLAH	3.328.997.992.525	224.205.399.915	80.143.594.426	3.473.059.798.014

-

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

BUPATI

SUTAN RISKA

Lampiran XIV.b Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 desember 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Nama OPD	Saldo Pada Akhir Tahun T-2 (2021)	Perkiraan Penambahan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Pengurangan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun T-1 (2022)
1	2	3	4	p	6=3+4-5
1	Sekretariat DPRD	413.144.500	69.655.000	68.981.000	413.818.500
2	Sekretariat Daerah	7.596.331.529	1.541.650.000	2.059.709.138	7.078.272.391
3	Kec. Pulau Punjung	437.179.000	177.540.000	66.550.000	548.169.000
4	Kec. Sitiung	243.500.000	48.915.000	19.215.000	273.200.000
5	Kec. Koto Baru	402.111.800	-	25.375.000	376.736.800
6	Kec. Sungai Rumbai	446.698.000	14.355.000	14.355.000	446.698.000
7	Kec. IX Koto	316.133.000	26.715.000	84.975.000	257.873.000
8	Kec. Timpeh	367.441.950	15.950.000	15.950.000	367.441.950
9	Kec. Padang Laweh	280.393.000	19.546.000	62.970.000	236.969.000
10	Kec Tiumang	331.166.000	57.700.000	-	388.866.000
11	Kec Koto Besar	520.163.334	27.500.000	-	547.663.334
12	Kec Koto Salak	790.437.000	-	34.500.000	755.937.000
13	Kec. Asam Jujuhan	314.795.000	61.463.800	29.360.000	346.898.800
14	Dinas PUPR	126.002.286.022	2.024.063.000	4.617.251.000	123.409.098.022
15	Dinas PERKIMTAN	2.563.320.722	-	2.416.935.672	146.385.050
16	Dinas Perhubungan	1.564.706.530	296.919.000	481.500.000	1.380.125.530
17	Dinas Kesehatan	10.048.016.009	518.525.000	540.538.623	10.026.002.386
18	RSUD	9.904.439.196	1.957.785.640	287.060.678	11.575.164.158
19	Dinas Pendidikan	18.742.783.159	1.035.936.207	970.834.455	18.807.884.911
20	Dinas BUDPARPORA	173.590.852	36.000.000	13.500.000	196.090.852
21	Dinas TRANSNAKER	412.148.858	34.947.000	36.729.000	410.366.858
22	DSP3KB	1.587.630.663	224.698.507	298.452.138	1.513.877.032
23	DISDUKCAPIL	471.927.869	97.729.250	-	569.657.119
24	Dinas PMD	565.289.593	-	283.294.138	281.995.455
25	Dinas Pertanian	14.691.326.778	61.429.200	61.429.200	14.691.326.778

NO	Nama OPD	Saldo Pada Akhir Tahun T-2 (2021)	Perkiraan Penambahan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Pengurangan Tahun T-1 (2022)	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun T-1 (2022)
1	2	3	4	p	6=3+4-5
26	Dinas Pangan dan Perikanan	966.902.800	23.250.000	-	990.152.800
27	Dinas KUMPERDAG	142.153.833	273.772.600	254.250.000	161.676.433
28	BKD	2.730.340.372	318.648.640	29.790.000	3.019.199.012
29	DPMPTSP	128.073.400	6.750.000	-	134.823.400
30	Inspektorat Kabupaten	81.720.490	43.900.000	26.284.000	99.336.490
31	BAPPPEDA	435.769.795	128.250.000	128.250.000	435.769.795
32	DLH	2.869.418.016	765.859.412	477.243.500	3.158.033.928
33	Kantor KESBANGPOL	156.131.700	-	-	156.131.700
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	284.242.598	7.500.000	-	291.742.598
35	BPBD	1.327.312.000	-	413.075.000	914.237.000
36	BKPSDM	320.329.400	13.410.000	13.410.000	320.329.400
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	77.672.580	33.385.000	-	111.057.580
38	Dinas KOMINFO	562.179.325	-	-	562.179.325
	JUMLAH	209.269.206.673	9.963.748.256	13.831.767.542	205.401.187.386

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

BUPATI

SUTAN RISKA

a. Tahun Pertama

Lampiran XIV.c Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 desember 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Nama OPD	Nilai KDP TA T-2 (2021)	Jumlah Anggaran T-1 (Rp.)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir Tahun TA T-1 (2022) (Rp.)	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan Dalam Tahun ini (2023)	
			Penambahan	Pengurangan		APBD TA T (2023)	Perubahan ABPD TA (2023)
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-		
2	Sekretariat Daerah	-	6.360.000	6.360.000	-		
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-		
4	Kec. Sitiung	-	-	-			
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-		
6	Kec. Sungai Rumbai	-	-	-	-		
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-		
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-		
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-		
10	Kec Tiumang	-	-	-	-		
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-		
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-		
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-		
14	Dinas PUPR	2.935.383.067	2.923.370.613	627.064.000	5.231.689.680	2.061.229.500	
15	Dinas PERKIMTAN	239.520.000	-	-	239.520.000		
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-		
17	Dinas Kesehatan	7.037.737.858	-	7.037.737.858	-		
18	RSUD	-	-	-	-		
19	Dinas Pendidikan	-	-	-	-		
20	Dinas BUDPARPORA	-	-	-	-		
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-		
22	DSP3KB	-	-	-	-		
23	DISDUKCAPIL	-	-	-	-		
24	Dinas PMD	-	-	-	-		

NO	Nama OPD	Nilai KDP TA T-2 (2021)	Jumlah Anggaran T-1 (Rp.)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir Tahun TA T-1 (2022) (Rp.)	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan Dalam Tahun ini (2023)	
			Penambahan	Pengurangan		APBD TA T (2023)	Perubahan ABPD TA (2023)
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-		
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-		
27	Dinas KUMPERDAG	332.915.000	-	-	332.915.000		
28	BKD	-	-	-	-		
29	DPMPTSP	-	-	-	-		
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-		
31	BAPPPEDA	-	-	-	-		
32	DLH	-	-	-	-		
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-		
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-		
35	BPBD	368.216.182	9.957.809.470	4.232.487.408	6.093.538.244	6.050.000.000	
36	BKPSDM	-	-	-	-		
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipar	836.767.350	-	-	836.767.350	257.669.000	
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-		
	JUMLAH	11.750.539.457	12.887.540.083	11.903.649.266	12.734.430.274	8.368.898.500	-

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

BUPATI

SUTAN RISKA

b. Tahun Kedua

Lampiran XIV.d : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 desember 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Nama OPD	Nilai KDP TA T-2 (2020)	Jumlah Anggaran T-2 (2020) (Rp.)		Jumlah Realiasasi Sampai dengan Akhir TA T-2 (2021) (Rp.)	Jumlah Anggaran T-1(2022) (Rp.)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir Tahun TA T-1 (2022) (Rp.)	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan Dalam Tahun ini (2023)	
			Penambahan	Pengurangan		Penambahan	Pengurangan		APBD TA (2023)	Perubahan ABPD TA (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Sekretariat Daerah	-	17.040.000	17.040.000	-	6.360.000	6.360.000	-		-
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-	-	-	-		-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-	-		-
6	Kec. Sungai Rumbai	-	-	-	-	-	-	-		-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-	-	-	-		-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-	-		-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-	-		-
10	Kec Tiumang	-	-	-	-	-	-	-		-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-	-	-	-		-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-	-	-	-		-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-		-
14	Dinas PUPR	105.548.268.107	162.399.415	102.775.284.455	2.935.383.067	2.923.370.613	627.064.000	5.231.689.680	2.061.229.500	-
15	Dinas PERKIMTAN	366.648.550	-	127.128.550	239.520.000	-	-	239.520.000		-
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-		-
17	Dinas Kesehatan	5.007.327.230	7.077.404.738	5.046.994.110	7.037.737.858	-	7.037.737.858	-		-
18	RSUD	-	-	-	-	-	-	-		-
19	Dinas Pendidikan	978.512.000	-	978.512.000	-	-	-	-		-
20	Dinas BUDPARPORA	-	-	-	-	-	-	-		-
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-	-	-	-		-
22	DSP3KB	-	-	-	-	-	-	-		-
23	DISDUKCAPIL	-	-	-	-	-	-	-		-
24	Dinas PMD	-	-	-	-	-	-	-		-
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-		-
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-		-
27	Dinas KUMPERDAG	382.365.000	-	49.450.000	332.915.000	-	-	332.915.000		-
28	BKD	-	-	-	-	-	-	-		-
29	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-		-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-		-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-	-	-	-		-
32	DLH	-	-	-	-	-	-	-		-

NO	Nama OPD	Nilai KDP TA T-2 (2020)	Jumlah Anggaran T-2 (2020) (Rp.)		Jumlah Realiasasi Sampai dengan Akhir TA T-2 (2021) (Rp.)	Jumlah Anggaran T-1(2022) (Rp.)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir Tahun TA T-1 (2022) (Rp.)	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan Dalam Tahun ini (2023)	
			Penambahan	Pengurangan		Penambahan	Pengurangan		APBD TA (2023)	Perubahan ABPD TA (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	DLH	-	-	-	-	-	-	-		-
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-	-		-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMK/	-	-	-	-	-	-	-		-
35	BPBD	-	368.216.182	-	368.216.182	9.957.809.470	4.232.487.408	6.093.538.244	6.050.000.000	-
36	BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-		-
37	Dinas Perpustakaan dan Kears	836.767.350	-	-	836.767.350	-	-	836.767.350	257.669.000	-
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-	-	-	-		-
	JUMLAH	113.119.888.237	7.625.060.335	108.994.409.115	11.750.539.457	12.887.540.083	11.903.649.266	12.734.430.274	8.368.898.500	-

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

BUPATI

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XV

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran XV : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 desember 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer Dari Kas Daerah	Saldo Ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		NIHIL						

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

LAMPIRAN XVI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XVI : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 29 desember 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Oinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Punjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	JUMLAH										

NIHIL

Kab. Dharmasraya, 29 Desember 2023

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA